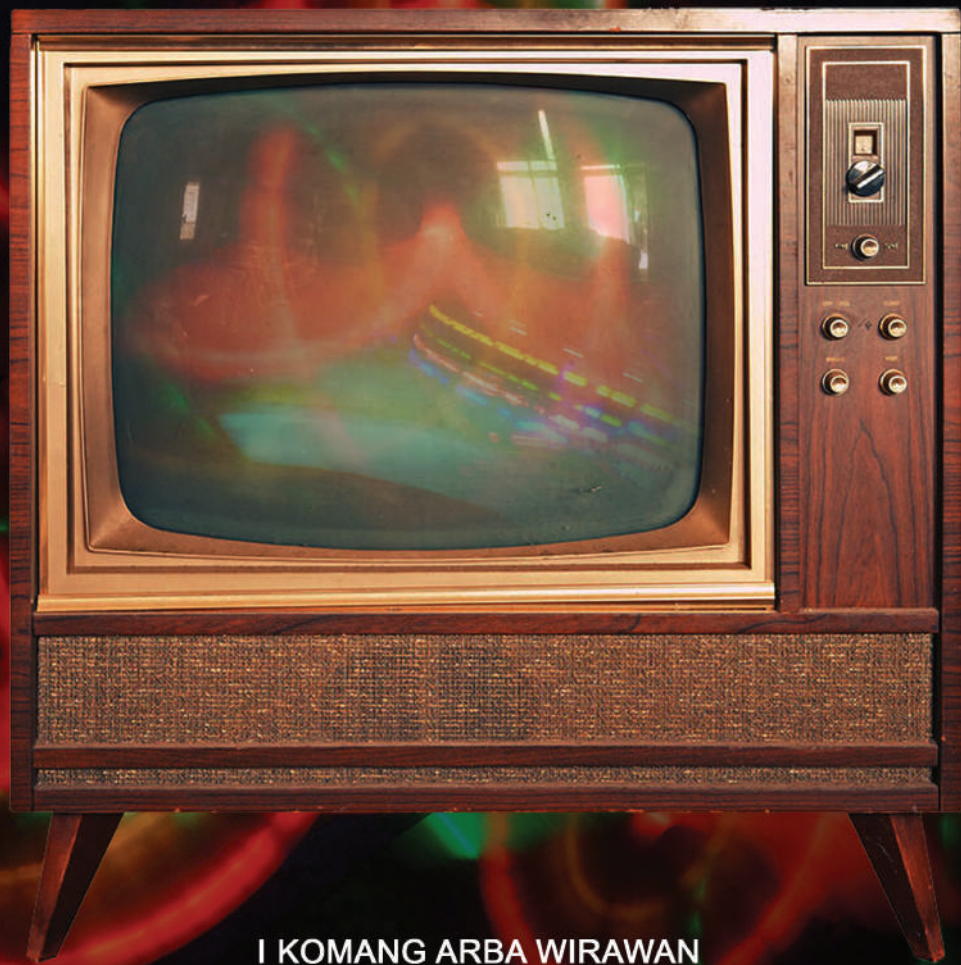


# DARI KONFLIK DESA KE LAYAR KACA

( PERTARUNGAN IDEOLOGI KEKUASAAN MEDIA DAN KEKUASAAN PENGUSAHA )



I KOMANG ARBA WIRAWAN





**“DARI KONFLIK DESA KE LAYAR KACA”**  
(Pertarungan Ideologi Kekuasaan Media dan  
Kekuasaan Penguasa)

I Komang Arba Wirawan

**“DARI KONFLIK DESA KE LAYAR KACA”**

(Pertarungan Ideologi Kekuasaan Media dan Kekuasaan  
Penguasa)

I Komang Arba Wirawan

**Editor**

I Nyoman Payuyasa

**Desainer**

Agus Ngurah Arya Putraka

**Layout**

Agus Eka Aprianta

**Penerbit**

Pusat Penerbitan LP2MPP Institut Seni Indonesia Denpasar  
Jalan Nusa Indah Denpasar 80235,  
Telepon (0361) 227316, Fax (0361) 236100  
E-mail: [penerbitan@isi-dps.ac.id](mailto:penerbitan@isi-dps.ac.id)  
Web: [jurnal.isi-dps.ac.id](http://jurnal.isi-dps.ac.id)

September 2021

**ISBN**

978-623-5560-00-7

**Hak cipta pada Penulis**

**Hak cipta dilindungi undang-undang :**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penerbit

# Prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, buku dengan, judul “Dari Konflik Desa Ke Layar Kaca”(Pertarungan Ideologi Kekuasaan Media dan Kekuasaan Penguasa) dapat dihadirkan ke tengah ruang para pembaca.

Buku “Dari Konflik Desa Ke Layar Kaca”(Pertarungan Ideologi Kekuasaan Media dan Kekuasaan Penguasa) adalah sebuah sari hasil penelitian ditulis berdasarkan disertasi penulis yang berjudul ‘Dari Konflik Desa Ke Layar Kaca: Analisis Wacana Liputan Bali TV Dalam Kasus Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali’. Disertasi ini merupakan telaah terhadap kasus media yang merupakan konflik kekuasaan media (baca: Kelompok Media Bali Post) dengan kekuasaan politik (baca: Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika). Konflik yang berawal dari pemberitaan bentrok antara desa adat/desa pakraman Kemoning dan desa adat/desa pakraman Budaga di Klungkung.

Sebuah kasus di dunia pers termasuk pertelevisian yang menarik untuk di kaji. Sebelum kita menelaah lebih dalam tentang kasus ini ada baiknya kita pahami dulu tentang dunia pers (termasuk pertelevisian) di era reformasi. Dunia pers termasuk pertelevisian memasuki era baru pada era reformasi yang bermula tahun 1998. Pertama, izin mendirikan televisi

dipermudah. Kedua, semua stasiun televisi bebas memproduksi berita. Sejak itu stasiun televisi swasta nasional dan lokal menjadikan berita sebagai salah satu acara unggulan untuk meningkatkan rating atau menonjolkan jati dirinya. Televisi-televisi lokal, seperti Bali TV dan Dewata TV mengutamakan berita daerah dan mengungkap liputan sosial, politik, dan budaya untuk memperkuat jati dirinya sebagai media informasi bagi khalayak Bali.

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu merampungkan buku ini. Banyak saran dan masukan yang penulis dapatkan untuk penyempurnaan buku ini. Penulis berharap semoga buku ini dapat berguna bagi para pembaca. Terima kasih.

Denpasar, Agustus 2021

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>Prakata</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Bab 1 Prolog</b> .....	1
Metode Penelitian .....	7
<b>Bab 2 Potret Pers Di Bali</b> .....	8
Pers di Bali Di Luar Kelompok Media Bali Post.....	8
Media Utama KMB <i>Bali Post</i> dan <i>Bali TV</i> .....	12
<b>Bab 3 Pertarungan Bali Post dan Gubernur Made Mangku Pastika</b> .....	22
<b>Bab 4 Proses Produksi Wacana Pembubaran Desa Pakraman</b> .....	41
Proses Produksi Wacana Pembubaran .....	43
<b>Bab 5 Proses Reproduksi Wacana Pembubaran Desa Pakraman</b> .....	69
<b>Bab 6 Proses Distribusi Wacana Pembubaran Desa Pakraman</b> .....	77

<b>Bab 7 Proses Konsumsi Wacana Pembubaran Desa Pakraman .....</b>	<b>88</b>
<b>Bab 8 Faktor-Faktor Yang Mendukung Proses Pembentukan Wacana Pembubaran Desa Pakraman Dalam Liputan Bali TV .....</b>	<b>98</b>
Faktor Budaya Media .....	99
Faktor Politik.....	107
Faktor Ideologi .....	116
<b>Bab 9 Wacana Tanding: Perlawanan Gubernur Bali Terhadap KMB .....</b>	<b>123</b>
Konter dalam Berita Bali Post dan Bali TV.....	123
Kapitalisme Media Wacana Pembubaran Desa Pakraman .....	140
Disinformasi dalam Wacana Pembubaran Desa Pakraman .....	144
Konflik Kepentingan dalam Wacana Pembubaran Desa Pakraman.....	147
<b>Bab 10 Epilog.....</b>	<b>155</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>159</b>



# Bab 1

## Prolog

Buku berjudul **“Dari Konflik Desa Ke Layar Kaca (Pertarungan Ideologi Kekuasaan Media dan Kekuasaan Penguasa Pada Kasus Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali)”** merupakan buku yang ditulis berdasarkan disertasi penulis yang berjudul ‘Dari Konflik Desa Ke Layar Kaca: Analisis Wacana Liputan Bali TV Dalam Kasus Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali’. Disertasi ini merupakan telaah terhadap kasus media yang merupakan konflik kekuasaan media (baca: Kelompok Media Bali Post) dengan kekuasaan politik (baca: Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika). Konflik yang berawal dari pemberitaan bentrok antara desa adat/desa pakraman Kemoning dan desa adat/desa pakraman Budaga di Klungkung.

Sebuah kasus di dunia pers termasuk pertelevisian yang menarik untuk di kaji. Sebelum kita menelaah lebih dalam tentang kasus ini ada baiknya kita pahami dulu tentang dunia pers (termasuk pertelevisian) di era reformasi. Dunia pers termasuk pertelevisian memasuki era baru pada era reformasi yang bermula tahun 1998. Pertama, izin mendirikan televisi dipermudah. Kedua, semua stasiun televisi bebas memproduksi berita. Sejak itu stasiun televisi swasta nasional dan lokal menjadikan berita sebagai salah satu acara unggulan untuk meningkatkan rating atau menonjolkan jati dirinya. Televisi-televisi lokal, seperti Bali TV dan Dewata TV mengutamakan berita daerah dan mengungkap liputan sosial, politik, dan budaya untuk memperkuat jati dirinya sebagai media informasi bagi khalayak Bali.

Pertengahan September 2011, Bali TV menyiarkan secara berturut-turut berita bahwa Gubernur Bali Made Mangku Pastika akan membubarkan desa pakraman. Berita itu dimuat luas oleh Bali Post dan Kelompok Media Bali Post (KMB). Mangku Pastika menolak berita tersebut dan mengkritik Bali Post sebagai kurang professional karena menyebarkan berita bohong. Dia bahkan menuntut pihak Bali Post ke pengadilan perdata atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Tidak pernah ada kasus pemberitaan yang melibatkan dua kekuatan besar terjadi di Bali oleh karena itu menarik diteliti dari segi wacana media massa.

Buku ini bertujuan untuk menganalisis wacana berita “pembubaran desa pakraman” dalam liputan Bali TV pascabentrok Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali. Berikut adalah alasan mengapa wacana pembubaran desa pakraman menarik dan dipilih. Pertama, karena wacana pembubaran desa pakraman dianggap oleh Bali Post mencederai Ajeg Bali. Sebuah gerakan moral yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Bali termasuk desa pakraman. Kedua, karena wacana pembubaran desa pakraman dianggap oleh Mangku Pastika berita yang tidak objektif dan kurang profesional. Tuntutan hukum Gubernur Bali kepada Bali Post yang selama ini jarang terjadi menjadi menarik perhatian khalayak. Karena Bali Post dan Bali TV berada dalam satu grup usaha media dan karena pemirsa Bali TV jangkauannya luas ke desa-desa, maka menarik dikaji bagaimana Bali TV membangun wacana pembubaran desa pakraman.

Buku ini juga mencoba menjawab tiga pertanyaan kunci yakni, **pertama**, bagaimana proses pembentukan wacana pembubaran desa pakraman dalam liputan Bali TV pascabentrok Kemoning-Budaga? **Kedua**, faktor-faktor apa yang mendukung proses pembentukan wacana pembubaran desa pakraman dalam liputan Bali TV pascabentrok Kemoning-Budaga? **Ketiga**,

bagaimana wacana tanding Gubernur Bali Made Mangku Pastika terhadap berita pembubaran desa pakraman?

Selain menjawab ketiga pertanyaan kunci tersebut, secara spesifik buku ini mencoba untuk mengetahui wacana, agenda setting, dan framing pemberitaan Bali TV mengenai wacana pembubaran desa pakraman yang memojokkan Gubernur Bali. Di samping itu, juga untuk mengetahui tanda-tanda visual dalam liputan Bali TV yang digunakan untuk menyampaikan wacana tertentu. Hal inilah yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis.

Harapan penulis, dari buku ini masyarakat memperoleh manfaat dalam bentuk pendidikan literasi media bagi masyarakat khususnya dalam menyimak tayangan-tayangan media massa televisi. Selain itu, buku ini juga bermanfaat dalam memberi inspirasi pada pengelola media untuk menonjolkan profesionalisme dalam pengelolaan media khususnya media televisi.

Agar harapan ini terwujud, dalam buku ini penulis mencoba pendekatan melalui empat konsep yaitu analisis wacana, berita televisi, konflik Kemoning-Budaga, dan wacana tanding. **Analisis Wacana** yang dimaksud adalah kajian terhadap gejala-gejala yang berkembang di masyarakat. Menurut Eriyanto (2005: 7) analisis wacana dapat digunakan untuk mengetahui ideologi di balik ungkapan-ungkapan. Dalam penelitian ini analisis wacana adalah kajian terhadap wacana pembubaran desa pakraman di Bali TV.

Adapun **berita Televisi** yang dimaksud dalam buku ini adalah genre teks yang bersifat faktual dan aktual. Walaupun bersifat faktual menurut (Burton, 2008: 112) genre ini akan tampak lebih fiktif ketika diselidiki secara cermat. Berita media Bali TV memiliki kekuatan lebih pada bahasa visual dan dapat direproduksi sesuai dengan kepentingan media tersebut. Berita TV merupakan hasil setting dan framing sebuah peristiwa

tentang apa yang ingin disampaikan oleh produser. Selain itu, apa yang tidak ingin disampaikan akan diedit sesuai dengan kepentingan sosial, politik, dan ideologi TV tersebut. Proses seperti framing ini memberikan peluang masuknya kepentingan subjektif dalam produksi berita televisi.

Pendekatan konsep **konflik Kemoning-Budaga** yang dimaksud adalah konflik yang meletus pada 17 September 2011 menimbulkan bentrok fisik sehingga sampai jatuh korban luka-luka dan satu meninggal. Konflik Kemoning-Budaga inilah mencuatnya wacana tentang pembubaran desa pakraman yang dikembangkan dalam periode yang cukup panjang oleh Bali TV dan media massa KMB.

Sedangkan **wacana tanding** di sini adalah wacana yang dikeluarkan untuk melawan wacana yang ada. Dalam penelitian ini wacana tanding adalah wacana yang diluncurkan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk melawan wacana pembubaran desa pakraman yang diluncurkan oleh KMB termasuk Bali TV.

Pada buku ini, analisis terhadap kasus konflik kekuasaan media (baca: Kelompok Media Bali Post) dengan kekuasaan politik (baca: Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika) mengacu pada empat landasan teori utama yaitu, teori wacana, agenda setting, framing, dan semiotika yang bersifat eklektik.

Teori wacana adalah suatu upaya untuk pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan untuk membongkar maksud dan makna tertentu (Foucault, 2002: 228). Dalam buku ini teori wacana dipergunakan untuk mengungkapkan maksud dan makna pembentukan wacana pembubaran desa pakraman dalam berita Bali TV pascabentrok Kemoning-Budaga Klungkung Bali oleh Bali TV dan KMB.

Teori agenda setting adalah teori yang melihat proses kerja pers yang lebih penting daripada sekadar penyedia informasi

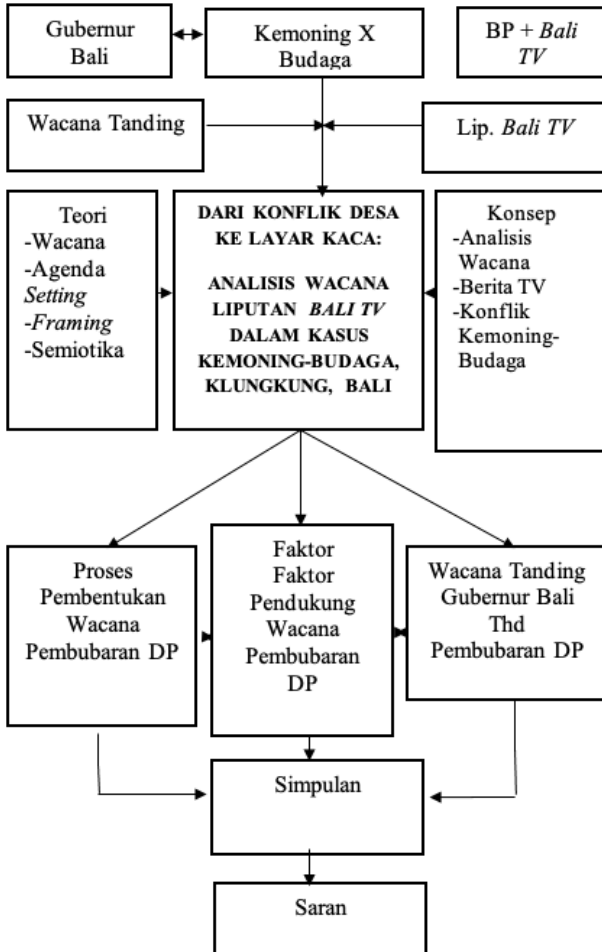
dan opini. Media massa merupakan pusat penentuan kebenaran, dalam bentuk agenda tersendiri, untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa (Tamburaka 2012). Dalam buku ini teori agenda setting dipergunakan untuk menganalisis isu wacana pembubaran desa pakraman yang dijadikan pusat perhatian oleh Bali TV dan KMB.

Teori framing adalah bagaimana peristiwa disajikan oleh media dengan membingkai mana yang dianggap dan perlu ditonjolkan sesuai dengan kepentingan dan kemauan media. Untuk mengetahui realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media (Mulyana, 2002: 3). Menurut Gitlin, frame adalah bagian yang pasti hadir dalam praktik jurnalistik. Dalam buku ini teori framing dipergunakan untuk menganalisis framing peristiwa yang dijadikan berita dalam wacana pembubaran desa pakraman yang disajikan dalam praktik jurnalistik Bali TV dan KMB.

Teori semiotika adalah teori tentang tanda yang digunakan untuk mengkaji segala aspek dan pemaknaan tanda dalam kehidupan manusia (Hoed, 2011: 3). Artinya, apa yang hadir dalam kehidupan dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus diberi makna. Di samping itu teori semiotika adalah ilmu untuk mempelajari segala sesuatu yang digunakan dalam komunikasi, seperti kata, gambar, tanda lalu lintas, bunga, musik, gejala, atau tanda berkenaan dengan ilmu kedokteran, dan banyak lagi yang lainnya (Seiter, 1992: 31). Dalam buku ini teori semiotika digunakan untuk menafsirkan makna-makna teks, ekspresi dan visual dalam wacana pembubaran desa pakraman.

Adapun model penelitian yang digunakan dalam buku ini seperti yang tercantum dalam gambar 1, berikut:

## Model Penelitian



- Keterangan :
- : menyebabkan/menentukan
  - ↔ : pengaruh timbal balik
  - : konflik
  - DP : desa pakraman

## **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan pada buku ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan fenomenologis menggunakan paradigma penelitian kritis, yaitu suatu paradigma berpikir yang melihat pesan sebagai pertarungan kekuasaan, politik, dan ideologi. Fairclough (2009) mengemukakan bahwa wacana termanifestasikan melalui berbagai bentuk khusus penggunaan bahasa dan simbol-simbol lainnya. Oleh karena itu, wacana tak bisa dilihat sebagai cerminan atau perwakilan dari entitas dan hubungan sosial, tetapi merupakan sebuah konstruksi (Saparingga, 2000:1).

Adapun lokasi penelitian pada buku ini adalah di beberapa tempat di Denpasar. Pertama, di Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Daerah Bali. Kedua, di Bali TV dan sejumlah wawancara dilakukan dengan lengkap di beberapa tempat di Denpasar.

Sedangkan data utama penelitian ini berupa wacana pembubaran desa pakraman pemberitaan Bali TV dalam kasus pascakonflik Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali yang berupa dokumentasi dari materi yang pernah ditayangkan. Sumber pendukung lainnya adalah kliping berita cetak dan online. Pengumpulan data juga dilakukan wawancara dengan beberapa pimpinan media cetak di Denpasar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data, keterangan dan pandangan menyangkut wacana pembubaran desa pakraman.

Metode ini diharapkan mampu mendudukan persoalan pada porsi yang tepat dan independen. Sehingga pembaca dapat melihat dan memahami secara jernih duduk persoalan dari kasus media yang merupakan konflik kekuasaan media (baca: Kelompok Media Bali Post) dengan kekuasaan politik (baca: Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika), terkait pemberitaan bentrok antara desa adat/desa pakraman Kemoning dan desa adat/desa pakraman Budaga di Klungkung. Selamat membaca.

# Bab 2

## Potret Pers Di Bali

### **Pers di Bali Di Luar Kelompok Media Bali Post**

Di Bali tercatat dua puluhan lebih media cetak, baik harian, dwi mingguan maupun bulanan, tiga puluhan siaran radio, empat stasiun televisi lokal dan banyak lagi yang belum terdokumentasi. Namun, dalam tempo relatif singkat pula banyak koran yang berguguran atau tidak rutin terbitnya. Media radio dan stasiun televisi berkembang dengan siaran berita dan program yang semakin berkualitas pada era persaingan media yang semakin ketat.

Sejarah pers di Bali secara lengkap sudah ditulis Putra (2008) mulai dari *Shanti Adnyana* (1924) bergerak di bidang sosial dan pendidikan, selanjutnya *Surya Kanta* (1925) dikhususkan untuk kaum *jaba*. Surat kabar yang memasyarakatkan tradisi Bali, *Bali Adnyana* terbit (1925), sampai perkembangan *Bali Post* dan media massa lainnya di Bali era 2000-an. Belakangan terbit beberapa surat kabar, seperti *Radar Bali*, *Warta Bali*, *Bali Tribun*, dan *Pos Bali*. Pembahasan dalam bab ini adalah perkembangan kelompok media *Bali Post* dan media lainnya, yaitu *Radar Bali* dan *Warta Bali*. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan konteks penelitian yang menjadi dasar buku ini.

*Radar Bali* sebagai surat kabar suplemen *Jawa Pos* di Bali, terbit pada 12 Februari 2001. Sebetulnya *Radar Bali* diterbitkan tidak bermaksud untuk membuat penerbitan baru yang terpisah dari induknya. *Radar Bali* hanyalah mengambil sejumlah halaman *Jawa Pos* yang bermateri informasi lokal di wilayah tertentu. Menurut Direktur *Radar Bali*, I Made Rai Warsa dan I Gusti



Putu Ardita Pemimpin Redaksi *Bali Ekspres* tujuan penerbitan suplemen lokal ini untuk menggaet pembaca lokal (wawancara, 20 Desember 2013). Dalam perkembangannya pemberitaan *Radar Bali* cenderung dimanfaatkan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika sebagai wacana tanding dalam menyukseskan program Bali Mandara. Alternatif masyarakat Bali membaca opini yang berseberangan dengan *setting* pemberitaan *Bali Post* terkadang merupakan jawaban atas pemberitaan tersebut. Selain itu, di daerah strategis *Bali Ekspres* menempatkan wartawan khusus untuk liputan investigasi, berkaitan dengan pemberitaan konflik Kemoning-Budaga. *Bali Ekspres* mengungkap dari sisi yang berbeda atau mengapa (*why*) peristiwa tersebut terjadi.

Surat kabar lain yang menjadi arena wacana tanding Made Mangku Pastika adalah *Warta Bali*. Pimpinan Umum/Redaksi surat kabar *Warta Bali*, IGMB Dwikora Putra (wawancara, 9 Desember 2013) menyatakan bahwa surat kabar ini terbit perdana Senin, 3 Januari 2003. *Warta Bali* diterbitkan oleh PT Warta Bali Utama dengan almarhum Drs. Made Sumer, Apt (1948--2011). sebagai direktur utama dan perintis. Pada waktu itu Made Sumer menjabat Wakil Bupati Badung, sedangkan AA Oka Ratmadi, S.H. sebagai Bupati Badung (2000--2005). Setelah Made Sumer almarhum (2013) digantikan oleh I Made Suartana.

Alasan penerbitan *Warta Bali* adalah untuk ikut meramaikan iklim kebebasan pers yang berkembang pada era reformasi. Selain itu, pemilik modal ingin agar di Bali tidak terjadi monopoli opini publik sehingga masyarakat diberikan alternatif wacana yang beragam dalam menyikapi berbagai persoalan kemasyarakatan. Dengan perimbangan opini ini diharapkan terjadi proses pendidikan masyarakat secara lebih demokratis. Namun, *Warta Bali* dalam kebijakan redaksinya merupakan tempat pemilik modal untuk mekampanyekan program-programnya saat menjadi calon Bupati Badung tahun 2006.

Pada awalnya, demikian Dwikora Putra, mantan redaktur *Bali Post*, pihaknya berkeinginan membuat surat kabar lokal. Namun, dalam perkembangannya materi-materi yang bersifat nasional dan internasional tidak dapat dihindari mengingat kebutuhan pembaca yang beragam. Selama tiga bulan pertama sejak terbit, *Warta Bali* beredar dengan ketebalan delapan halaman. Setelah memasuki bulan keempat, *Warta Bali* terbit teratur tiap Senin-Sabtu dengan ketebalan dua belas halaman. Seiring dengan persaingan media yang semakin sengit dan cepat *Warta Bali* terbit Senin sampai Jumat dengan jumlah halaman tetap.

Perkembangan media cetak di Denpasar selanjutnya diwarnai dengan terbitnya *Bali Tribun* pada tahun 2006. *Bali Tribun* diterbitkan oleh PT Nusantara Media Gemilang. Media cetak *Bali Tribun* ini banyak memberitakan politik tingkat lokal. Selain itu, surat kabar ini banyak menjadi wacana tanding Gubernur Mangku Pastika melawan *Bali Post* ketika Made Nariana menjadi pemimpin umum. Setelah ditinggalkan Nariana digantikan oleh Ketut Syahruwardi Abbas dan Djoko Purnomo sebagai wakil pemimpin redaksi/penanggung jawab.

Surat Kabar *Pos Bali* terbit sejak 17 Juni 2013. Surat kabar ini mempunyai moto "kritis, cerdas, dan independen". *Pos Bali* diterbitkan oleh PT Sinar Bali Media Cemerlang. Surat kabar ini bersinergi dengan radio *Gema Merdeka*. Pemimpin umum Made Nariana setelah meninggalkan *Bali Tribun* dan pemimpin redaksi I Wayan Suyadnya. Surat kabar ini belum terbit saat pemberitaan Pembubaran Desa *Pakraman* yang menjadi kasus hukum antara Gubernur Mangku Pastika dan *Bali Post* pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Namun, *Pos Bali* juga dijadikan wacana tanding Gubernur Mangku Pastika, yang secara berkelanjutan menyelenggarakan diskusi terbatas dengan berbagai tokoh menjawab isu-isu yang sedang menjadi wacana di masyarakat. Bahkan, *Pos Bali* diresmikan oleh Gubernur

Mangku Pastika. Hal ini memberikan gambaran posisi surat kabar ini dalam pertarungan wacana di Bali.

Dapat dikatakan bahwa sejarah pers di Bali ditandai semangat untuk mencerdaskan masyarakat, mendorong mereka untuk berpikir dan berbuat maju sesuai dengan keadaan zaman. Artinya, unsur pendidikan jauh lebih menonjol daripada aspek bisnis. Media massa diterbitkan organisasi sosial dengan misi sosial. Pemberitaan dan keredaksiannya pun independen tanpa campur tangan pemerintah dan partai politik sehingga dapat dikatakan pada era ini pers di Bali merupakan pers perjuangan (1925--1945). Keredaksiannya pers di Bali pada era orde lama (1945--1965) dipengaruhi oleh pemerintah dan partai politik, dengan berafiliasinya penerbitan pers ke partai politik tertentu. Beberapa penerbitan bergabung ke Partai Komunis Indonesia (PKI), sedangkan *Bali Post* berafiliasi ke Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

Pers pada era orde baru (1965--1998) diatur dan dibatasi oleh pemerintah. Pers yang berafiliasi pada partai politik, seperti PKI ditutup, dibubarkan, dan dilarang. Era ini merupakan pembatasan kebebasan pers yang pada akhirnya orde baru tumbang pada Mei 1997. Pers pada era reformasi (1998--2004) merupakan era kebebasan pers, dengan tumbuhnya berbagai surat kabar, media penyiaran radio, dan berkembangnya media elektronik televisi nasional dan lokal.

Semangat dan misi sosial, perjuangan dan pendidikan setelah era reformasi mengalami perubahan menjadi pers tergencet di antara kepungan modal dan kuasa (Ibrahim, 2011: 72). Dapat dikatakan bahwa era ini sebagai era kapitalisme pers. Fenomena komersialisasi dalam kehidupan pers telah menjadikan pers sebagai industri "pers industri". Setiap orang dapat menjadi narasumber dan pembentuk opini ketika membayar sejumlah kolom yang dimiliki oleh surat kabar.

Idealnya dalam sebuah surat kabar kewenangan pemilik modal dipisahkan secara tegas dengan kewenangan di bidang manajemen, terutama manajemen pemberitaan. Dengan pemisahan yang tegas ini surat kabar akan memiliki independensi yang kuat dan tidak menjadi subordinat pemilik modal. Bahkan, ada beberapa media, terutama surat kabar dalam pengelolaan pemberitaan langsung dikendalikan oleh pemilik modal. *Bali Post* dipimpin oleh ABG Satria Naradha sebagai penanggung jawab. Posisi ini menyebabkan yang bersangkutan memiliki otoritas amat besar dalam mengendalikan politik pemberitaannya (Artha, 2009: 83).

### **Media Utama KMB *Bali Post* dan *Bali TV***

*Bali Post* merupakan koran terkemuka di Bali yang mulai terbit 16 Agustus 1948. Koran ini berhasil menerbitkan beberapa anak perusahaan media termasuk radio dan televisi. Pemilik *Bali Post* pun membentuk KMB (Kelompok Media *Bali Post*) yang menaungi semua media yang dimiliki.

*Bali Post* terbit pertama dengan nama *Suara Indonesia*. Sejalan dengan perkembangan zaman, nama koran ini berubah beberapa kali. Sejarah mencatat bahwa setelah ketentuan Pokok Pers No. 11/1966 diundangkan mulai 12 Desember 1966, penerbit *Suluh Marhaen* ingin mengubah nama menjadi *Suluh Indonesia*. Akan tetapi karena waktu itu ada surat kabar di Malang dengan nama yang sama, maka tahun 1971 dipilihlah nama baru, yaitu *Harian Bali Post* sampai sekarang.

Sampai dengan tahun 1997 merupakan masa jaya *Bali Post*, yaitu terbit dengan dua puluh empat halaman sehingga diperlukan wartawan dan staf yang lebih banyak. Perekrutan telah dilaksanakan di berbagai posisi redaksi dan non- redaksi *Bali Post* memiliki sumber daya manusia yang cukup melimpah untuk menerbitkan halaman dari dua belas halaman menjadi dua puluh empat halaman. Tanpa diprediksi sebelumnya tejadi

krisis moneter 1998. Saat itulah *Bali Post* mengembangkan diri menjadi KMB, yang membawahi media lainnya, seperti harian *Bisnis Bali*, Tabloid Dwimingguan Pelajar/Remaja *Wiyata Mandala*, harian *Denpost*, surat kabar *Mingguan Tokoh*, *Dwi Minggu Lintang*, Dwimingguan *Bali Travel News*, *Suara NTB*, *Suluh Jakarta*, *Bisnis Jakarta*, *Bisnis Banyuwangi*, dan *Bisnis Surabaya*.

Di bawah kepemimpinan ABG Satria Narada, putra K. Nadha (1944--2001), *Bali Post* berkembang dengan pesat menjadi lembaga pers terbesar dan terlengkap di Bali. *Bali Post* dalam perjalanannya mengembangkan produk-produk baru media massa cetak dengan segmen pasar anak-anak, remaja, wanita/keluarga, wisatawan, pebisnis, warga kota, dan media massa elektronik (radio dan televisi) yang tergabung dalam kelompok media *Bali Post* sejak tahun 1998.

Kelompok Media *Bali Post*, ABG Satria Naradha, meluncurkan kampanye “Ajeg Bali” pada Mei 2002, saat peresmian *Bali TV* ketika Gubernur Bali, I Dewa Made Beratha, yang menurut Nordholt (2010) *Bali TV* mendorong untuk *mengajegkan* adat dan budaya Bali. Sosialisasi konsep *Ajeg Bali* yang digagas ABG Satria Naradha sosialisasinya melalui KMB efektif walaupun masih terjadi pro-kontra di kalangan akademisi dan masyarakat secara umum. Artinya, belum ditemukan formula bagaimana mewujudkan Bali ideal yang dicita-citakan dan konsep ini berhenti pada tataran wacana.

Tataran wacana *Ajeg Bali* terus didengungkan saat acara penyerahan Anugerah Pers K. Nadha Nugraha kepada tokoh-tokoh Bali pilihan *Bali Post*. Slogan *Ajeg Bali*, masuk ke ruang *privat* sampai ruang birokrasi melalui *Bali TV* dengan penandatanganan prasasti *Ajeg Bali* yang pertama, 26 Mei 2003. Pada prasasti tersebut terdapat gambar burung Garuda Bali, dengan tulisan “Dengan Semangat Persatuan Mari Kita Ajegkan Bali” yang ditandatangani empat belas tokoh, di

antaranya Gubernur Bali Dewa Made Beratha, Dirut *Bali TV* ABG Satria Naradha, Ketua DPRD Bali IBP Wesnawa, Wakil Gubernur Bali IGB ALit Putra, dan sejumlah bupati se-Bali.

Begitu juga tokoh-tokoh Bali di Jakarta dan politik nasional, seperti Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarno Putri, Wiranto, Adi Sasono, dan Eros Djarot yang mendapat porsi pemberitaan di halaman satu *Bali Post* dan pada jam *prime time Bali TV*.

Maksud utama ABG Satria Naradha adalah mempersatukan Bali melalui kampanye *Ajeg Bali* (Nordholt, 2010: 73). Menurut ABG Satria Naradha, *Ajeg Bali* bukanlah sebuah konsep yang stagnan, melainkan upaya pembaruan terus-menerus yang dilakukan secara sadar oleh manusia Bali. Tujuannya jelas, yakni untuk menjaga identitas, ruang (wilayah), dan budaya Bali. Upaya ini akan bermuara pada peningkatan kekuatan manusia Bali agar tidak jatuh di bawah penaklukan hegemoni budaya global.<sup>1</sup>

Wawancara yang dilakukan Pamela Allen dan Carmencita Palermo (2004) mencatat beragam respons terkait dengan pertanyaan "Apa itu *Ajeg Bali*", Wayan Sunarta (seniman/penulis) mengatakan konsepnya dilontarkan *Bali Post* yang merasa "berkewajiban" untuk menjaga Bali, tetapi sebenarnya konsep itu telah digunakan untuk kepentingan politis.<sup>2</sup>

Dibalik kampanye tersebut kecendrungan adanya politisasi dan komersialisasi dari konsep *Ajeg Bali* tidak dapat dipungkiri lagi.<sup>3</sup> Menurut majalah SWA edisi 13/XXIII/14-27 Juni 2007 menempatkan ABG Satria Naradha sebagai pengusaha sukses daerah dan menempatkan pemilik media KMB ini sebagai salah

---

1 Lihat: <http://www.balipost.co.id/BALIPOSTCETAK/2004/5/22/b7.htm>, diakses 15 Januari 2014

2 Lihat: [http://www.academia.edu/4854009/Refleksi\\_Ajeg\\_Bali\\_Hari\\_ini](http://www.academia.edu/4854009/Refleksi_Ajeg_Bali_Hari_ini), Diakses 17 Januari 2014

3 Lihat: <https://id-id.facebook.com/notes/buleleng-dogen/melawan-ajeg-bali-antara-eksklusivitas-dan-komersialisasi/438713739547795>, diakses 1/15/2014

satu orang kaya di Bali.<sup>4</sup>

Berikut KMB yang bergerak di bidang pemberitaan ekonomi, yaitu harian *Bisnis Bali*, diterbitkan oleh PT *Bali Post* pertama kali 20 Mei 2003. Secara historis *Bisnis Bali* merupakan surat kabar *Bali Post* edisi pedesaan yang telah terbit pada 20 Mei 1979. Pada 11 Maret 1993 menjadi surat kabar masuk Desa *Prima*. Pada 23 Oktober 1998 harian *Bisnis Bali* menjadi Mingguan *Prima Media Penghobi dan Bisnis*. Selanjutnya pada 20 Mei 1998 menjadi surat kabar *Bisnis Bali* terbit dua kali seminggu. Seiring dengan persaingan kembali surat kabar *Bisnis Bali* yang semula terbit dua kali seminggu kemudian menjadi surat kabar harian, kecuali hari Minggu. *Bisnis Bali* dengan moto "Media Pembuka Peluang Bisnis" dengan target liputan ekonomi dan bisnis kalangan menengah atas dan pemberdayaan ekonomi rakyat menumbuhkan daya saing ekonomi lokal.

Pola liputan *Bisnis Bali* menyajikan informasi dan artikel tentang kegiatan ekonomi, bisnis, dan pendapat para pakar. Fokus liputannya mencakup di Provinsi Bali dan nasional yang saling berimplikasi terhadap isu-isu strategis ekonomi dan bisnis. Pembagian isi laporan mengutamakan laporan peristiwa/ isu aktual dan eksklusif, ruang opini dan prospektif wacana isu aktual. Sebagai pemimpin umumnya yang pernah di *Bisnis Bali* adalah Jesna Winada dan tahun 2014 dipinpin oleh Suja Adnyana, inilah penerus *Bisnis Bali* surat kabar yang tersebar di Bali, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, NTB, dan NTT ini. *Bisnis Bali* tidak turut dalam *setting* pemberitaan berkaitan dengan konflik antara *Bali Post* dan Gubernur Mangku Pastika.

Begitu pula tabloid Dwimingguan Pelajar/Remaja *Wiyata Mandala*, terbit pertama kali 2 Mei 1993 tidak turut dalam pemberitaan konflik tersebut. Segmen pasarnya adalah pelajar seluruh Bali sebagai media informasi pendidikan dan kreativitas.

Sebagai pengelola tabloid ini I Wayan Sueca, wartawan senior

<sup>4</sup> Lihat: <http://www.balebengong.net/sosok/2007/08/23/orang-orang-kaya-di-pulau-dewata.html>, diakses 14 Januari 2014.

*Bali Post* yang berasal dari Kesiman. Target pasar menggaet pasar remaja di Kota Denpasar, tetapi penyebarannya hampir di seluruh Bali. Tabloid ini banyak bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan SMU se-Bali.

*Setting* pemberitaan kriminal harian *DenPost*, banyak mengungkap kasus dan wacana "kegagalan" program Bali Mandara, Gubernur Mangku Pastika, misalnya melalui rubrik opini Kamis, 14 November 2013, acara *Citra Bali* yang disiarkan radio *Global* 96,5 FM Rabu, 13 November 2013, mengangkat tema "Bus Sarbagita Sepi Penumpang". Acara ini memberikan kesempatan interaktif kepada pendengar radio *Global* untuk memberikan masukan apa saja kepada siapa saja, misalnya pemerintah, DPR, instansi dan lain-lain. Selain itu, acara ini dirangkum kemudian diterbitkan di halaman opini *Denpost* esok harinya.

Segmentasi liputannya bidang kriminal dan keamanan harian *DenPost* ini mulai terbit 1 Oktober 1998. Pada mulanya bernama *Harian Denpasar Post* dan diterbitkan oleh Koperasi Tarukan Media Darma/koperasi karyawan Kelompok Media *Bali Post*. Harian ini beralamat di Gedung Pers K Nadha, Jalan Kebo Iwa 63 A Denpasar.

Pada tahun pertama penerbitannya segmen liputan surat kabar *Denpasar Pos* bukanlah kriminal dan keamanan, melainkan politik. Bentuknya pun dalam format tabloid enam belas halaman. Pada hari-hari pertama penerbitannya, berlangsung Kongres I PDI Perjuangan di Sanur yang memilih Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Euforia terhadap figur Megawati sebagai alternatif pimpinan nasional saat itu ditangkap sebagai peluang pasar oleh surat kabar *Denpasar Pos*. Implementasinya, sebagian besar liputan harian ini mengarah ke kegiatan politik PDI Perjuangan dengan sasaran pasar adalah massa PDI Perjuangan.



Pada perjalanannya tahun kedua harian *Denpasar Pos* mengubah bentuknya dari tabloid ke ukuran surat kabar biasa. Ini dilakukan karena seretnya perkembangan oplah yang diduga oleh manajemennya bahwa bentuk tabloid kurang begitu memikat pasar. Pada akhir tahun kedua, perkembangan oplah kurang menggembirakan. Demikian juga perkembangan iklan sebagai tulang punggung pemasukan media pers tak kunjung membaik. Ada dugaan manajemen saat itu bahwa segmen liputan politik kurang mampu mendongkrak iklan dan penjualan surat kabar.

Memasuki tahun ketiga harian *Denpasar Pos* mengubah segmentasi liputannya menjadi surat kabar kriminal dan keamanan. Namanya pun disingkat menjadi *harian DenPost* (ditambah huruf t). Seiring dengan itu, pemasaran eceran harian ini digabung satu paket dengan surat kabar *Bali Post*. Dalam struktur manajemen redaksinya, bertindak sebagai penanggung jawab sekaligus pemimpin umum dan redaksi pernah dijabat Drs. Made Nariana (pernah menjadi pemimpin umum dan redaksi *Bali Tribun* dan sekarang *Pos Bali*).

*DenPost* setelah ditinggalkan Drs. Made Nariana (pensiun) digantikan oleh Suryawan seusai menjabat KPID Bali (2004-2011). Semenjak itu orientasi *DenPost* dari kriminal bertambah lebih pada berita-berita umum atau komunitas dengan segmen pasar yang tetap (wawancara Suryawan, 3 Desember 2013). *DenPost* di bawah penanggung jawab Suryawan sekarang berkembang dengan redaksi di sembilan biro seluruh Bali dan enam orang di Denpasar. Semua karyawan berjumlah delapan puluh orang. Menurut Suryawan, *setting* liputan *DenPost* diarahkan lebih menitik kepada masyarakat bawah, ditambah dari pemberitaan sebelumnya yang lebih banyak liputan kriminal bertujuan memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat.

Surat kabar *Mingguan Tokoh*, disingkat surat kabar *Tokoh*, terbit perdana 9 November 1998. Semula berkantor pusat di

Jalan Palmerah Barat 21 G Jakarta. Penerbitnya PT Tarukan Media Dharma, dicetak di percetakan Gramedia Jakarta. Surat kabar *Tokoh* sempat dicetak dengan teknologi ‘cetak jarak jauh’, yakni dicetak di Gramedia Jakarta dan pada subuh yang sama dicetak di percetakan *Bali Post* di Denpasar untuk dapat beredar di Bali pagi hari.

Surat kabar *Tokoh* dipimpin Widminarko (1998-2012). Ia adalah wartawan harian *Bali Post* sejak 1965, bersama-sama K. Nadha menjabat wakil pemimpin redaksi/wakil penanggung jawab *Bali Post* tahun 1968 hingga tahun 2000. Surat kabar *Tokoh* yang semula beredar setiap Selasa, diubah tiap Minggu, beredar dalam satu paket dengan harian *Bali Post*. Surat kabar *Tokoh* dari tahun 2012 dipimpin oleh Ratna Hidayati (2003—2014). Dengan mengembalikan motonya ‘*Tokoh* bacaan wanita dan keluarga’. *Tokoh* yang menugaskan wartawannya selain mencari berita juga mencari iklan tidak turut dalam wacana konflik *Bali Post*.

Dwimingguan *Bali Travel News* mengambil segmen pariwisata Bali yang banyak mempromosikan hal yang berkaitan dengan arah dan strategi pembangunan pariwisata Pemprov Bali. Perjalanan sejarah BTN di bawah pimpinan Beratha Ashrama dan sekarang Palgunadi dengan program unggulan *Tri Hita Karana Award* (THK Award) untuk hotel-hotel di Bali. Terbit pertama kali 4 Desember 1998. Penerbitnya adalah Koperasi Tarukan Media Dharma.

*Dwi Mingguan Lintang* merupakan sisipan *Bali Post* minggu yang diperuntukkan bagi segmen pasar anak-anak. Sebagai penanggung jawab adalah Mas Ruscita Dewi wartawan *Bali Post*. Tabloid *Lintang* berupaya untuk menjadi teman dan wadah bagi anak-anak khususnya anak-anak Bali untuk mengembangkan potensi mereka. Salah satu cara yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Bali Sakti *Foundation* lewat program Bali Genius membuat Rubrik ‘*Road to Olympiade*’ yang berisikan soal-soal

olimpiade matematika dan sains serta pembahasannya dalam Tabloid *Lintang*. Selanjutnya *Suara NTB* merupakan surat kabar harian dalam KMB yang berita-beritanya memberikan ruang kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengaspirasikan opini, termasuk berita pemerintah dan iklan yang semakin meningkat diraih.

Berkaitan dengan interaksi surat kabar *Bali Post* dan peristiwa politik, penelitian Hamad (2004:153) menjelaskan bahwa pada pemilu 1999, *Bali Post* dinilai turut serta dalam pertarungan ideologi dan politik ketika itu. *Bali Post* dinilai ikut andil dalam kemenangan PDI Perjuangan di Bali pada waktu itu. Dalam bahasa Hamad dikatakan bahwa pemberitaan *Bali Post* cenderung “membela” Megawati Soekarnoputri.

Di bidang media elektronik, Kelompok Media *Bali Post* juga mengelola *Bali TV*, stasiun televisi lokal pertama yang menjangkau wilayah seluruh Bali. Namun, di banyak tempat di Buleleng, Bali Utara masih belum dapat diterima (*blank*). *Bali TV* menjadi titik tolak pengembangan bidang pertelevisian KMB juga mendirikan stasiun-stasiun televisi lokal yang tersebar di Pulau Jawa, dan Pulau Sumatra meliputi *Bandung TV*, *Jogja TV*, *Semarang TV*, *Medan TV*, *Aceh TV*, *Sriwijaya TV*, dan *Surabaya TV*.

Di bidang stasiun radio juga dikembangkan oleh KMB, baik di Bali maupun di luar Bali. Lima radio KMB di Bali bisa dikatakan “menguasai” seluruh wilayah Bali. Radio *Suara Widya Besakih* di Karangasem menguasai Bali bagian timur, *Negara FM* di Negara menguasai Bali bagian barat, *Global FM* di Tabanan dan *Radio Genta* di Denpasar menguasai Bali bagian selatan, dan *Singaraja FM* di Singaraja menguasai Bali bagian utara. Sementara di Bali bagian tengah seperti Gianyar, Bangli, dan Klungkung dikepung lima radio tersebut. Tidak ada lagi ruang yang tak bisa dijangkau daya siar media penyiaran KMB. Di luar Bali KMB mendirikan *Radio Suara Banyuwangi* dan *Lombok FM*.

*Bali TV* merupakan bagian Kelompok Media *Bali Post*. Stasiun televisi pertama yang didirikan menurut Dewi Tika (2002--2014), sebagai upaya untuk mengingatkan manusia Bali akan jati dirinya sebagai orang Bali (wawancara, 3 Desember 2013). *Bali TV* diresmikan pada 26 Mei 2002 *Bali TV* berkomitmen dan berupaya menjadi media pencerahan dengan program-program yang kental dengan konten seni dan budaya Bali. Direktur utamanya ABG. Satria Naradha dengan visi media pencerahan bagi masyarakat Bali sesuai dengan motonya menjadi “Matahari dari Bali”. Program-program berita yang menjadi unggulan adalah *Seputar Bali* tayang setiap hari pk.06.30 WITA dan pk.18.00 WITA. *Bali Channel* (Program Berita berbahasa Inggris tayang setiap Senin–Sabtu pk.07.00). *Lintas Mancanegara* (program berita mancanegara) tayang setiap hari pk.07.30 dan pk.21.00 *direlay* di seluruh TV jaringan KMB. *Seputar Bali Terkini* berita singkat tayang setiap jam, *Orti Bali* tayang Senin-Sabtu Pk.20.00 wita, *Suluh Indonesia* (Berita Nasional) tayang setiap hari pk.21.30 WITA dan *Giliran Anda* program berita interaktif tayang setiap Senin-Sabtu pk.19.00 WITA.

Program berita yang menjadi unggulan *Bali TV* adalah *Seputar Bali* merupakan berita lokal Bali disajikan berbahasa Indonesia menayangkan kegiatan masyarakat baik yang bersifat *advertorial* maupun peristiwa dan lainnya. Selain itu juga mengangkat topik-topik yang sama dengan *Bali Post* atau pengembangan berita-berita di *Bali Post*.

Berkaitan dengan pemberitaan pembubaran desa *pakraman* di *Bali Post* sebelum penayangan pemberitaan tersebut di *Bali TV*, Dewi Tika mekonfirmasi kepada Kepala Biro Humas Provinsi Bali I Ketut Teneng (2011-2014), ingin konfirmasi untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Menurut Dewi Tika Teneng menyatakan “Saya masih pelatihan Diklat tidak bisa menghidupkan *hand phone* (HP). Walaupun tidak dapat konfirmasi, namun pemberitaan pembubaran desa *pakraman*

oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika tetap ditayangkan. Hal ini dinyatakan bahwa *Bali TV* sebagai lembaga penyiaran tetap pada posisi mengkritisi pemerintah. Karakteristik penting *Bali TV* menurut analisis wacana kritis A. van Dijk, Fairclough, dan Wodak (Eriyanto, 2005: 7) mempertimbangkan elemen kekuasaan (*power*), yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apa pun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan.

Teks, percakapan, dan lainnya juga merupakan bentuk praktik ideologi atau pencerminan atau ideologi tertentu. Melalui kelompok dominan media *Bali TV* mekomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang dimiliki menjadi tampak absah dan benar. Menurut van Dijk, fenomena ini disebut sebagai “kesadaran palsu”, yaitu bagaimana kelompok dominan dalam hal ini KMB memanipulasi ideologi kepada kelompok yang tidak dominan melalui kampanye disinformasi dan kontrol media.

## Bab 3

# Pertarungan Bali Post dan Gubernur Made Mangku Pastika

Konflik *Bali Post* dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika terjadi karena Gubernur dikabarkan akan membubarkan desa *pakraman*. Gubernur Bali Made Mangku Pastika tidak dapat menerima pemberitaan itu. *Bali Post* secara cukup panjang memberitakan wacana pembubaran desa *pakraman* sepertinya memojokkan posisi Gubernur. Akhirnya Gubernur Bali Made Mangku Pastika melakukan somasi dan menempuh jalur hukum melalui pengadilan perdata. Di pengadilan tingkat pertama dan kedua (PN dan PT) mengabulkan gugatan Mangku Pastika, sedangkan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi *Bali Post*.

Hubungan *Bali Post* dengan Made Mangku Pastika sebenarnya pada awalnya sebenarnya baik. Hal ini dibuktikan pada 5 Januari 2004 saat menjabat Kapolda Bali Made Mangku Pastika menerima anugerah pers K. Nadha Nugraha dari *Bali Post*. Alasan penganugerahan adalah Mangku Pastika dinilai gigih memburu pelaku bom Bali sehingga membuahkan sanjungan dan pujian. Pada saat itu secara perlahan menata keamanan Bali dan secara bersungguh-sungguh berupaya membebaskan Bali dari penyakit masyarakat, seperti prostitusi, narkoba, dan judi sehingga mengangkat citra polisi secara keseluruhan.

Hubungan baik berlanjut saat Pilkada Bali 2008, yaitu Made Mangku Pastika berpasangan dengan A.A. Puspayoga (Pastiyoga) diusung oleh PDI Perjuangan dengan program Bali Mandaranya. Ketika itu arah *setting* pemberitaan *Bali Post* memberikan dukungan penuh pada pasangan ini dan

dapat dikatakan memberikan andil kemenangannya. Pasangan ‘Pastiyoga’ dalam perjalanan pemerintahannya tidak lagi sejalan dan *setting* pemberitaan *Bali Post* lebih cenderung ‘memihak’ Puspayoga sebagai Wakil Gubernur daripada Made Mangku Pastika. Publik dapat menilai bahwa Made Mangku Pastika sebagai Gubernur Bali tidak lagi mendapat *setting* pemberitaan yang memihak dirinya dari *Bali Post*.

Penilaian *Bali Post* ini menjaga hubungan baik keduanya berjalan hampir empat tahun (2004-2008). Pemberitaan mengenai Made Mangku Pastika hampir tidak ada satu pun yang mengkritik programnya. Sampai akhirnya berangsur-angsur benih konflik antara *Bali Post* dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika terjadi. Benih konflik ini terjadi menjelang perumusan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2009. Hal itu terjadi karena terdapat perbedaan pandangan antara *setting* pemberitaan *Bali Post* dan arah kebijakan Gubernur Bali saat itu. Salah satu hal yang kuat diperdebatkan adalah pengaturan jarak pembangunan industri atau bisnis dengan kawasan suci yang mengadopsi dari *bhisama* (norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat sebagai pedoman pengamalan ajaran agama Hindu).<sup>1</sup> Begitu pula berita *Bali Post* dengan judul “Tim Penegak Bhisama Siap Kawal Perda RTRW Bali”. Perda yang dirancang melalui proses panjang itu berujung pada gugatan ke Mahkamah Agung. Bahkan, sejumlah bupati di Bali meminta agar perda itu direvisi.<sup>2</sup>

Proses perdebatan Perda ini dilanjutkan dengan penarikan patung Made Mangku Pastika, yang dipajang di kantor *Bali TV* ketika memperoleh K. Nadha Nugraha pada tahun 2004. Menurut Dewi Tika (direktur program dan pemberitaan), alasan penarikan patung tersebut disebabkan oleh Made Mangku

---

1 Lihat: [http://regional.kompas.com/read/2011/12/14/22412745/RTRW Bali Masih](http://regional.kompas.com/read/2011/12/14/22412745/RTRW_Bali_Masih) diakses 10-01-2014 diakses 10-01-2014.

2 Lihat: <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=45271> diakses 10-01-2014.

Pastika merasa tidak enak atau terjadi masalah antara *Bali Post* dan Gubernur kalau dibuatkan patung (wawancara, 10 Januari 2014).

Patung tokoh-tokoh pilihan *Bali Post* penerima anugerah pers K. Nadha Nugraha dipajang di *lobby* kantor *Bali TV* termasuk tempat pemajangan patung Made Mangku Pastika sebelum ditarik oleh yang bersangkutan. Semenjak penarikan patung inilah hubungan yang tadinya ‘mesra’ menjadi ‘retak’. Hal ini menyebabkan *setting* pemberitaan *Bali Post* yang dilanjutkan dengan pemberitaan *Bali TV* selalu mengkritisi program-program Made Mangku Pastika (Gambar 4.1).



Gambar 4.1 Tempat pemajangan patung Made Mangku Pastika dan tokoh-tokoh pilihan *Bali Post*, penerima Anugerah Pers K. Nadha Nugraha di *lobby* kantor *Bali TV* (Foto Wirawan, 2013)

Sikap kritis KMB terhadap Gubernur Bali mencerminkan perhatian terhadap kegiatan politik. Di samping itu, juga menyiratkan adanya keterikatan atas dasar suatu kepentingan antara sebuah media dan kekuatan politik yang diberitakannya.



Entah kepentingan ekonomi, politik, ataupun ideologi. Kekuatan media dipengaruhi oleh ideologi politik pemilik modal yang dominan memandang suatu peristiwa.

Peristiwa bentrok fisik antara Desa *Pakraman* Kemoning-Budaga terjadi Sabtu, 17 September 2011, sebagai peristiwa puncak yang dimulai dari benih konflik 13 April 2011. Peristiwa itu bermula dari terjadi riak-riak ketegangan yang muncul antara Kemoning-Budaga, yaitu saling klaim keberadaan *Pura Dalem*, *Pura Prajapati*, dan *Setra*. Bentrok itu berakibat satu orang tewas pada 18 September 2011 (*Bali Post*, *Nusa Bali*, *Radar Bali* 2011).

Keesokan harinya Gubernur Made Mangku Pastika bersama rombongan turun ke tempat terjadinya konflik dengan menjenguk satu orang korban. Sebelum menjenguk para korban Gubernur Bali bertemu dengan Wakil Bupati Tjokorde Gede Agung pejabat pemerintah Kabupaten Klungkung di ruang kantor Bupati Klungkung. Ibarat sebuah jalan di sinilah ujung terjadinya perselisihan yang kemudian harus diselesaikan berdasarkan pengadilan perdata (Wahidin, 2012: 135).

Di kantor Bupati Klungkung tersebut berlangsung pembicaraan Gubernur Bali dengan pejabat Kabupaten Klungkung. Tentu saja ada awak media yang meliput kegiatan Gubernur Bali yang berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut sebaik-baiknya. Intinya adalah bagaimana bentrok itu diambil hikmahnya untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Di dalam kunjungan itu menurut Gubernur Bali, sama sekali dia tidak pernah membicarakan atau melontarkan pemikiran pembubaran desa *pakraman*. Sama sekali tidak logis jika Gubernur Bali melontarkan pernyataan itu. Namun, ihwal konflik Desa Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali menjadi sorotan luas media massa, terutama di surat kabar harian *Bali Post* seusai kunjungan Gubernur Made Mangku Pastika

Minggu 18 September 2011 tersebut. Keesokan harinya Senin Kliwon, 19 September 2011 *Bali Post* memuat berita dengan judul “Pascabentrok Kemoning-Budaga, Gubernur: Bubarkan Saja Desa *Pakraman*”. Berita inilah yang selanjutnya di-*setting* dan di-*framing* menjadi *angle* beberapa hari oleh *Bali Post* dan *Bali TV*. Padahal, menurut Gubernur Bali, tidak pernah mengucapkan kalimat yang muatannya ingin membubarkan desa *pakraman*. Dalam arti diindikasikan melanggar kode etik dan melanggar hukum. Indikasi inilah yang ingin dibuktikan di pengadilan walaupun menempuh jalan panjang dan berliku (Wahidin, 2012: 140-143).

Dari perspektif ini *angle* yang dikembangkan dianggap tidak sesuai dengan fakta bahwa Gubernur Bali tidak pernah melontarkan pernyataan tersebut. Gubernur Bali menuntut *Bali Post* dengan sumber dan pemberitaan kritis, tetapi dinilai menyampaikan informasi tidak sebagaimana mestinya. Tindakan atau *setting* dan *framing* pengembangan opini ini dapat diindikasikan sebagai upaya pembunuhan karakter (*character assassination*). Gubernur tidak menyampaikan hal seperti itu dan ketika dilakukan pembantahan atau klarifikasi ternyata tidak digubris sebagaimana mestinya menurut pengacara Gubernur Bali.

Berita *Bali Post* yang kritis selanjutnya juga dianggap bermasalah, yaitu melakukan ‘pemelintiran’ berita sebagaimana faktanya. Caranya dengan menurunkan berita seolah-olah Gubernur Bali meminta maaf terhadap kata-kata atau pernyataan pembubaran desa *pakraman*. Pada sidang DPRD Provinsi Bali pada Senin 19 September 2011, I Wayan Gunawan, anggota DPRD Provinsi Bali fraksi Golkar mengklarifikasi berita *Bali Post* 19 September 2011. Atas klarifikasi tersebut Gubernur Bali menyampaikan permintaan maaf karena belum membaca berita tersebut. Gubernur menyatakan sama sekali permintaan maaf tidak bersangkutan paut dengan berita pembubaran desa

*pakraman*. Permintaan maaf tersebut karena belum atau tidak membaca berita yang dimaksud, tetapi dalam *framing* yang dilakukan *Bali Post* merupakan media yang kritis.

Tidak hanya berita pemelintiran soal Gubernur minta maaf. Berita tentang pembubaran desa *pakraman* itu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi yang mendukungnya. Pengembangan berita itu dilakukan dengan mewawancarai atau meminta pendapat para tokoh masyarakat Bali tentang pembubaran desa *pakraman*. Ada kesan dengan pengembangan berita yang bermuatan opini yang dianggap tidak tepat oleh Gubernur Bali sebagai upaya menciptakan kondisi yang tidak kondusif. Menurut Gubernur Bali, secara politis arahnya merusak hubungan Gubernur Bali dengan rakyatnya. Hal itu terindikasi dari beberapa peristiwa, di antaranya Gubernur Bali dihubungi oleh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya begitu berita pembubaran desa *pakraman* diturunkan.

Kesan menciptakan kondisi tidak kondusif muncul pada pemberitaan Selasa, 20 September disambung dengan pemberitaan berikutnya sampai Jumat, 24 September 2011 dengan tema sentral pembubaran Desa *Pakraman*. Menurut Gubernur Bali, ada dugaan sebagai upaya secara sistematis untuk ‘menjatuhkan’ kredibilitas Gubernur Bali. Berdasarkan situasi demikian Gubernur Bali beserta jajaran tokoh masyarakat dan agamawan melakukan pertemuan.

Berikut klipings koran harian *Bali Post* yang terbit menjadi *head line* di halaman satu pada Senin Kliwon, 19 September 2011 dengan judul PascabentroK Kemoning-Budaga Gubernur: Bubarkan Saja Desa *Pakraman* (Gambar 4.2).



**SPECIAL PRICE**

**New**

**NEW SPORT CRUISER V3**

### JAJAK PENDAPAT

Apakah Anda bersedia membayar lebih mahal untuk membeli produk yang lebih berkualitas? Ataukah Anda akan membeli produk yang lebih murah, meskipun kualitasnya kurang?



### "Bali Clean and Green" Tak Yakini Terrealisasi

Program "Bali Clean and Green" yang diinisiasi oleh Gubernur Bali I Dewa Loekoe, dinilai belum terrealisasi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan belum adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, terutama pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, anggaran yang dibutuhkan untuk program ini juga masih terbatas.

## Pascabentrok Kemuning-Budaga Gubernur: Bubarkan Saja Desa Pakraman



Gubernur Bali, I Dewa Loekoe, menyatakan bahwa pembubaran desa pakraman adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah kemuning-budaga.

Seperti apa? (Makassar) Gubernur Bali I Dewa Loekoe menyatakan bahwa pembubaran desa pakraman adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah kemuning-budaga.

Loekoe mengatakan bahwa desa pakraman adalah lembaga adat yang sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat Bali saat ini. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar desa pakraman segera dibubarkan dan digantikan oleh lembaga pemerintahan yang lebih modern.

### Korban Sedang Duduk-duduk

Sejumlah korban sedang duduk-duduk menunggu proses hukum yang berlangsung lambat. Mereka merasa frustrasi karena belum ada tindakan tegas dari pihak berwajib.



Korban sedang menunggu proses hukum yang berlangsung lambat.

### Desa Pakraman Mesti Dikuatkan

Desa Pakraman mesti dikuatkan kembali sebagai lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya Bali. Pemerintah harus memberikan dukungan yang memadai untuk memperkuat lembaga ini.

### Korban Luka 44 Orang

Sebanyak 44 orang korban luka-luka dalam insiden yang terjadi di Desa Pakraman. Tim medis sedang melakukan penanganan darurat untuk memastikan semua korban selamat.

### Kasus Bangkar 21 Transaksi Milik Seorang

Dalam kasus bangkar, terdapat 21 transaksi milik seorang individu yang sedang ditelusuri oleh pihak berwajib. Proses hukum masih berlangsung.

### Wagub Bantu KK Miskin

Wakil Gubernur Bali membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan keuangan dan layanan kesehatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Desa Pakraman Benteng Jaga Bali

Desa Pakraman Benteng Jaga Bali memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertarikan wisatawan. Pemerintah harus memperkuat infrastruktur di desa ini.



Wakil Gubernur Bali membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan keuangan dan layanan kesehatan.

Gambar 4.2 Berita Bali Post 19/11/11 Gubernur: Bubarkan Saja Desa Pakraman (Dok: Bali Post, 2011)

Acara pertemuan bersama-sama melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap rekaman *video* dokumentasi pada 21 September 2011 di ruang rapat Praja Sabha Kantor Gubernur Bali. Di samping itu, juga dilakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi. Para saksi menyatakan bahwa Gubernur Bali sebelum, selama dan sesudah kunjungan sehubungan dengan permasalahan bentrok Kemoning-Budaga Gubernur Bali tidak pernah mengeluarkan kata atau pernyataan tentang pembubaran Desa *Pakraman* (Wahidin, 2012: 137).

Berita pembubaran Desa *Pakraman* berkembang di masyarakat Bali direfleksikan dengan keluarnya surat edaran Majelis Utama Desa *Pakraman* Provinsi Bali No. 006/SE/MDP Bali/IX/2011, 22 September 2011, perihal pemberitaan desa *pakraman* yang ditujukan kepada Bendesa Majelis Madya MMDP Kabupaten/Kota se-Bali. Adapun surat edaran dimaksud pada pokoknya menyatakan kepada jajaran MMDP beserta desa di Bali untuk tidak menyampaikan komentar ke media terkait dengan pemberitaan tersebut.

Gubernur Bali merasa terganggu sehingga sesuai dengan sistem pers melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pada 23 September 2011 yang materinya merupakan hak jawab Gubernur Bali. Intinya adalah membantah dan minta agar menghentikan pemberitaan lebih lanjut berkenaan dengan wacana pembubaran Desa *Pakraman*. Akan tetapi *Bali Post* tetap memberitakan dan mewawancarai tokoh masyarakat di Bali.

*Bali Post* beralasan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian somasi Gubernur Bali Made Mangku Pastika kepada Dewan Pers. Namun, pemimpin redaksi *Bali Post*, Nyoman Wiratha, membantah pernyataan bahwa pihaknya telah menyebarkan berita bohong. Pihaknya menyatakan bahwa berita yang disomasi Gubernur Bali merupakan hasil peliputan lapangan saat Gubernur Bali bertemu dengan Wakil Bupati Klungkung

Tjok Gede Agung. Pihaknya meminta maaf kepada Gubernur bila pemberitaan dirasa tidak sesuai dengan penegasan Gubernur Bali. Wirata juga menegaskan “Somasi ini akan kami teruskan ke Dewan Pers untuk mendapatkan penyelesaian”.<sup>3</sup>

Di pihak lain *Bali Post* mengajak publik melakukan persembahyangan dan doa bersama yang melibatkan berbagai komponen masyarakat Bali ke pura *kahyangan jagat* di Bali. Persembahyangan dan doa mereka bertujuan agar kemerdekaan pers tetap tegak.<sup>4</sup> *Bali Post* berpandangan bahwa somasi yang dilakukan oleh Gubernur Bali adalah memberangus kebebasan pers Indonesia. Hal ini menyebabkan *Bali Post* menggalang opini dan dukungan untuk ‘melawan’ tindakan Gubernur Bali.

*Bali Post* melakukan konstruksi berita untuk menyampaikan gagasannya sebagai pihak yang tengah memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan pers. Selain itu, *Bali Post* membentuk relawan kemerdekaan pers dan demokratisasi kemerdekaan pers. Hal itu dilakukan karena beranggapan bahwa somasi Gubernur Bali terhadap demokratisasi pers di Bali kini terancam. Untuk itu, *Bali Post* memberikan kesempatan kepada pengacara, akademisi, politisi, tokoh adat, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk menjadi relawan membela kemerdekaan pers dan demokratisasi.<sup>5</sup>

Tidak hanya mengirimkan somasi, Gubernur Bali juga mengadakan perihalnya kepada Dewan Pers, institusi yang mengurus kinerja jurnalistik yang kemudian melahirkan pernyataan, penilaian, dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers No. 09/PPR-DP/XI/2011 tentang pengaduan Gubernur Bali

---

3 Lihat Disomasi Gubernur, *Bali Post* Bantah Sebarkan Berita Bohong, <http://www.tempo.co/read/news/2011/09/24/179357999/Disomasi-Gubernur-Bali-Post-Bantah-Sebarkan-Berita-Bohong>, diakses 19 April 2014

4 Lihat Gagalnya Pembunuhan Karakter Melalui Bali Post, <http://www.balebengong.net/opini/2012/03/05/gagalnya-pembunuhan-karakter-melalui-bali-post.html>, diakses 19 April 2014

5 Lihat [https://www.facebook.com/balipost/posts/239916299408352?comment\\_id=2238928&offset=0&total\\_comments=1](https://www.facebook.com/balipost/posts/239916299408352?comment_id=2238928&offset=0&total_comments=1), diakses 19 April 2014

Made Mangku Pastika terhadap harian *Bali Post*. Secara tertulis rekomendasi itu berisi Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk menyampaikan hak jawab padahal menurut Gubernur Bali, secara substansif sudah disampaikan kepada *Bali Post*. Gubernur juga memanfaatkan media di luar KMB, seperti *Warta Bali*, *Nusa Bali*, dan *Radar Bali* untuk menyampaikan wacana tanding tentang gagasannya sebagai pihak yang tengah memperjuangkan dan selalu menjunjung tinggi kemerdekaan pers.

Hal ini dapat dibaca pada berita yang dimuat *Warta Bali*, yang berjudul “Gugatannya kepada *Bali Post*, Bicara kebebasan Pers, Siap Dihubungi Wartawan Kapan Saja”. Berita ini menyiratkan bahwa Gubernur Bali adalah pihak yang tidak pernah mengganggu kebebasan pers. Berikut kutipan berita tersebut:

Menurut lelaki asal Buleleng itu, selama ini pihaknya...  
”Saudara-saudara menilai sendiri, apakah pernah saya mengganggu kebebasan pers? Sedikit pun tidak pernah. Saya siap dihubungi wartawan kapan saja,” tegasnya  
(*Warta Bali*, 20 Desember 2011).

Faktanya saat bersengketa dengan *Bali Post*, Gubernur Bali juga tidak memberlakukan media secara *fair*. Dalam beberapa momen klarifikasi, Gubernur Bali tidak mengundang *Bali Post* juga dalam acara sembahyang bersama ke beberapa pura di Bali. Konstruksi berita *Bali Post* menampilkan sosok Ketua Dewan Pers Bagir Manan, dengan judul berita “Bagir Manan Kemerdekaan Pers Makin Terancam” disertai dengan foto dukungan sedang membubuhkan tanda tangan oleh berbagai aktivis kepada *Bali Post*.

Selanjutnya *Bali Post* melakukan konstruksi gagasan tentang kebebasan pers dalam berita-berita yang dipublikasikannya. Berbagai upaya ditempuh bahwa gagasan dirinya sebagai pihak yang memperjuangkan kebebasan pers, seperti menggalang

para pakar, tokoh pendidikan dari berbagai universitas, tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan mahasiswa membuat pernyataan tentang kebebasan pers. Pernyataan para pakar tersebut dikonstruksi sebagai berita dengan wacana pemberangusan kebebasan pers diproduksi secara berkelanjutan untuk meraih persetujuan dari masyarakat. Upaya itu dilakukan *Bali Post* untuk mendapatkan partisipasi dan dukungan masyarakat tentang kebenaran wacana secara intelektual untuk semakin membangkitkan dukungan pembaca terhadap pandangannya. Untuk itu *Bali Post* juga dengan aktif memberikan ruang kepada tokoh-tokoh, baik lokal maupun nasional, untuk memperkuat wacananya. Salah satu pendapat yang mendukung dan ruang wacana diberikan kepada Ketua Dewan Pers Bagir Manan.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyatakan bahwa Gubernur Bali Mangku Pastika menolak ruang hak jawab yang diberikan padanya di harian *Bali Post*. Bahkan, Dewan Pers sempat menawarkan upaya dialog antara Gubernur Bali dan pihak *Bali Post* serta tokoh masyarakat dan agama yang ada di Desa *Pakraman*, di Klungkung Bali. Akan tetapi, Dewan Pers justru mendapat surat dari pengacara Gubernur Bali yang menolak tawaran tersebut.<sup>6</sup>

Selain di-*framing* oleh *Bali Post*, berita tersebut ditayangkan *Bali TV* dalam liputan Seputar Bali 19 September 2011 dengan judul berita “*Pura dalem* masih status *quo*”. Berita ini berkaitan dengan status *quo pura Dalem* yang menayangkan pernyataan Wakil Bupati Klungkung Tjok Gede Agung. Pernyataannya adalah seperti di bawah ini.

---

6 Lihat, Bagir Manan di Mataram, [http://infosketsa.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4867%3Abagir-manan-di-mataram&catid=39%3Apolitik&Itemid=1](http://infosketsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4867%3Abagir-manan-di-mataram&catid=39%3Apolitik&Itemid=1), diakses 19 April 2014



“Sebelum ada keputusan dari Majelis Utama Desa *Pakraman* siapa pun berhak melakukan upacara penguburan dan persembahyangan di *Pura Dalem Setempat*. Apabila ada pihak yang menghalang-halangi berhak melapor ke Majelis Madya Desa *Pakraman* Kabupaten Klungkung, selanjutnya berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat”.

Dalam berita ini tidak terdapat pernyataan Gubernur Bali ihwal pembubaran Desa *Pakraman*, hasil liputan *Bali TV* dengan ilustrasi bentrok Kemoning-Budaga.<sup>7</sup>

Dilanjutkan dengan berita berjudul ”Polda Bali periksa 7 saksi”. Berita ini menyampaikan hasil Polda Bali memeriksa masyarakat yang bertikai dan menetapkan tujuh saksi kedapatan memegang senjata atau termasuk ikut memprovokasi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kombes Polisi Haryadi. Haryadi menegaskan keterangan sementara rumah sakit, bahwa ditemukan luka tembak di kepala belakang. Menurut Haryadi, pasukan melakukan penembakan peringatan termasuk melumpuhkan sasaran kaki dengan pantulan (*lekoset*) menggunakan peluru karet yang sudah sesuai dengan prosedur. Berita ini mereproduksi ilustrasi situasi pertikaian dan ditambahkan dengan pernyataan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali.

Pascabentrok Kemoning-Budaga *Bali TV* men-*setting* menentukan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik kepada wacana pembubaran desa *pakraman*. Selain itu, memfokuskan perhatiannya pemberitaan dengan mewawancarai Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Suidiana dengan judul “Tanpa Desa *Pakraman* Bali Hancur”. Berita ini dikembangkan menjawab pernyataan Gubernur Bali

<sup>7</sup> Lihat : <http://www.youtube.com/watch?v=9Fg4LP8VHnU>, Uploaded on Sep 19, 2011 diakses 16 Januari 2014

berkaitan dengan wacana pembubaran desa *pakraman*, oleh *Bali Post*. Berita ini mengungkap peran desa *pakraman* dalam misinya sebagai benteng mulai zaman Empu Kuturan dan menjadi kekuatan masyarakat Bali dalam memelihara dan mempertahankan tradisi dan budaya. Sudiana menyatakan seperti disampaikan oleh wartawan *Bali TV* bahwa masalah yang menimpa segelintir desa *pakraman* hendaknya tidak serta merta dijadikan acuan untuk menggoyahkan keberadaannya, terlebih sampai membubarkannya. Menurutnya yang terpenting adalah membina desa *pakraman* yang bermasalah, bukan malah membubarkannya.

Dalam berita tersebut Sudiana juga menyatakan data “desa *pakraman* harus tetap berdiri tegak. Kalau kita lihat dari 1.475 kurang lebih desa *pakraman* di Bali bermasalah nol, sekian persennya. Inilah pekerjaan kita bersama agar semua pihak sama-sama memberikan dukungan agar masalah mereka sama-sama bisa dibantu untuk diselesaikan”. Format pemberitaan ilustrasi bentrok kedua desa *pakraman* yang diselengi dengan wawancara, Walaupun terdapat pro kontra dan klarifikasi Gubernur Bali yang menyangkal pernyataan pembubaran desa *pakraman*, *Bali TV* tetap mengembangkan berita tersebut. Dua asumsi yang mendasari *agenda setting* media *Bali TV* adalah masyarakat pers dan media tidak mencerminkan kenyataan; mereka menyaring dan membentuk isu. Kosentrasi media *Bali TV* hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai wacana pembubaran desa *pakraman* yang lebih penting dari pada isu-isu lainnya.

Dilanjutkan berita *Seputar Bali* 20 September 2011 dengan judul “Sikapi dengan arif statement Gubernur”. Berita ini di-*setting* pengembangan pembubaran desa *pakraman* ilustrasi berita dibacakan wartawan *Bali TV*. Dinyatakan bahwa Gubernur Bali Made Mangku Pastika bereaksi keras atas bentrok Kemoning-Budaga, yang menewaskan satu orang dan

puluhan luka-luka. Gubernur pun mengeluarkan statemen agar desa *pakraman* dibubarkan. Pernyataan Gubernur tersebut diungkapkan usai bertemu Wakil Bupati Klungkung Tjok Gede Agung Minggu 18 September 2011. Berbagai tanggapan pun muncul atas pernyataan ini. Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana menilai bahwa pernyataan Gubernur merupakan pembinaan terhadap desa *pakraman* agar berbenah diri dan dapat menghindari diri dari konflik seperti yang terjadi di Budaga-Kemoning. Sudiana juga menyatakan pendapatnya sebagai Ketua PHDI, yaitu “desa *pakraman* masih perlu dipertahankan kemudian dibina lalu diberikan dukungan (*support*)”. Sudiana juga berharap tidak ada friksi terhadap komentar, baik dari pemerintahan maupun para tokoh berkaitan dengan wacana pembubaran desa *pakraman*.

Di pihak lain pernyataan DPRD Bali dari Fraksi Golkar I Wayan Gunawan seperti berikut ini:

“Tapi yang saya sesalkan tidak boleh Gubernur sampai ke tingkatan pernyataan membubarkan walaupun menghadapi kasus yang dilematis seperti yang di Klungkung. Jadi, pernyataan Pak Gubernur urusan ‘pembubaran’ itu sudah diklarifikasi”<sup>8</sup>

Wartawan *Bali TV* melaporkan dalam sidang paripurna DPRD Bali bahwa Gubernur Bali mengklarifikasi pernyataannya dan meminta maaf atas kesimpangsiuran yang terjadi. Gubernur juga akan mengevaluasi desa *pakraman* Budaga-Kemoning pascabentrok ini. *Setting* pemberitaan *Bali TV* yang menghadirkan dua narasumber Ketua PHDI dan ketua Fraksi Golkar diharapkan memperkuat opini atas wacana pembubaran desa *pakraman*. Namun, pernyataan tersebut tidak berhasil diarahkan. Artinya pemberitaannya menyatakan ‘permintaan maaf Gubernur’ walaupun Gubernur menyatakan minta maaf dalam konteks lain, yaitu belum membaca berita tersebut.<sup>9</sup>

8 Lihat: <http://www.youtube.com/watch?v=18w1FmH2M5E>, diakses 1 Januari 2014

9 Lihat: <http://www.youtube.com/watch?v=18w1FmH2M5E>, diakses 1 Januari 2014

Berita *Seputar Bali* yang ditayangkan pada 26 September 2011, menyiarkan berita soal bentrok Kemoning-Budaga yang berjudul “Cok Rat, Mangku Pastika jangan emosi”. Inti berita ini adalah agar Gubernur untuk tidak emosi dalam menghadapi pemberitaan *Bali Post*. *Setting* pemberitaan merupakan pengembangan pembubaran desa *pakraman* oleh *Bali Post*, yang berujung somasi oleh Gubernur Bali kepada *Bali Post* 24 September 2011, dengan tuntutan ganti rugi seratus miliar rupiah. Selain itu, juga permohonan maaf satu halaman selama tujuh hari berturut-turut di *Bali Post* dan koran lainnya di Bali. Berita yang berdurasi tiga menit empat puluh detik merupakan pernyataan Cok Rat Ketua DPD PDIP Bali, Gubernur Bali saat sidang DPRD Bali, I Wayan Gunawan, dan pernyataan disampaikan wartawan tim *Bali TV*. Tanggapan terhadap somasi Gubernur oleh pihak *Bali Post* disampaikan melalui pemimpin redaksi Nyoman Wirata. Menurut Wirata, “*Bali Post* tidak pernah menyampaikan berita bohong sebab berita tersebut hasil peliputan di lapangan saat Gubernur Bali bertemu dengan Wakil Bupati Klungkung Tjok Gede Agung”.

Segala sesuatu yang digunakan dalam komunikasi, termasuk berita *Bali TV*, seperti kata, gambar, warna, objek, suara, peristiwa dan banyak lagi yang lainnya adalah tanda. Setiap tanda memiliki makna dan pesan yang disampaikan lewat *signifier* (lapisan ungkapan). Lewat unsur verbal dan nonverbal (visual) diperoleh dua tingkatan makna, yakni makna *denotatif* yang didapat pada *semiosis* tingkat berikutnya (Tinarbuko, 2010: 15). Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengadukan perhalnya untuk memperoleh keadilan berdasarkan mekanisme pengadilan perdata. Kompensasinya adalah agar pengelola *Bali Post* membayar sejumlah ganti rugi dan permohonan maaf di media lain sebagai sanksi (Wahidin, 2012:141).

Proses sidang di Pengadilan Negeri Denpasar diawali dengan mediasi oleh hakim PN Denpasar antara pengacara Gubernur

dan pengacara *Bali Post*. Dalam mediasi tersebut tiap-tiap pihak tidak menemukan kesepakatan. Artinya *Bali Post* tidak mau memenuhi tuntutan Gubernur. Setelah terjadi ketidaksepakatan maka proses persidangan dimulai dengan masing-masing mendatangkan saksinya. Akhirnya, hakim menjatuhkan vonis Selasa, 17 Juni 2012 memenangkan Gubernur Bali Mangku Pastika

Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar kepada *Bali Post* dalam sidang 17 Juli 2012 memang tidak sesuai dengan tuntutan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. *Bali Post*, selain dihukum membayar ganti rugi uang sebesar Rp 170 juta kepada penggugat (Gubernur Made Mangku Pastika), *Bali Post* juga dihukum berlapis, yaitu wajib memuat pernyataan tertulis pada halaman satu atau halaman muka di sejumlah media cetak di Bali berisi pernyataan bahwa berita pada 19 September 2011 dengan judul “Pascabentrok Kemoning-Budaga, Gubernur: Bubarkan Saja Desa *Pakraman*” merupakan berita tidak benar.

Para tergugat yang terdiri atas Pemimpin Redaksi/ Penanggung jawab *Bali Post* I Nyoman Wirata, wartawan *Bali Post* Biro Klungkung I Ketut Bali Putra Ariawan, dan Direktur Utama PT *Bali Post* ABG Satria Naradha harus meminta maaf kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Majelis Utama Desa *Pakraman*, PHDI, desa *pakraman* se-Bali, dan masyarakat Bali. Frekuensi pemuatannya enam hari penuh berturut-turut. Belum lagi kewajiban untuk memuat pernyataan dan permohonan maaf serta iklan yang sama pada media cetak lain, yaitu halaman satu harian *Nusa Bali*, *Warta Bali*, *Fajar Bali*, *Bali Tribune*, dan *Radar Bali*.<sup>10</sup>

Isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Amser Simanjuntak menolak seluruh eksepsi yang diajukan

<sup>10</sup> Lihat Hukuman Berat Bagi Bali Post <http://www.koridortimur.com/hukuman-berat-bagi-bali-post/>, diakses 19 April 2014

kuasa hukum para tergugat (Pimpinan Redaksi/Penanggung jawab *Bali Post* I Nyoman Wirata, Dirut PT *Bali Post* ABG Satria Naradha, dan wartawan *Bali Post* Biro Klungkung Ketut Bali Putra Ariawan). Dalam kasus perdata gugatan Gubernur Bali kepada *Bali Post* terkait dengan berita *Bali Post* 19 September 2011 dengan judul “Pascabentrok Kemoning-Budaga, Gubernur: Bubarkan Saja Desa *Pakraman*”, merupakan berita yang tidak benar dan telah menyebabkan keresahan masyarakat Bali. Oleh karenanya, majelis mengabulkan sebagian gugatan penggugat Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan menghukum *Bali Post*. Isi putusan menyatakan bahwa tergugat III (Bali Putra Ariawan, pen) membuat dan memberitakan melalui *Bali Post* pada edisi 19 September 2011 dan perbuatannya tergugat I (I Nyoman Wirata, pen) membuat dan memberitakan pada edisi tanggal 20, 21, 22, 23, dan 24 September 2011 yang isinya Gubernur Bali akan membubarkan desa *pakraman* merupakan perbuatan yang melanggar asas praduga tak bersalah. Informasi yang disampaikan tidak tepat, tidak akurat seperti yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.

Tergugat II (ABG Satria Naradha, pen) turut bertanggung jawab terhadap perbuatan tergugat I dan tergugat III bahwa perbuatan para tergugat membuat, membiarkan pemberitaan bahwa Gubernur Bali akan membubarkan desa *pakraman* melalui media *Bali Post* telah meresahkan tokoh-tokoh adat dan agama dan masyarakat Bali. Oleh karena itu pula, para tergugat dihukum secara bersama-sama untuk membuat pernyataan bahwa berita pada 19 September 2011 itu tidak benar. Di samping itu, mohon maaf kepada pihak penggugat (Gubernur Bali Made Mangku Pstika, pen), desa *pakraman* khususnya dan seluruh masyarakat Bali pada umumnya. Permohonan maaf dibuat dalam ukuran satu halaman penuh pada halaman satu atau halaman muka yang merupakan berita utama (*headline*) pada media massa *Bali Post* dengan pemberitaan selama enam hari

berturut-turut. Tidak hanya itu, *Bali Post* juga memuat hal yang sama di harian *Warta Bali* sebanyak dua kali, *Fajar Bali* satu kali, *Nusa Bali* dua kali, *Bali Tribune* satu kali, dan *Radar Bali* satu kali. Hukuman itu berlaku sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Para tergugat juga dihukum untuk menanggung secara tanggung *renteng* uang paksa (*lump sum*) sebesar dua juta rupiah per hari untuk setiap keterlambatan para tergugat melakukan permohonan permintaan maaf. Hakim menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Pihak para tergugat diberikan waktu empat belas hari untuk berpikir apakah menerima, menolak, atau pikir-pikir atas putusan ini.<sup>11</sup>

Setelah putusan ini kuasa hukum *Bali Post* mengajukan banding usai majelis hakim memenangkan gugatan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika atas kliennya dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri, Denpasar, Selasa (17/7/2012). Menurut kuasa hukum *Bali Post*, Suryatin Lijaya, dalam putusan ini terjadi kekeliruan dalam penafsiran fakta dan penerapan hukum. “Salah satu hal yang mendasar sebenarnya di situ, dengan cara yang berputar-putar sedemikian rupa maka persoalan yang menjadi pokok persoalan sebenarnya tidak tersentuh”. Usai sidang Lijaya menyatakan “Bukankah yang menjadikan pokok persoalan apakah benar penggugat pernah mengucapkan kata-kata ‘bubarkan saja desa *pakraman*’, justru yang dipersoalkan adalah permohonan persoalan maaf”.<sup>12</sup>

Keputusan Pengadilan Tinggi Bali 22 Februari 2013 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar 17 Juli 2012, yang menyatakan harian *Bali Post* telah membuat berita ‘bohong’. *Bali Post* pun mengajukan kasasi atas perkara gugatan Gubernur Made Mangku Pastika. Konflik pers pertama di Bali

---

<sup>11</sup> Lihat Gubernur Menangkan Gugatan, <http://www.baliprov.go.id/Gubernur-Menangkan-gugatan>, Rabu, 18 juli 2012, diakses 23 Mei 2013 pukul: 13.00 Wita.

<sup>12</sup> Lihat Pastika Menang, *Bali Post* Ajukan Banding <http://regional.kompas.com/read/2012/07/17/16560323/Pastika.Menang.Bali.Post.Ajukan.Banding> , diakses 19 April 2014

ini membawa pelajaran yang berharga bagi masyarakat pers dan masyarakat secara luas. Profesionalisme pers dan lembaga pers yang independen mutlak diperlukan untuk pembangunan masyarakat yang kritis dan demokratis.<sup>13</sup>

Pengajuan kasasi di Mahkamah Agung (MA) oleh pihak *Bali Post* terhadap Gubernur Bali Made Mangku Pastika (2015) akhirnya dinyatakan diterima. Itu artinya keputusan di tingkat Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar dinyatakan batal.<sup>14</sup> Pengacara *Bali Post* mengimbau apabila terjadi keberatan terhadap pemberitaan pers sebaiknya menempuh jalur hak jawab sesuai dengan undang-undang pers jangan langsung menempuh jalur hukum. Namun, pihak *Bali Post* tidak akan menuntut balik Gubernur Bali dan tetap menjaga hubungan lebih baik lagi.<sup>15</sup>

Di tingkat kasasi keputusan MA tidak berpendapat. Artinya MA tidak mengalahkan salah satu pihak dan dikembalikan kepada kewenangan undang-undang pokok pers karena bukan kewenangan pengadilan. Akan tetapi, yang menjadi perhatian sebenarnya adalah pengadilan tingkat pertama karena tiap-tiap pihak berargumen dan mengeluarkan saksi-saksinya dan hakim menilai bahwa peristiwa tersebut tidak benar terjadi. Pengadilan Negeri Denpasar telah memutuskan sesuai dengan fakta di persidangan dan memenangkan Gubernur Bali (Wawancara Ketut Teneng, 4 Mei 2015).

---

13 Lihat Gubernur Bali Mangku Pastika meladeni niat *Bali Post* yang akan kasasi <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/396313-digugat-Gubernur-bali-post-kalah-lagi-tingkat-banding>, Diakses 19 April 2014

14 Lihat Kasus Gugatan Gubernur, MA Menangkan Bali Post <http://suarabali.com/kasus-gugatan-gubernur-ma-menangkan-bali-post/>

15 Lihat Kasus Gugatan Gubernur, MA Menangkan Bali Post, <http://suarabali.com/kasus-gugatan-gubernur-ma-menangkan-bali-post/> diakses



# Bab 4

## Proses Produksi Wacana Pembubaran Desa Pakraman

Pembentukan wacana pembubaran desa pakraman dalam liputan Bali TV pascabentrok Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali, melalui empat tahap. Keempat tahap tersebut adalah (1) proses produksi berita pascabentrok Kemoning-Budaga, Gubernur: “Bubarkan Saja Desa Pakraman”; (2) proses reproduksi bagaimana Bali TV mereproduksi wacana dari Bali Post dalam teks berita tersebut; (3) proses distribusi tentang bagaimana berita tersebut disiarkan kepada pemirsa; dan (4) proses konsumsi bagaimana berita tersebut dinikmati oleh pemirsa.

Teks berita Bali Post direproduksinya secara berkelanjutan karena berita akan berkembang ceritanya berdasarkan kondisi yang mempengaruhinya dan ideologi dominan dari media tersebut. Bagaimana sebuah berita juga merupakan sebuah narasi. Narasi yang telah mengalami proses di dapur redaksi yang dipengaruhi berbagai kepentingan dan subjektivitas jurnalis, editor, serta kepentingan ideologi dan ekonomi politik media tersebut. Untuk dapat dinikmati oleh pemirsaya berita tersebut di-framing agar menimbulkan hal-hal yang diinginkan oleh pembuat berita tersebut.

Hal itu berarti bahwa berita mengikuti atau memenuhi syarat-syarat sebagai suatu narasi proses konstruksi realitas. Berita merupakan sebuah rangkaian peristiwa pascabentrok Kemoning-Budaga dirangkai dengan kunjungan Gubernur, yang

dilanjutkan dengan berita pada sidang paripurna DPRD Provinsi Bali. Jurnalis tidak mungkin hanya meliput satu peristiwa sebab bila hanya meliput satu peristiwa yang diangkat, maka peristiwa tersebut menjadi tidak bermakna.

Apabila ingin memunculkan sikap konsumerisme maka, ditekankan untuk meningkatkan keinginan dari pada kebutuhan pemirsa. Sikap konsumerisme berawal pada akhir 1950-an dan awal 1960-an dalam perkembangan perdebatan mengenai masyarakat konsumen. Pandangan kritis dipengaruhi oleh ide dan gagasan Marxis melihat masyarakat sebagai suatu sistem kelas. Hanya sesudah runtuhnya feodalisme dan munculnya kapitalisme, sebuah sistem yang didasarkan pada pasar, uang, dan keuntungan, konsumsi menjadi terpisah dari kebutuhan-kebutuhan sederhana dan muncul sebagai suatu aspek penting dari aktivitas manusia (Storey, 1999:144).

Konsumsi media wacana Bali TV didasarkan pada pasar, uang, dan keuntungan sebagai konsekuensi kapitalisme media. Kapitalisme media merupakan segala wacana yang dikonsumsi harus menghasilkan kapital. Seperti wacana pembubaran desa pakraman juga terdapat running teks yang menyertai opini tersebut. Ini menandakan bahwa wacana yang dibangun Bali TV tidak mengorbankan unsur bisnis yang menyertainya. Teori yang digunakan untuk membedah persoalan produksi, distribusi, dan konsumsi wacana pembubaran desa pakraman adalah teori wacana Stuart Hall.

Berkaitan dengan sistem pilihan utama bahasa yang digunakan untuk membangun representasi realitas yang diseleksi, menurut pendapat Chouliaraki (dalam Barker & Galasinski, 2001: 65) dapat dirujuk berikut hal

*“Discourse is closely related to the assumption that discourse is a system of options from which language users make their ‘choices’. The construction of any representation of ‘reality’ is necessarily selective,*

*entailing decisions as to which aspects of that reality to include and how to arrange them”.*

“Diskursus adalah sebuah sistem opsi dari mana pemakai-pemakai bahasa membuat ‘pilihan-pilihan’. Konstruksi dari setiap representasi atau ‘realitas’ bersifat selektif, meliputi keputusan terhadap aspek-aspek realitas yang mana yang masuk dan bagaimana mengaturnya”.

Batasan diskursus yang disampaikan Chouliaraki di atas dengan jelas menggarisbawahi wacana sebagai sistem konstruksi. Hal ini dibuat oleh pihak yang berkepentingan dengan menonjolkan hal-hal yang sesuai dengan tujuannya.

Peristiwa bentrok Kemoning-Budaga menjadi peristiwa yang berbeda dan angle berita yang berbeda dari media yang meliputnya sesuai dengan ideologi dominan yang memengaruhi media tersebut. Ideologi dominan KMB adalah Ajeg Bali yang menonjolkan peran wartawan, jurnalis, redaktur, dan pemilik modal dalam mengontrol sebuah berita. Bahkan, berita tersebut dapat menjadi sebuah alat kepentingan politis oleh ideologi Ajeg Bali yang menguasai media tersebut.

### **Proses Produksi Wacana Pembubaran**

Wacana pembubaran desa pakraman merupakan kata-kata yang dipilih menjadi tema sentral dalam produksi berita di Bali TV. Produksi ini merupakan ciri perubahan industri media yang memiliki kepentingan politik kekuasaan. Perubahan industri media dan terjunnya pemilik media ke dunia politik berdampak terhadap perkembangan media. Orientasi untuk mencari keuntungan berpengaruh kepada independensi dan membuat media menjadi corong untuk kepentingan pemilik. Sejak 1998 pascareformasi industri media telah mengalami perubahan orientasi. Awalnya media didirikan untuk memberikan pencerahan, pendidikan, dan hiburan kepada masyarakat. Akan

tetapi, tahun 1990-an media mengalami komersialisasi dan tumbuh sebagai bisnis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, perkembangan ini mengubah karakter orang-orang yang terlibat dalam industri media dan karakter pengusaha media.

Karakter Bali TV secara kasat mata telah membangun relasi dengan dunia politik dan menjadi alat kepentingan pemiliknya. Kegiatan membangun relasi yang dimaksud menjalin kerja sama untuk mencari keuntungan politik, ekonomi, dan ideologi melalui wacana secara bersama-sama. Misalnya, terkait dengan konflik Bali Post dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Bali TV memproduksi wacana pembubaran desa pakraman. Beritanya di-*setting* dan di-*framing* untuk menghasilkan wacana berita yang tidak berimbang (memiliki kepentingan politis) dan tanpa dikonfirmasi, klarifikasi, atau tidak digubris sebagaimana mestinya. Di samping itu tidak pernah dilakukan *crosscheck* terhadap Gubernur Made Mangku Pastika tentang berita yang penting dan sensitif itu (Wahidin, 2012: 140). Bali TV melakukan konfirmasi sebelum menayangkan berita pembubaran desa pakraman. Namun, melalui Kepala Biro Humas Provinsi Bali tidak didapatkan konfirmasi yang dimaksud karena yang bersangkutan sedang mengikuti pertemuan. Setelah dikonfirmasi Ketut Teneng (Karo Humas Provinsi Bali (2011-2014) menyatakan sebagai berikut.

“Saya pada waktu pemberitaan pembubaran desa pakraman tidak ada di tempat sedang mengikuti pertemuan yang tidak memperbolehkan menghidupkan *handphone*. Seharusnya media sebelum menayangkan berita hendaknya melakukan konfirmasi kepada sumber utama objek sebuah berita. Apabila tidak mendapat konfirmasi kepada sumber utama berita, dapat melakukan konfirmasi pada instansi terkait. Seperti pada peristiwa Kemoning-Budaga minimal melakukan konfirmasi ke

Dinas Kebudayaan atau Kepolisian yang menangani kasus tersebut. Tujuannya untuk memperkuat isi berita yang objektif. Kecuali media tersebut menayangkan opini yang didesain untuk merusak karakter tidak diperlukan konfirmasi. Menanggapi kasasi Bali Post di MA Teneng berpendapat Gubernur bukan kalah tetapi MA tidak berpendapat dan kasus ini dikembalikan menjadi kewenangan undang-undang pers dan bukan kewenangan pengadilan. Teneng menjelaskan bahwa pada tingkat pertamalah menjadi uji material mengenai kebenaran kasus tersebut karena masing-masing mengeluarkan saksi-saksinya. Pengadilan tingkat pertamalah menjadi pembuktian kebenaran peristiwa tersebut karena pada pengadilan pada tingkat selanjutnya hanya analisis” (wawancara, 4 Mei 2015).

Karena tidak dapat menerima berita Bali Post edisi 19 September 2011, tentang pembubaran desa pakraman yang berlanjut pada edisi 20, 21, 22, 23, dan 24 September 2011, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, melalui tim advokat Gubernur Bali mengadukan Bali Post ke Dewan Pers. Selanjutnya, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Nomor 09/PPR-DP/XI/2011 pada 11 November 2011 yang ditandatangani Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., tentang Pengaduan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, Terhadap Harian Bali Post. Dewan Pers telah melakukan pemeriksaan, meminta klarifikasi, dan memediasi kedua belah pihak dalam pertemuan di Bali pada 9 Oktober 2011 dan di Jakarta pada 31 Oktober 2011.

Setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan proses klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Bali Post mempunyai sumber yang kredibel untuk memberitakan bahwa Gubernur Bali memang pernah menyatakan kemungkinan pembubaran atau pencabutan izin desa pakraman yang bertikai apabila

tetap tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk atau saran-saran untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Pernyataan Gubernur Bali tersebut diperkuat pula oleh pernyataan Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gede Agung, yang disampaikan kepada Dewan Pers melalui Surat Pernyataan pada 8 November 2011. Namun, Dewan Pers menilai ada kelemahan dalam berita Bali Post tersebut, yakni tidak melakukan konfirmasi terhadap sumber kunci, dalam hal ini Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, sebagai sebuah kewajiban sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik, sehingga menjadi berita tidak berimbang. Sehubungan dengan hal tersebut dan tanpa mengurangi kelayakan sumber berita yang dimuat, sebagai pers yang bertanggung jawab dan profesional, Bali Post diwajibkan memberi kesempatan hak jawab kepada pengadu, c.q. Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.

Berita-berita yang penting, aktual, dan menarik tersebut ditayangkan kepada pemirsa selengkap dan seakurat mungkin, seperti pada program berita Seputar Bali, tayangan berita Bali TV. Berita Seputar Bali “Klungkung Berdarah, 1 Tewas” merupakan berita perdana peristiwa sehari sebelum Gubernur Made Mangku Pastika mengunjungi korban bentrok Kemoning-Budaga.

Gubernur memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan di Bali Post dalam berita di Youtube dengan judul “Klarifikasi Gubernur Bali Terkait Pembubaran Desa Pakraman” di Gedung DPRD Provinsi Bali pada 19 September 2011 seperti di bawah ini.

“Saya jelaskan saya belum baca berita itu saya minta maaf belum baca yang menyatakan bahwa saya akan membubarkan semua desa pakraman, tidak ada, saya tahu persis bahwa kita bersandar mengandalkan desa pakraman untuk mempertahankan adat, budaya, agama, dan sebagainya. Jadi, tidak mungkin saya akan

membubarkan desa pakraman dan tidak bisa, bukan hanya tidak mungkin, tidak bisa”<sup>1</sup> (19 September 2011).

Proses produksi berita menjadikan wacana dan bahasa sebagai pemaknaan. Dalam proses pembentukan realitas ada dua titik perhatian Stuart Hall, yaitu (a) bahasa sebagaimana dipahami oleh kalangan strukturalis, merupakan sistem penandaan dan (b) realitas dapat ditandakan secara berbeda pada peristiwa yang sama. Stuart Hall mengkritik pandangan kaum pluralis. Kaum pluralis percaya bahwa media memainkan peranan dalam membentuk konsensus dalam masyarakat. Padahal, pembentukan konsensus ini terjadi lewat proses yang rumit, kompleks, dan melibatkan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Sebetulnya media membentuk kesadaran (manufactured content). Akan tetapi, Hall juga merevisi pandangan kritis yang melihat media seolah berperan secara langsung dan media sebagai alat kelompok dominan untuk menguasai kelompok yang tidak dominan (Eriyanto, 2005: 27).

Menurut Ade Armando, pakar media dan komunikasi Universitas Indonesia, dalam diskusi “Membangun Media yang Demokratis” di Jakarta (Kompas Rabu, 12/2/2014), media kini didirikan untuk tujuan komersial. Di samping itu, pemilikinya adalah pengusaha yang mengutamakan keuntungan yang dapat diperoleh dari bisnis ini. Karakter pemilik media juga berubah. Ada di antara mereka yang memiliki kepentingan politik tertentu, yaitu mengincar posisi tertentu di pemerintahan.

Perubahan industri media dan karakter pemilikinya membawa dua dampak. Pertama, pemilik media terlibat dalam proses produksi. Kedua, pelaku media dituntut mencari keuntungan. Dua aspek ini yang kemudian memengaruhi independensi media dan membuat media tertentu menjadi corong kepentingan sang pemilik. Apalagi pemilik media tersebut memiliki agenda politik untuk menjatuhkan atau mengupayakan ‘pembunuhan’

karakter seseorang. Hal ini menyebabkan independensi dan profesionalisme pers terganggu menjadi pers tidak lagi berfungsi sesuai dengan perannya yang diharapkan masyarakat.

Proses produksi dalam redaksional departemen berita meliputi proyeksi liputan yang di dalamnya berisi perencanaan peliputan sesuai dengan cakupan, wilayah, segmen siaran dan pengembangan pemberitaan selanjutnya. Setelah penayangan acara berita selalu dilaksanakan rapat perencanaan sebelum liputan untuk esok harinya atau dikenal dengan proyeksi. Rapat proyeksi wajib diikuti oleh eksekutif produser, produser, pengarah acara/sutradara, reporter, juru kamera, koordinator liputan, dan koordinator daerah. Tahap awal redaksi melakukan evaluasi terhadap tayangan berita yang baru saja berlangsung, menganalisis apakah terjadi kesalahan atau tidak pada siaran berita tersebut. Setelah evaluasi selesai, para anggota rapat memberikan usul/ide/gagasan berdasarkan pengamatan dan fungsi profesi masing-masing tentang bahan liputan untuk keesokan harinya (Fachruddin, 2012: 65).

Proses produksi peristiwa bentrok Kemoning-Budaga yang penting hasil liputan Bali TV telah melalui tahapan proses produksi yang menurut Dewi Tika telah memenuhi standar penyiaran. Namun, Ketut Teneng mengatakan sebaliknya karena belum melakukan konfirmasi kepada sumber utama ataupun sumber lain yang mengetahui peristiwa tersebut (Gambar 5.1).





Gambar 5.1 Klungkung Berdarah, 1 Tewas, Seputar Bali, Bali TV  
Sumber: <http://www.youtube.com/watch?v=TkpnNdjoK18>

Berita Bali TV “Klungkung Berdarah, 1 Tewas”, yang ditayangkan Seputar Bali 18 September 2011, tampil dengan lead berita sebagai berikut<sup>1</sup>.

‘Seorang warga tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam bentrok fisik yang terjadi antara warga Kemoning-Budaga Klungkung, Sabtu lalu. Bentrok terjadi sebagai lanjutan atas saling klaim Pura Dalem, Setra, dan Prajapati sejak beberapa bulan lalu yang belum terselesaikan secara tuntas’.

Visual yang ditayangkan berupa peristiwa bentrok kedua Desa Kemoning-Budaga walaupun dengan peristiwa yang menegangkan jurnalis berhasil menggambarkan konflik yang terjadi. Terjadinya bentrok fisik saling lempar dan polisi berusaha memisahkan kedua kelompok massa Kemoning-Budaga. Jurnalis Bali TV telah berhasil meliput peristiwa yang genting ini merupakan prestasi mengangkat isu hangat,

1 Berita ini diunggah di Youtube Klungkung Berdarah, 1 Tewas, *Seputar Bali, Bali TV*, link <http://www.youtube.com/watch?v=TkpnNdjoK18>, diakses Selasa, 14 Agustus 2014.

momentum, dan fenomena konflik yang menjadi perhatian pemirsa.

Hal yang kurang dari produksi berita ini, jika diteropong dari pendapat Guy Cook (Eriyanto, 2005: 9) adalah teks, konteks, dan wacana menunjukkan produksi pemberitaan “Klungkung Berdarah, 1 Tewas” yang berdurasi 01.45 detik informasi yang disampaikan kurang lengkap memanfaatkan jaringan atau narasumber. Maksudnya, seorang jurnalis dalam membuat berita harus menggunakan rumus akurat (Accuracy) + berimbang (Balance) + Jelas (Clarity) = Layak dipercaya (Credible).

Berita “Klungkung Berdarah, 1 Tewas” telah memenuhi akurat, berimbang, jelas, dan layak dipercaya. Selain itu, memiliki kekuatan news ditunjukkan dengan ilustrasi penanganan bentrok oleh polisi dan visual, narasi yang jelas dan lengkap. Berita ini memang tidak menampilkan wawancara atau pernyataan dari objek berita, seperti polisi, muspida, atau masyarakat yang dapat menjelaskan mengapa peristiwa ini terjadi. Dari segi kecepatan, Bali TV telah berhasil menarik perhatian pemirsa, dengan melengkapi pemberitaan pada hari-hari berikutnya, misalnya “Bubarkan Desa Pakraman Gubernur Minta Maaf”, “Sikapi dengan Arif Pernyataan Gubernur dan Pernyataan Gubernur Dinilai Melanggar Konstitusi”.

Berita tersebut didistribusi kepada khalayak, dengan kekuatam news yang dapat disimak dari narasi berikut ini.

“Ketegangan antara kedua belah pihak sudah terlihat sejak pagi hari menyusul rencana desa Kemoning memasang papan batas *wewengkon*<sup>2</sup>. Sebelumnya batas *wewengkon* adat sudah dipasang pihak Budaga di perempatan utara Rumah Sakit Klungkung. Tak jelas pihak Kemoning memasang papan batas *wewengkon* tersebut Namun dari desas-desus pemasangan rencananya dilakukan di sebelah utara Pura Dalem

---

2 *Wewengkon* adalah bahasa Bali yang berarti wilayah.

yang notabene mendapat penentangan Desa Budaga. Kaitan dengan pemasangan batas wewengkon tersebut sebetulnya telah digelar pertemuan antara perwakilan kedua belah pihak sekitar pukul 10.30 Wita di Mapolres Klungkung. Pertemuan itu melibatkan Muspida, Camat dan Lurah Semarapura Kelod dan Kauh. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan lanjutan atas pertemuan yang digelar Jumat malam untuk membahas hal serupa. Dalam pertemuan diputuskan beberapa langkah di antaranya meminta Budaga menurunkan batas wewengkon yang sudah dipasang sebelumnya sehingga Kemoning membatalkan niat memasang batas wewengkon untuk Kemoning. Namun, atas hal itu Budaga tidak berkenan membuka batas wewengkon yang sudah dipasang bahkan menyatakan akan mempertahankannya hingga titik darah penghabisan. Kemoning bereaksi dengan melanjutkan niat pemasangan batas wewengkon yang sudah direncanakan sebelumnya. Karena tak ada titik temu ketegangan makin tinggi Wakapolres Klungkung Kopol Wayan Gede Suwahu melakukan pendekatan kedua belah pihak, sayang upaya tak berhasil, Tim Liputan Bali TV”.

Berita Seputar Bali Bali TV di atas merupakan narasi yang menjelaskan kronologi peristiwa bentrok dua desa pakraman, yang sebelumnya terjadi akibat pemasangan batas desa (*wewengkon* desa). Berita Bali TV yang cepat disiarkan hanya memvisualisasi peristiwa bentrok tersebut dan usaha pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dalam mengantisipasi peristiwa tersebut. Berita ini menggambarkan peristiwa yang cukup mengejutkan dan memprihatinkan berbagai kalangan masyarakat. Dikatakan memprihatinkan masyarakat karena baru pertama kali bentrok desa yang sampai menimbulkan korban jiwa. Masyarakat luas terkejut sampai peristiwa ini terjadi tanpa dapat diantisipasi oleh pihak terkait, seperti kepolisian, pemerintah, atau PHDI. Lebih jelas dan detail mengapa produksi berita di atas memprihatinkan masyarakat

dan belum berfungsinya lembaga-lembaga adat di Bali untuk mengantisipasi beristiwa konflik desa pakraman dapat dilihat berikut ini (Tabel 5.1).

No	Variabel	Keterangan
1	<b>Judul Berita</b>	Klungkung Berdarah, 1 Tewas
2	<b>Durasi</b>	01.45
3	<b>Ilustrasi</b>	Video bentrok penanganan Polisi
4	<b>Intro (Lead)</b>	Pemasangan batas <i>wewengkon</i>
5	<b>Narasi</b>	Pembaca berita
6	<b>Narasumber</b>	Tidak ada
7	<b>Wacana</b>	Bentrok Kemoning-Budaga
8	<b>Jurnalis</b>	Tim liputa <i>Bali TV</i>

Tabel 5.1 Produksi Berita Seputar Bali Klungkung Berdarah,1 Tewas

Sumber: <http://www.youtube.com/watch?v=TkpnNdjoK18>

Berita di atas menjadi perhatian masyarakat Bali karena peristiwa yang begitu cepat tetapi jurnalis Bali TV dengan jeli dan kepekaan nurani dapat melihat permasalahan sosial yang terjadi. Tampak visual yang ditayangkan dengan narasi telah mendukung kejelasan peristiwa bentrok Kemoning-Budaga. Jurnalis Bali TV telah bekerja dengan cekatan dengan kemampuan dan pengalaman untuk menceritakan sebuah peristiwa yang bernilai berita secara cepat, tepat, dan lengkap hingga mendekati kejadian yang sesungguhnya”. Sense of news setiap jurnalis akan membedakan setiap berita yang dimuatnya. Pemirsa menyaksikan tayangan berita televisi, ketika merasa yang disampaikan tidak sesuai dengan harapannya sebagian besar disebabkan oleh informasi yang disampaikan oleh televisi tidak lengkap.

Setelah memenuhi standar tersebut berita harus juga memperhatikan objektivitas setiap peristiwa. Hal itu penting karena syarat utama media televisi menyampaikan informasinya

adalah untuk kepentingan memperbaiki kehidupan masyarakat. Jangan sampai justru masyarakat menjadi tidak memiliki pengetahuan walaupun media telah memberitakannya. Sebuah karya jurnalistik diproduksi dengan pendekatan jurnalistik, yaitu mengutamakan kecepatan penyampaian, informasi dari sumber pendapat, realita, dan peristiwa. Bentuknya berita aktual yang bersifat time concern, seperti berita monolog (aktual, sedang hangat-hangatnya), siaran langsung (komentar, reportase), dialog berita wawancara atau diskusi (Fachruddin, 2012: 49).

Berita yang objektif, lengkap, dan berimbang berkaitan dengan kepentingan publik. Karya jurnalistik diproduksi dengan pendekatan jurnalistik yang mengutamakan kecepatan penyampaian, mengusung informasi dari sumber pendapat, realita, dan peristiwa. Berita Bali TV tersebut mengusung informasi yang cukup lengkap dengan bahasa visual dan narasi berita. Memang terkadang jurnalis karena persaingan yang semakin cepat dengan televisi lain dan dikejar waktu dari liputan Bali TV sampai disiarkan waktu mepet dalam memproduksi berita. Hal ini dapat dimaklumi dengan dilengkapinya dengan narasi sebagai penjelas visual. Hal ini dapat menjadi alasan bagi seorang jurnalis profesional dalam memproduksi berita yang teliti sesuai dengan kode etik jurnalistik (KEJ) sebelum dikonsumsi publik.

Produksi jurnalistik yang dilakukan wartawan Bali Post dan jurnalis Bali TV dalam memproduksi berita jurnalistik dengan tema sentral pembubaran desa pakraman mempunyai sumber yang kredibel (Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gede Agung) menurut Wirata. Walaupun demikian, sebagai objek berita ucapan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, untuk diberitakan, semestinya dikonfirmasi terhadap sumber kunci. Konfirmasi ini merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diatur di dalam KEJ Selain itu, berita menjadi berimbang.

Ketika pers dianggap tidak *credible* dan tidak berimbang lalu digugat oleh Gubernur Bali. Jalur ini ditempuh ketika dirasakan terjadi ketidakadilan akibat sajian produk informasi pers, khususnya dalam bentuk berita. Gugatan yang ditujukan kepada Bali Post yang selama ini jarang terjadi dilakukan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika di samping untuk memperoleh keadilan juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang jalur hukum yang elegan.

Karya jurnalistik mendapatkan sumber dari permasalahan hangat, mengutamakan kecepatan, dan isi pesan harus faktual. Penyajiannya terikat waktu dan harus mencapai sasaran, yaitu kepercayaan dan kepuasan pemirsa dalam memenuhi rasa ingin tahu. Bentuk improvisasi terbatas karena isi pesan terikat erat pada rambu-rambu dan kode etik jurnalistik, penggunaan bahasa jurnalistik yang beretika, dan isi pesan menyerap realitas faktual (Fachruddin, 2012: 50).

Produksi wacana pembubaran desa pakraman dalam liputan Bali TV ditentukan oleh posisi jurnalis, redaktur media, dan pemilik modal. Posisi jurnalis Bali TV dalam produksi berita wacana pembubaran desa pakraman bersumber dari Bali Post. Redaktur Bali TV juga tergantung dengan pengembangan isu-isu oleh Bali Post. Pemilik modal dengan kekuasaan ekonomi yang dimiliki tidak ada yang berani kritis terhadap keputusannya. Posisi Bali TV tidak pada paradigma pluralis yang percaya bahwa jurnalis dan media merupakan entitas yang otonom (mandiri) dan berita yang dihasilkan haruslah menggambarkan realitas atau fakta yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, posisi pada paradigma kritis mempertanyakan posisi jurnalis dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat, bukan pencerminan dari realitas yang sesungguhnya.

Hal ini diakibatkan oleh jurnalis Bali TV merupakan bagian dari kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat sehingga

dalam pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis pada dasarnya sulit dihindari sikap partisipan. Jurnalis Bali TV memiliki nilai-nilai ideologi Ajeg Bali yang hendak diperjuangkan yang berpengaruh besar dalam isi pemberitaan. Hasil akhirnya tentu saja pemihakan pada kelompok sendiri dan diindikasikan memburukkan kelompok lain.

Departemen produksi atau redaksi berita Bali TV pada umumnya telah memiliki sebuah desain produksi program berita sesuai dengan target audiensi dan target market yang telah dirancang oleh tim kreatif. Fungsi tim kreatif adalah mendesain setiap program televisi berdasarkan trend yang berkembang disesuaikan dengan visi dan misi Bali TV. Idealnya tahapan-tahapan produksi program berita Bali TV harus dijalani secara berurutan. Produksi program berita televisi dilakukan dengan cepat. Bahkan pada kondisi situasi tertentu tahapan satu dengan lainnya dilakukan secara bersama-sama untuk tidak menunggu tahapan satu selesai sebelum dapat memulai tahapan selanjutnya. Produksi berita Bali TV memanfaatkan atau memburu materi audiovisual apa adanya tanpa memanipulasi (karya jurnalistik) untuk gambar yang ditayangkan “as it happen” atau saat sebuah peristiwa sedang berlangsung.

Proses produksi liputan beberapa media terhadap peristiwa yang sama, yaitu pascabentrok Kemoning-Budaga Klungkung, Bali 19 September 2011, menampilkan angle yang berbeda. Bali Post dengan angle berita “Pascabentrok Kemoning-Budaga” Gubernur: Bubarkan Saja Desa Pakraman”. Koran Warta Bali, angle berita head line “Masih Mencekam” dengan judul kecil “Korban Bentrok Kemoning-Budaga, 1 Tewas, 44 Luka Tembak. Warta Bali juga memberitakan liputan kunjungan Gubernur dengan judul “Gubernur: Mestinya Malu Rebutan Pura” tidak ada ungkapan atau pernyataan Gubernur Bali Made Mangku Pastika tentang pembubaran desa pakraman. Akan tetapi, yang ada seperti “Bagaimana bisa memperebutkan Ida Betara,

itu pikiran primitif, tidak sesuai dengan konsep agama”, kata Mangku Pastika. Pada liputan Seputar Bali berita berdurasi 01.57 detik dengan judul berita “Gubernur Kunjungi Korban Bentrok” dalam wawancara Gubernur Bali dengan jurnalis Bali TV sebagai berikut:

“Saya berharap ini diselesaikan segera, saya dengar nanti sore jam dua akan ada rapat yang dilaksanakan di sini dihadiri oleh provinsi dan Majelis Utama Desa Pakraman, mengambil sikap yang tegas terhadap konflik-konflik seperti ini, saya berharap ini juga menjadi pola dalam menyelesaikan berbagai konflik di Bali menyangkut desa pakraman. Mereka berebut pura berebut Setra entah apa yang diperebutkan, saya juga heran itu bagaimana kita bisa memperebutkan Tuhan? Gitu lho. *Bethara*<sup>3</sup> kok diperebutkan itu suatu pemikiran yang menurut saya kembali kepada pemikiran primitif”.

Inti berita ini menurut Gubernur Made Mangku Pastika “Mereka berebut pura berebut setra entah apa yang diperebutkan, saya juga heran itu bagaimana kita bisa memperebutkan Tuhan? Secara cepat Gubernur Bali mengunjungi korban bentrok ke Klungkung di Rumah Sakit Bintang dan Rumah Sakit Umum Klungkung. Selain mengunjungi korban bentrok juga berkoordinasi dengan Pemda Klungkung dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara segera. Gubernur juga mengapresiasi tindakan polisi yang mengambil tindakan secara tegas (Gambar 5.2).

---

3 “Bethara” adalah bahasa Bali yang berarti Tuhan





Gambar 5.2 Gubernur Kunjungi Korban Bentrok Klungkung, Seputar Bali, Bali TV

Sumber: <http://www.youtube.com/watch?v=y66SfFqsFO4>

Berita Bali TV “Gubernur Kunjungi Korban Bentrok” Klungkung yang ditayangkan di Seputar Bali, 19 September 2011 visual yang ditunjukkan adalah Gubernur Bali mengunjungi korban, polisi dan TNI yang masih berjaga di lokasi bentrok (Tabel 5.2).

No	Variabel	Keterangan
1	<b>Judul Berita</b>	Gubernur Kunjungi Korban Bentrok
2	<b>Durasi</b>	01.57 menit
3	<b>Ilustrasi</b>	Suasana RS, Korban bentrok
4	<b>Intro (Lead)</b>	Gubernur Bali meninjau dua RS
5	<b>Narasi</b>	Pembaca berita
6	<b>Narasumber</b>	Gubernur
7	<b>Wacana</b>	Pemikiran primitif
8	<b>Jurnalis</b>	Tim liputa <i>Bali TV</i>

Tabel 5.2 Produksi Berita Seputar Bali

Sumber: <http://www.youtube.com/watch?v=y66SfFqsFO4>

Pernyataan Gubernur di hadapan wartawan media cetak, radio, dan televisi ketika mengunjungi korban konflik Kemoning-Budaga, wacana yang disampaikan adalah dalam teks dan konteks kekecewaan tentang terjadinya konflik desa pakraman. Wacana pascabentrok suasana semakin kondusif kegiatan masyarakat berjalan normal. Namun, tentara nasional Indonesia (TNI) masih berjaga di sejumlah titik, truk *water canon* masih siaga di sepanjang Jalan Flanboyan Semarapura untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan (Tim Liputan Bali TV).

Di media lain, terbit berita bantahan Gubernur Bali pada sidang paripurna DPRD Bali (19 September 2011) terbit pada 20 September 2011 di koran Warta Bali dengan inti dan judul berita adalah “Gubernur Bantah Ingin Bubarkan Desa Pakraman”. Dikatakan keputusan yang diambil dalam rapat muspida, Majelis Utama Desa Prakaman (MUDP) Bali dan Pemprov Bali yang diwakili Dinas Kebudayaan wajib dilaksanakan oleh Desa Budaga dan Desa Kemoning. “Kalau keputusan itu dilanggar, berarti kedua desa itu, yaitu tidak tunduk dengan keputusan desa pakraman di atasnya menjadi kedua desa itu, yaitu Budaga dan Kemoning, bisa dicabut status dan hak-hak desa pakramannya (Warta Bali, 20 September 2011).

Begitu juga koran Radar Bali dan Bali Expres yang disampaikan I Gusti Ngurah Ardita “Liputan waktu kunjungan Gubernur, tidak ada menyinggung pembubaran desa pakraman secara menyeluruh se-Bali, yang ada pembubaran desa pakraman yang bermasalah, yaitu Kemoning-Budaga (wawancara, 20 Desember 2013). Berita itu di-setting dengan angle pembubaran desa pakraman dengan judul berita “Sikapi dengan Arif, Statemen Gubernur” (Gambar 5.3).



Gambar 5.3 Sikapi Dengan Arif, Statemen Gubernur

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=mGZxHxR9OOQ>)

Berita Bali TV yang berjudul “Sikapi dengan Arif, Statemen Gubernur” 21 September 2011, tampil dengan lead sebagai berikut:

“Statemen Gubernur Bali agar desa pakraman dibubarkan mengundang berbagai reaksi ada yang menilai pernyataan kontroversial Gubernur harus disikapi secara arif karena merupakan bentuk pembinaan agar desa pakraman berbenah diri. Namun, tak sedikit yang mengecam karena bukan kewenangan Gubernur membubarkan desa pakraman”.

Inti berita Bali TV ini adalah menjelaskan sikap para tokoh politik, yaitu I Wayan Gunawan dan I Gusti Ngurah Sudiana serta masyarakat terhadap *framing*, berita yang dikonstruksi sebagai wacana pembubaran desa pakraman. Visual yang ditampilkan adalah pernyataan politisi I Wayan Gunawan dan Ketua PHDI I Gusti Ngurah Sudiana dengan ilustrasi peristiwa bentrok yang direproduksi kembali oleh Bali TV (Tabel 5.3).

No	Variabel	Keterangan
1	Judul Berita	Sikapi Dengan Arif, Statemen Gubernur
2	Durasi	02.30 detik
3	Opening	Polisi menangani bentrok
4	Ilustrasi	Bentrok Kemoning-Budaga, Ngurah Sudiana, Wayan Gunawan.
5	Intro ( <i>Lead</i> )	Gubernur Bali berekasi keras...Desa <i>Pakraman</i> Dibubarkan
6	Narasi	Pembaca berita <i>Seputar Bali</i>
7	Narasumber	Ngurah Sudiana dan Wayan Gunawan
8	Wacana	Penghapusan Bhisama
9	Jurnalis	Widana dan Riasa <i>Bali TV</i>

Tabel 5.3 Produksi Berita Seputar Bali

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=mGZxHxR9OOQ>)

Opening (ilustrasi visual video rekaman bentrok) narasi oleh pembaca berita Seputar Bali Bali TV (19/9/2011) seperti di bawah ini.

“Gubernur Bali Mangku Pastika berekasi keras atas bentrok Kemoning-Budaga yang menewaskan satu orang dan puluhan luka-luka. Gubernur pun mengeluarkan pernyataan (statement) agar desa pakraman dibubarkan. Pernyataan Gubernur tersebut diungkapkan usai bertemu wakil Bupati Klungkung Tjok Gede Agung, Minggu 18 September 2011 lalu.

Berita di atas sedikit tidak ada kejelasan sumber karena pernyataan secara langsung Tjok Gede Agung tidak ada dalam gambar berita tersebut. Berbagai tanggapan muncul atas pernyataan ini. Ketua PHDI Bali Ngurah Sudiana menilai pernyataan Gubernur Bali merupakan pembinaan terhadap desa pakraman agar berbenah diri sehingga dapat menghindarkan diri dari konflik yang terjadi di Budaga-Kemoning. Pernyataan

I Gusti Ngurah Sudiana (Ketua PHDI Bali) Seputar Bali (20/9/2011) seperti di bawah ini.

“Kalau kita lihat secara umum komentar beliau (Gubernur) sebenarnya memberikan pembinaan bagaimana ke depan jangan sampai ada desa pakraman bentrok lagi itu maksudnya. Kalau pendapat saya sendiri sebagai Ketua PHDI desa pakraman itu perlu dipertahankan kemudian dibina, Kalau diberikan dukungan (support).

Narasi Bali TV (20/9/2011).

”Sudiana meminta desa pakraman tidak larut dalam pro-kontra menyikapi pernyataan Gubernur. Masyarakat dihimbau lebih selektif menilai pernyataan-pernyataan yang dilontarkan pihak pemerintah. Kembali Pernyataan Sudiana” Kiranya jangan sampai ada friksi-friksi negatif terhadap komentar, baik dari pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat, berkaitan dengan pembubaran desa pakraman. Ini harus diperhatikan dengan baik maksud pembinaan diartikan sebagai maksud ancaman kepada kita semua”.

Narasi oleh Bali TV,(20/9/2011) yaitu “Sementara itu anggota DPRD Bali dari Fraksi Golkar menilai pernyataan Gubernur terlalu responsif bentrok Kemoning-Budaga. Gunawan menyangkan pernyataan Gubernur karena bukan kewenangan Gubernur membubarkan desa pakraman. Ditutup pernyataan I Wayan Gunawan sebagai berikut.

“Tapi yang saya sesalkan Gubernur sampai ke tingkatan pernyataan membubarkan walaupun menghadapi kasus yang dilematis seperti yang di Klungkung. Pernyataan Pak Gubernur tadi urusan pembubaran sudah diklarifikasi”.

Narasi penutup oleh Bali TV “Dalam sidang Paripurna DPRD Bali “Gubernur Bali mengklarifikasi pernyataannya dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali 19 September

2011 dan meminta maaf atas kesimpang-siuran informasi yang terjadi. “Gubernur juga mengatakan akan mengevaluasi desa pakraman Budaga dan Kemoning pascabentrok ini”. Kutipan pernyataan Gubernur mengklarifikasi dan meminta maaf atas kesimpangsiuran informasi bermakna bahwa Gubernur telah menyampaikan pernyataan pembubaran desa pakraman. Hal ini *framing* yang dilakukan oleh Bali TV pada bagian minta maaf. Pernyataan lengkap Gubernur hanya membubarkan desa pakraman yang bermasalah, yaitu Desa Pakraman Kemoning-Budaga bila tidak ada jalan ke luar. Bali TV memproduksi dan mereproduksi berita tersebut dengan membuang bagian-bagian yang tidak mendukung setting dan memberitakan statemen yang mendukung framing pemberitaannya.

KMB juga menggunakan Bali Post dalam memproduksi wacana, seperti dalam berita pada 20 September 2011 dengan judul “Soal Pembubaran Desa Pakraman”, “Pemimpin Formal Jangan Ikut Emosi”, “Gunawan Sesalkan Pernyataan Gubernur”, “Mangku Pastika Minta Maaf”. Dilanjutkan produksi wacana Bali Post pada 21 September 2011 dengan judul “Desa Pakraman Bubar” dan “Desa Pakraman Dibubarkan<sup>4</sup>”. Berikut berita Bali Post yang *dikloning* Bali TV (Gambar 5.4). Berita yang terbit pada koran lain, seperti Warta Bali pada tanggal yang sama dengan angle pascabentrok Kemoning-Budaga dengan berita yang berbeda (Gambar 5.5).

Politik penandaan, yakni bagaimana praktik sosial dalam membentuk makna, mengontrol, dan menentukan makna. Titik perhatian Hall di sini adalah peran media dalam menandakan peristiwa atau realitas dalam pandangan tertentu dan menunjukkan bagaimana kekuasaan ideologi berperan. Ideologi menjadi bidang tempat pertarungan kelompok yang ada di masyarakat. Akan tetapi, posisi demikian juga menunjukkan bahwa ideologi melekat dalam produksi sosial, produksi media,

4 Lihat <http://www.dewanpers.or.id/page/pengaduan/status/?d=21> Status Pengaduan, diakses 9 Mei 2015.

dan sistem budaya (Eriyanto, 2001: 31).

Produksi sosial yang melekat dalam produksi Bali TV terhadap berita yang berhubungan dengan Made Mangku Pastika memiliki perbedaan kepentingan dan didominasi oleh kelompok dominan dalam masyarakat. Terkait dengan hal itu dalam perspektif ini diarahkan untuk membongkar kenyataan yang masing-masing menyatakan kebenarannya sesuai dengan kepentingannya. Perbedaan kepentingan antara Bali Post dan Made Mangku Pastika dapat dipertanyakan dalam paradigma kritis adanya kekuatan-kekuatan yang berbeda dalam masyarakat yang mengontrol proses komunikasi. Pertanyaan yang utama paradigma ini adalah pemilik modal yang mengontrol media. Mengapa pemilik modal mengontrol media. Keuntungan apa yang dapat diambil pemilik modal dengan mengontrol tersebut. Kelompok mana yang tidak dominan (pemirsa) dan menjadi objek pengontrolan. Paradigma ini percaya bahwa media adalah sarana di mana kelompok dominan dapat mengontrol kelompok tidak dominan, bahkan memarginalkan mereka dengan menguasai dan mengontrol media.

Pihak yang mengontrol media dalam hal ini adalah kelompok dominan pemilik media melalui Bali Post dan dilanjutkan dengan pemberitaan Bali TV dalam program berita Seputar Bali. Dewi Tika (pemimpin redaksi) menyatakan bahwa fungsi Bali TV sebagai kontrol dan bisnis mengkritisi, tetapi juga menawarkan solusi (wawancara, 30 September 2013). Sebelum penayangan pemberitaan “Bubarkan Desa Pakraman” di Seputar Bali, Dewi Tika telah menghubungi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Provinsi Bali untuk dapat mempertemukan Bali TV dengan Gubernur. Karena pada saat tersebut tidak dapat dikonfirmasi lebih lanjut, berita tersebut ditayangkan tanpa konfirmasi dari sumber berita, yakni Gubernur Bali. Menurut Ketut Teneng Karo Humas Provinsi Bali (2011--2014), saat itu mengikuti pertemuan dan tidak boleh menghidupkan handphone.

BERIKUT KEMUNG BUDAGA 2011 | Pengantar Pemimpin Partai | Momen di Kemuning-Budaga 2011

## Gunawan Sesalkan Pernyataan Gubernur

### Mangru Passtka Minta Mast

Gunawan Sesalkan pernyataan Gubernur Bali yang mengatakan bahwa masyarakat Bali adalah masyarakat yang konservatif. Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur Bali tidak memahami kondisi riil masyarakat Bali yang sedang mengalami perubahan.



Mangru Passtka

## Sosi Pembruban Dena Pakraman Pemimpin Formal Jangan Ikut Emosional

Perubahan struktur sosial masyarakat Bali yang semakin modern menuntut adanya perubahan pola pikir dan sikap. Pemimpin formal dalam Pakraman harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut dan tidak terjebak dalam emosi.

Perubahan struktur sosial masyarakat Bali yang semakin modern menuntut adanya perubahan pola pikir dan sikap. Pemimpin formal dalam Pakraman harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut dan tidak terjebak dalam emosi.

## Bemok Kemuning-Budaga Ditetapkan Satu Tersangka



Wakil Ketua Panitia Bemok Kemuning-Budaga 2011

Perhelatan Bemok Kemuning-Budaga 2011 telah usai dengan sukses. Salah satu peserta yang dinilai sebagai yang terbaik adalah [Nama].

## Kasus Kemuning-Budaga MUDP Benak Peradilan Adat, Libatkan 30 Hakim

Kasus Bemok Kemuning-Budaga yang melibatkan MUDP (Masyarakat Umum Desa Pakraman) telah memasuki tahap peradilan. Sebanyak 30 hakim akan terlibat dalam proses pengadilan ini.

## Dilarang, Kader PDI-P Masuk Kabinet SBY

PDI-P melarang kader-kadernya untuk bergabung dengan Kabinet SBY. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan yang berkeadilan.



Wakil Ketua PDI-P

## Para Dalem Status Quo

Para Dalem (Pakraman) di Bali masih mempertahankan status quo. Mereka merasa puas dengan kondisi saat ini dan tidak ingin melakukan perubahan besar-besaran.

## Konflik Desa Pakraman Membubarkan atau Memaknai Fungsinya?

Konflik di Desa Pakraman menimbulkan pertanyaan tentang masa depannya. Apakah harus dibubarkan atau justru dimaknai fungsinya?

Salah satu pendapat adalah bahwa Desa Pakraman harus dibubarkan karena tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Opini lain berpendapat bahwa Desa Pakraman masih memiliki fungsi yang penting dalam menjaga kearifan budaya Bali.



Gambar 5.4 Gunawan Sesalkan Pernyataan Gubernur  
Sumber: [http://issuu.com/epeper-kmb/docs/bpo\\_19092011/7](http://issuu.com/epeper-kmb/docs/bpo_19092011/7)





Gambar 5.5 Warta Bali dengan angle bentrok pascabentrok Kemoning-Budaga yang berbeda dengan Bali Post

Bali TV dalam memberitakan pembubaran desa pakraman merupakan sesuatu yang wajar dalam mengkritisi Gubernur Bali. Seluruh proses produksi pemberitaan telah memenuhi prosedur yang benar. Namun, di pihak lain Gubernur Bali merasa bahwa berita tersebut sangat bertentangan dengan peristiwa yang sebenarnya dan merasa sangat dirugikan. Posisi

dan sudut pandang yang bertentangan inilah terjadi antara Bali Post dan Gubernur.

Pemberitaan dipengaruhi oleh posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada akhirnya posisi tersebut memengaruhi berita, bukan pencerminan dari realitas yang sesungguhnya. Pandangan kritis melihat fakta merupakan hasil dari proses pertarungan antara kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang ada dalam masyarakat. Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas karena berita yang terbentuk hanya cerminan dari kepentingan kekuatan dominan di masyarakat. Menurut Stuart Hall, realitas tidaklah secara sederhana dapat dilihat sebagai satu set fakta, tetapi merupakan hasil dari ideologi atau pandangan tertentu. Definisi mengenai realitas ini diproduksi secara terus-menerus melalui praktik bahasa yang dalam hal ini selalu bermakna sebagai pendefinisian secara selektif yang hendak ditampilkan (Eriyanto, 2005: 32-34).

Terkait dengan pendefinisian secara selektif melalui praktik bahasa, Dewi Tika menyatakan bahwa proses produksi berita Bali TV menjunjung tinggi ketepatan dan objektivitas setiap materi berita yang ditayangkan. Realisasi tampilannya adalah kebenaran merupakan tujuan yang tertinggi, objektivitas standar prestasi profesional, judul harus mencerminkan isi, bedakan laporan berita dan pernyataan pendapat, sikap memihak adalah melanggar semangat jurnalisme, plagiarisme adalah dosa yang tidak termaafkan (Fachruddin, 2012: 76).

Berikut pendapat Dewi Tika berkaitan dengan proses produksi berita Bali TV.

“Produksi berita Bali TV dimulai dengan reporter dan kameramen dengan agenda masing-masing, reporter kemudian proses editing gambar sebelum dipilih oleh produser untuk ditayangkan dengan terlebih dahulu menyiapkan rundown” (Wawancara, 30 Desember 2013).

Ketika bahan berita telah berada di news room maka redaktur memiliki tugas mengedit dan memeriksa faktual dan memperbaikinya, menjaga jangan sampai terjadi kontradiksi, menyesuaikan naskah, vokal dengan gaya/gesture yang disepakati. Pengetatan tulisan, menjaga jangan sampai terjadi penghinaan, pelanggaran etika, arti ganda, dan tulisan yang berselera rendah, melengkapi tulisan dengan tipografi yang diperlukan, menulis judul untuk berita yang bersangkutan, melengkapi data, *caption*, dan sebagainya.

Redaktur bertugas sekaligus juga melekat pada dirinya kewajiban yang diemban, yaitu agar materi berita yang ditayangkan peka terhadap pemirsa yang menjadi target audiensinya. Redaktur harus menyadari kondisi demografi dan psikografi audiensi pada coverage area jangkannya, termasuk penggunaan bahasa yang padat, ringkas, dan mudah dipahami. Redaktur juga memiliki kewajiban penting terhadap citra atau image stasiun televisinya secara menyeluruh. Stasiun televisi harus mengedepankan hati nurani, jangan hanya komersialisasi atau secara sadar digunakan sebagai alat kepentingan politik.

Keperentingan politik Bali TV dirasakan secara berkelanjutan pasca berita pembubaran desa pakraman karena peran redaktur sebagai wasit antara reporter dan audiensinya tidak berfungsi. Ketika redaktur melakukan penyuntingan berita terdapat beberapa hal yang dilakukannya, seperti menghilangkan kekusutan berita, membuang kata dan kalimat mubazir, menciptakan judul berita dan *lead*, apa yang didengar (hear copy), bukan apa yang dilihat (see copy), dan mengembangkan jurnalisme damai. Apa yang didengar redaktur Bali TV ketika menerima materi berita dari reporter di lapangan yang menimbulkan kontradiksi di masyarakat perlu dikonfirmasi untuk menghindari suatu masalah pemberitaan.

Produksi wacana pembubaran desa pakraman Bali TV merupakan kelanjutan wacana yang diproduksi Bali Post yang

*setting* dan *framing* pemberitannya telah memenuhi standar peliputan yang profesional. Wacana Bali TV merupakan sumber dari pengembangan wacana Bali Post yang *setting* dan *framing*-nya sama karena memiliki ideologi yang sama, yaitu Ajeg Bali.

Namun, menurut Gubernur, pemberitaan Bali Post dan Bali TV tidak profesional. Beritanya tidak profesional karena tidak objektif dan tanpa konfirmasi dengan Gubernur. Pemberitaan tersebut menurut Gubernur juga memiliki kepentingan politis untuk membunuh karakter.

# Bab 5

## Proses Reproduksi Wacana Pembubaran Desa Pakraman

Proses reproduksi wacana pembubaran desa *pakraman* terus dikembangkan oleh *Bali TV*. Ini sesuai dengan pendapat bahwa perkembangan produk baru dan perkembangan pemahaman terhadap media bersifat memperhatikan diri sendiri (*self regarding*), mempunyai hubungan eksklusif, dan cenderung *mengkloning* (Burton, 2011: 109). Upaya memperhatikan diri sendiri memiliki pengertian bahwa perkembangan, media baik cetak maupun televisi, perkembangannya hanya mementingkan pemberitaannya sendiri. Terkadang menomorduakan akibat dari berita yang ditayangkan kepada pemirsanya. Bahkan, berita-berita tersebut direproduksi secara berulang-ulang. *Kloning* produksi berita *Seputar Bali* di *Bali TV* terhadap pemberitaan pembubaran desa *pakraman* direproduksi dengan cara berulang-ulang dengan menayangkan bentrok Kemoning-Budaga. *Bali TV* merupakan bagian dari kecenderungan ini. Fakta ini adalah *Bali TV* meminjam teks dari media *Bali Post* dapat ditunjukkan dalam pemberitaan pembubaran desa *pakraman* dan pengembangannya bersumber dari *Bali Post*.

Peristiwa pascabentrok merupakan isu hangat dan menjadi prioritas, bahkan dapat mengisi beberapa item dalam suatu program agar tetap menarik disajikan. Pengembangan beberapa hasil liputan *Bali TV* yang bersifat eksklusif terkadang diminta untuk disiarkan oleh pihak lain, seperti pernyataan Dewi Tika saat wawancara.

Sejumlah berita atau gambar (*footage*) produksi *Bali TV* yang bersifat eksklusif diminta oleh stasiun televisi lain. Produksi *Bali TV* yang diminta tersebut untuk disiarkan di stasiun televisi nasional maupun stasiun televisi asing (Wawancara, 30 Desember 2013).

Konteks pernyataan di atas menandakan bahwa produksi berita *Bali TV* direproduksi dan dapat disiarkan secara luas dan tidak terbatas. Berita *Bali TV* “Bubarkan Desa *Pakraman* Gubernur Minta Maaf” yang ditayangkan *Seputar Bali* merupakan berita hasil reproduksi pengembangan berita *headline Bali Post* pada Senin, 19 September 2011 Pascabentrok Kemoning-Budaga, Gubernur “Bubarkan Saja Desa *Pakraman*” (Gambar 5.6).



Gambar 5.6 Bubarkan Desa *Pakraman* Gubernur Minta Maaf

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=XI7XiJknxVU>)

Terkait dengan berita dengan wacana pembubaran desa *pakraman Seputar Bali*, 22 September 2011 *Bali TV* *men-framing* wawancara dengan I Wayan Gunawan mereproduksi dan melegitimasi dominasi opini media dengan *angle*

pembubaran desa *pakraman*. Visual berita ini menayangkan pernyataan I Wayan Gunawan, dengan ilustrasi video bentrok (Tabel 5.4).

No	Variabel	Keterangan
1	Judul Berita	Bubarkan Desa <i>Pakraman</i> Gubernur Minta Maaf
2	Durasi	03.45 menit
3	Ilustrasi	Video bentrok penanganan polisi
4	Intro ( <i>Lead</i> )	Pemasangan batas <i>wewengkon</i>
5	Narasi	Pembaca berita <i>Bali TV</i>
6	Narasumber	Wayan Gunawan DPRD Bali
7	Wacana	Permintaan maaf Gubernur
8	Jurnalis	Tim liputan <i>Bali TV</i>

Tabel 5.4 Produksi Berita *Seputar Bali*

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=XI7XiJknxVU>)

Isu hangat yang menjadi wacana Kelompok Media *Bali Post* adalah pembubaran desa *pakraman* oleh Gubernur Bali. Hal ini dapat dilihat dalam berita *Seputar Bali* dengan judul “Bubarkan Desa *Pakraman* Gubernur Minta Maaf”. Tampak jelas wacana digiring oleh *Bali TV* bahwa Gubernur telah menyatakan pembubaran desa *pakraman* tersebut. Bahasa pembubaran dikembangkan seperti itu karena *Bali TV* ingin membentuk opini bahwa Gubernur berkehendak membubarkan desa *pakraman* sehingga terjadi hubungan yang tidak baik antara Gubernur dan masyarakatnya.

Arah pemberitaan Kelompok Media *Bali Post* mengandung elemen kekuasaan (*power*) media karena setiap wacana yang dimunculkan dalam bentuk percakapan atau wawancara dengan narasumber, seperti Ketua DPD PDI P Cok Ratmadi dan politikus I Wayan Gunawan dalam berita *Seputar Bali* dengan judul “Cok Rat: Mangku Pastika Jangan Emosi”. Narasi *Bali TV* sebelum

pernyataan Gunawan, yaitu Ketua fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Gunawan menyatakan Gubernur telah meminta maaf atas kesimpangsiuran informasi terkait dengan desa *pakraman*. *Framing* wawancara dengan Gunawan adalah “Pernyataan Pak Gubernur tadi urusan pembubaran itu sudah diklarifikasi dan Pak Gubernur minta maaf untuk itu sudah *clear*, sudah *clear*”.

Narasi berita *Seputar Bali* (26/9/2011) di atas sebelum pernyataan Cok Ratmadi sebagai berikut.

“Ketua DPD PDI Bali menyatakan seorang pemimpin harus arif dan sabar menghadapi masalah. Jika pemimpinnnya berkelahi, bagaimana rakyat di bawahnya ini akan menjadi tontonan yang tidak baik di masyarakat terlebih Gubernur di hadapan sidang DPRD telah mengatakan, mengklarifikasi pembubaran desa *pakraman* walau pembubaran yang dimaksud desa yang bermasalah. Apa pun maksudnya kalimat pembubaran desa *pakraman* menurut Cok Rat sangat berbahaya diucapkan oleh seorang Gubernur. Wacana yang digulirkan oleh *Bali Post* adalah peringatan untuk semua pihak sebagai orang tua atau *pengelingsir* mengajak semua introspeksi jangan emosi untuk mencari solusi. Menurutnya tidak ada masalah tanpa jalan keluar asal semua pihak bersabar dan tidak emosi menghadapinya.”<sup>1</sup>

Cok Rat menyatakan dalam berita *Bali TV* (26/9/2011) seperti di bawah ini.

“Ngomongnya lebih hati-hati dan lebih-lebih kita bicara soal somasi, persoalan pemuatan berita itu saya kan dengar langsung di DPRD ditanyakan oleh saudara Gunawan jelas di samping Pak Mangku waktu itu di  
DPRD tidak ada maksud membubarkan semua, tapi yang

---

<sup>1</sup> Lihat Cok Rat Mangku Pastika Jangan Emosi, <http://www.youtube.com/watch?v=msbmRZmqc0>, diakses 14 Agustus 2014



bermasalah ini kalau tidak bersatu...entah apa waktu itu banyak bicaranya, harus dibubarkan. Ini juga tidak boleh sebab desa adat itu sangat otonom”.<sup>2</sup>

*Framing* kedua narasumber di atas dalam berita *Bali TV* dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan penonjolan *setting* dan kekuasaan media. Konsep kekuasaan inilah merupakan salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakatnya. Ketika reproduksi berita ini diperlukan keahlian seorang jurnalis memiliki hubungan dan jaringan yang luas dengan narasumber atau masyarakat. Hubungan yang luas tersebut bertujuan agar dapat memperkaya informasi tentang perkembangan pascakonflik ke arah mana menjadi isi berita selalu baru. Isu hangat dapat dipantau melalui media massa pesaing atau media massa lainnya. Media massa atau lebih tepatnya teks yang dibawa jelas mempunyai pengaruh, tetapi yang paling penting adalah masyarakat yang menjadi *audiens* tidak akan gampang begitu saja ”dicuci pikirannya” oleh teks yang dibawa oleh media massa. Meskipun kemungkinan untuk itu selalu ada, hanya akan terjadi dengan bantuan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan media massa (McQuail, 2000: 486). Selanjutnya, masyarakat, terutama dalam kedudukannya sebagai *audiens* praktik media massa, mempunyai kemampuan sendiri untuk mengonstruksi realitas. Artinya, realita itu pada dasarnya bersifat jamak. Sifat jamak realita tersebut dikemas dalam informasi yang ditanamkan lalu direproduksi dan didistribusi untuk menghasilkan efek yang diinginkan.

*Bali TV* dengan keunggulan program berita *Seputar Bali*, selalu meliput peristiwa-peristiwa dengan agenda *setting*, mekonstruksi, dan menyiarkannya melalui proses *framing* yang sesuai dengan kebijakan redaksi. *Bali TV* menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau

---

2 sda

wacana yang bermakna. Pembuatan berita pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Wacana *Bali TV* yang bermakna bertujuan untuk membentuk opini pemirsa.

Wacana pembubaran desa *pakraman* merupakan satu peristiwa yang dirangkai menjadi cerita yang di-*setting* menuju satu makna pembubaran desa *pakraman* oleh *Bali TV*. Walaupun latar belakang (*back ground*) peristiwa tersebut secara berkelanjutan direproduksi oleh *Bali TV* untuk mempertahankan realitas-realitas isu oleh produsernya. Ketika reproduksi terus berlanjut pemirsa ingin agar tetap terjaga pada satu wacana pembubaran desa *pakraman*. Keberhasilan *Bali TV* mereproduksi berita-beritanya dapat dilihat pada pertarungan dalam konteks wacana suatu pemberitaan.

Setiap pihak mempunyai versi atau pendapat sendiri-sendiri tentang suatu masalah. Mereka mempunyai klaim kebenaran, dasar pembenar dan penjelas mengenai suatu masalah. *Bali Post* dan Gubernur tidak hanya mempunyai versi yang berbeda, tetapi juga berusaha agar versinya yang dianggap paling benar dan lebih menentukan dalam memengaruhi opini publik. Dalam upaya memenangkan penerimaan publik tersebut, tiap-tiap pihak menggunakan kosakata sendiri dan berusaha memaksakan agar kosakata itulah yang diterima oleh publik.

Sebuah berita dapat menjelaskan bagaimana pertarungan wacana direproduksi terjadi dalam kosakata itu dalam contoh pemberitaan *Bali TV* dengan *angle* wacana pembubaran desa *pakraman* selama lima bulan yaitu September-November 2011 dan Februari-April 2012. Dari lima bulan paling tidak ada tiga bidang penting yang diberitakan dengan *framing* pembubaran desa *pakraman* pascabentrok Kemoning-Budaga, berlanjut menjadi berita berikut.

1. Bidang Politik (DPRD)
2. Bidang Hukum (PN, PT, MA)

### 3. Bidang Sosial (Mobilisasi Wacana)

Dalam kasus gugatan kepada *Bali Post* oleh Gubernur tiap-tiap pihak tersebut mempunyai gambaran yang berbeda mengenai kasus ini dari pernyataan wacana pembubaran desa *pakraman*. Perbedaan tersebut secara sederhana dapat digambarkan dalam Tabel 5.5.

No	Peristiwa	Tgl/Th	Versi <i>Bali Post</i>	Versi Mangku Pastika
1	Bentrok Kemoning-Budaga	17/9/11 19/9/11	Bubarkan Desa <i>Pakraman</i>	Tidak ada menyatakan pembubaran desa <i>pakraman</i>
2	Sidang paripurna DPRD Bali	19/0/11	Gubernur Minta Maaf	Minta maaf Gubernur belum membaca berita <i>Bali Post</i>
3	Sidang PN Denpasar	7/7/12	<i>Bali Post</i> Kalah dan Banding	Gubernur Memenangkan Gugatan
4	Pengadilan Tinggi Denpasar	22/2/13	<i>Bali Post</i> Kalah dan Kasasi	Gubernur Memenangkan Gugatan
5	Mahkamah Agung	24/12/14	<i>Bali Post</i> Menang	Gubernur MA tidak berpendapat

Tabel 5.5 Reproduksi *Bali Post-Bali TV*

Pihak mana yang memenangkan pertarungan wacana tersebut? Dari sekian pertarungan wacana terbukti pihak *Bali Post* yang lebih dominan dalam pemberitaan KMB. Dominannya

pihak KMB dengan seringnya memunculkan hasil wawancara dengan narasumber yang bertentangan dengan Gubernur. Di pihak lain Gubernur melakukan wacana tanding menjadi dominan di luar Kelompok Media *Bali Post*. Lewat bahasa tertentu baik *Bali TV* maupun Gubernur, membungkus masalah wacana pembubaran desa *pakraman* kepada pemirsa melalui saluran media masing-masing. Bagaimana KMB dan Gubernur memaknai peristiwa-peristiwa tersebut. Hal ini dapat dilihat Tabel 5.6.

No	Reproduksi Kosakata <i>Bali TV</i>	Reproduksi Kosakata Gubernur
1	pembubaran desa <i>pakraman</i> berita “Bubarkan Desa Pakraman, Gubernur Minta Maaf”	pembubaran desa yang berkonflik saja berita “Berjiwa Ksatria, Gubernur Mestinya Minta Maaf”
2	minta maaf dalam “Sidang DPRD Bali”	belum baca berita dalam “Sidang DPRD Bali”
3	Sumber kredibel, berita “Berjiwa Ksatria, Gubernur Mestinya Minta Maaf”	berita bohong “Klarifikasi Gubernur Bali”

Tabel 5.6 Reproduksi Pertarungan Wacana.

Sebagian besar peristiwa itu merupakan pertarungan wacana pembubaran desa *pakraman*. Pemakaian wacana pembubaran desa *pakraman* dalam memahami persoalan konflik Kemoning-Budaga tidak tepat, tetapi juga merupakan praktik bahasa yang *hiperbolisme*. Dengan istilah itu diasosiasikan seolah-olah terjadi pembubaran seluruh desa *pakraman*.

# Bab 6

## Proses Distribusi Wacana Pembubaran Desa Pakraman

Berita tentang pembubaran desa *pakraman* terus dikembangkan oleh *Bali TV* dan didistribusikan oleh *Bali TV* dengan mewawancarai atau meminta pendapat para tokoh masyarakat Bali selama beberapa hari misalnya I Wayan Gunawan, Cok Ratmadi, I.B. Djelantik, dan Ngurah Suidana. Padahal, menurut Made Mangku Pastika, dia tidak pernah mengucapkan kalimat yang muatannya ingin “membubarkan desa *pakraman*” secara keseluruhan, tetapi yang berkonflik saja. Menurut berita *Bali Post* 19 September 2011, Gubernur Bali pernah menyatakan pembubaran desa *pakraman* tersebut. Akibat distribusi berita yang saling bertentangan dengan *angle* yang dikembangkan masing-masing mengandung opini. Secara politik, menurut Wahidin (2012), hal itu, merupakan sebagai upaya untuk merusak hubungan antara Made Mangku Pastika selaku Gubernur dan rakyatnya. Hal demikian terindikasi dari beberapa peristiwa, di antaranya adalah dihubungkannya Gubernur Made Mangku Pastika dihubungi oleh tokoh adat, agama, dan tokoh masyarakat dari seluruh Bali begitu berita tentang pembubaran desa *pakraman* diturunkan dan terdistribusi kepada pemirsa.

Pada umumnya para tokoh itu merasakan adanya keresahan akibat pemberitaan pengembangan dengan *angle* pembubaran desa *pakraman*. Pemberitaan Senin, 19 September 2011 sampai dengan 24 September 2011 menayangkan berita dengan tema

sentralnya pembubaran desa *pakraman*. Dengan demikian, informasi ini ditanamkan lalu diproduksi dan diedarkan (didistribusikan) menghasilkan efek yang diinginkan. Dalam mereproduksi informasi tersebut KMB tetap pada pendiriannya, yaitu kebenaran pernyataan pembubaran desa *pakraman* walaupun pers alternatif (di luar KMB) dan *Youtube* mempunyai pendapat yang berlawanan. Berita *Bali TV* terdiri atas dua puluh tujuh item seperti di bawah ini (Tabel 5.7).

No	Hari/ Tanggal	Waktu (WITA)	<i>Seputar Bali, Bali TV</i>
Senin, 19-09-11			
1			Klungkung Berdarah, 1 Tewas
2		06.35	Tjok Agung Harap Bentrok Tidak Terulang
3			Cegah Konflik Kedepankan Persaudaraan
4			Pura Dalem masih dalam status quo
5		18.05	Polda Bali periksa 7 Saksi
6			Tanpa Desa <i>Pakraman</i> Bali Hancur
7		19.00	Bubarkan Desa <i>Pakraman</i> bukan wewenang Gubernur
Selasa, 20-09-11			
8			Polisi Tetapkan 1 Tersangka
9		06.30	Konflik Budaga-Kemoning Dibawa ke Peradilan Adat
10		12.30	Pura Dalem masih dalam status quo

11		Bubarkan Desa <i>Pakraman</i> Gubernur Minta Maaf
12		Sikapi dengan Arif Pernyataan Gubernur
13	18.10	Pernyataan Gubernur Dinilai Melanggar Konstitusi
14		Polres Klungkung tetapkan 11 tersangka
Rabu, 21- 09-11		
15		Pernyataan Gubernur Dinilai Melanggar Konstitusi
16		Bubarkan Desa <i>Pakraman</i> Gubernur Minta Maaf
17	06.30	Sikapi dengan Arif Pernyataan Gubernur
18		Polres Klungkung tetapkan 11 tersangka
19	12.30	Bubarkan Desa <i>Pakraman</i> Gubernur Minta Maaf
Kamis, 22-09-11		
20	12.30	Bentuk <i>Pesamuan Bali Dresta</i>
Jumat, 23-09-11		
21	12.30	Desa <i>Pakraman</i> Perkaya Hukum Nasional
Sabtu, 24-09-11		
22	Giliran Anda 19.00	Berjiwa Ksatrya, Gubernur Mestinya Minta Maaf pada Desa <i>Pakraman</i> Pariwisata dan Desa <i>Pakraman</i>

Minggu, 25-9-11		
23	KRIS 22.30	Bentrok Klungkung Desa Budaga dan Kemoning
Senin, 26-9-11		
24	Berita Siang 12.30	Pariwisata juga Tergantung dari Desa <i>Pakraman</i>
25	Seputar Bali Petang	Klungkung Pengabenan korban bentrok Kemoning-Budaga
26	18.05	Cok Rat: Mangku Pastika Jangan Emosi
Selasa, 27-09-11		
27	Berita Siang 12.30 Wita	Cok Rat: Mangku Pastika Jangan Emosi

Tabel 5.7 Pengembangan berita pembubaran desa *pakraman*

*Framing* hasil liputan tentang pembubaran desa *pakraman* untuk menarik perhatian pemirsa menjadi prioritas sebagai konsekuensi industri berita televisi. Hal ini menunjukkan bahwa *Bali TV* telah membuktikan berhasil menarik perhatian masyarakat. Berita yang datar akan sulit mendapat perhatian pemirsa. Sebaliknya kecerdikan mengemas berita akan berdampak besar terhadap citra suatu program berita. Peristiwa bentrok Kemoning-Budaga merupakan akibat faktor tidak tersedianya gambar yang memadai dibandingkan dengan narasi. Bila gambar yang diharapkan tidak ada, berita televisi tidak dapat disiarkan hanya mengandalkan narasi. Televisi berbeda dengan media lain. Maksudnya, media lain dapat mengandalkan wawancara dengan narasumber atau mencari data lain.



Hal inilah menyebabkan ilustrasi bentrok Kemoning-Budaga muncul sebagai ilustrasi yang berulang-ulang. Saat wawancara dengan politikus DPRD Bali I Wayan Gunawan, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Cokorda Ratmadi, dan Ketua PHDI Bali juga muncul ilustrasi yang sama. Berikut pernyataan Cok Ratmadi, Gubernur Made Mangku Pastika, dan Wayan Gunawan dalam berita *Seputar Bali*.

Judul berita “Cok Rat Mangku Pastika Jangan Emosi” dengan durasi 03.45 detik berhasil men-*setting* dan men-*framing* pernyataan Cok Rat yang ‘menyalahkan’ pernyataan Gubernur (Gambar 5.7).



Gambar 5.7 Cok Rat Mangku Pastika Jangan Emosi

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=msbmRZmzqco>)

Berita *Bali TV*, pada 26 September 2011, dengan *lead* sebagai berikut: “Menghadapi masyarakat yang terjebak emosional seperti kasus adat yang terjadi di Kemoning dan Budaga Klungkung. Inti berita ini adalah Ketua DPRD Bali Cok Ratmadi berharap agar Gubernur Bali Mangku Pastika tidak emosi dan berseteru dengan *Bali Post*. Hal itu akan menjadi tontonan yang tidak baik bagi masyarakat. Ratmadi mengajak semua pihak untuk introspeksi diri”.

Data berita “Cok Rat Mangku Pastika Jangan Emosi” seperti di bawah ini (Tabel 5.8).

No	Variabel	Keterangan
1	<b>Judul Berita</b>	Cok Rat Mangku Pastika Jangan Emosi
2	<b>Durasi</b>	03.45 menit
3	<b>Ilustrasi</b>	Video bentrok penanganan oleh polisi
4	<b>Intro (Lead)</b>	Pemasangan batas <i>wewengkon</i>
5	<b>Narasi</b>	Pembaca berita <i>Seputar Bali</i>
6	<b>Pernyataan</b>	Wayan Gunawan DPRD Bali
7	<b>Wacana</b>	Permintaan maaf Gubernur
8	<b>Jurnalis</b>	Tim liputan <i>Bali TV</i>

Tabel 5.8 Distribusi Berita *Seputar Bali*

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=msbmRZmzqco>)

Visual berita ini adalah *opening* Cok Ratmadi dengan durasi 00.13 detik dengan makna sebagai tokoh *pengelingsir* puri dan Ketua DPD PDI P yang memiliki pengaruh politik di masyarakat. Sumber utama berita *Seputar Bali* sekaligus *lead* berita menyampaikan “Cok Ratmadi yang juga Ketua DPD PDIP Bali menyatakan seorang pemimpin harus arif dan sabar menghadapi masalah. Jika pemimpinnya berkelahi, bagaimana rakyat di bawahnya. Hal ini akan menjadi tontonan yang tidak baik di mata masyarakat terlebih Gubernur di hadapan sidang DPRD telah menegaskan dan mengklarifikasi pembubaran desa *pakraman* walaupun pembubaran yang dimaksud di kedua desa yang bermasalah itu”. Berita dengan wacana *lead* seperti ini menunjukkan kekuasaan dalam hubungannya dengan wacana, penting apa yang disebut sebagai kontrol. *Bali TV* melalui Cok Ratmadi sebagai Ketua DPD PDI P dan Ketua DPRD Provinsi mengontrol Gubernur lewat wacana. Kontrol di sini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik yang langsung, tetapi kontrol secara mental atau psikis. Kontrol di sini hanya dapat dilakukan

oleh kelompok dominan. Mengapa hanya dapat dilakukan oleh kelompok dominan? Menurut van Dijk, mereka hal itu terjadi karena lebih mempunyai akses kekuasaan media.

Pernyataan Gubernur dalam rekaman pada sidang DPRD Bali, adalah sebagai berikut:

”Apabila kedua belah pihak yang berkonflik ini terus-menerus tidak mematuhi tata krama suatu desa *pakraman* yang di atasnya ada Lembaga Majelis *Alit*, *Madya* dan *Utama* desa *pakraman* dan sikap pemerintah tidak juga diindahkan, maka apa boleh buat perlu dievaluasi kembali keberadaan dua desa *pakraman* tersebut, itu kata-kata saya. Kalau perlu desa *pakraman* itu...,yang itu dibubarkan”.<sup>1</sup>

Bentuk kontrol terhadap wacana tersebut dapat bermacam-macam. Diantaranya, berupa kontrol atas konteks, yang secara mudah dapat dilihat dari siapakah yang boleh dan harus berbicara, sementara siapa pula yang hanya dapat mendengar dan mengiyakan. Dalam pemberitaan ini ditemukan redaktur atau pemilik media yang posisinya kuat menentukan sumber Cok Ratmadi, Wayan Gunawan bagian yang mendukung wacana media yang harus diliput dan sumber mana atau bagian mana yang tidak perlu, bahkan dilarang diberitakan.

Bagian pernyataan I Wayan Gunawan yang ditonjolkan dalam pemberitaan ini “Gubernur telah meminta maaf atas kesimpangsiuran informasi terkait pembubaran desa *pakraman*”, Selain konteks kontrol tersebut juga diwujudkan dalam bentuk mengontrol struktur wacana. Seseorang yang mempunyai lebih besar kekuasaan tidak hanya menentukan bagian mana yang perlu ditampilkan dan mana yang tidak, tetapi juga bagaimana harus ditampilkan. Dapat dilihat terdapat penonjolan pemakaian kata-kata Gubernur minta maaf terkait

<sup>1</sup> Lihat Cok Rat Mangku Pastika Jangan Emosi, <http://www.youtube.com/watch?v=msbmRZmzqco>, diakses 14 Agustus 2014.

dengan pembubaran desa *pakraman*.

Berbagai persyaratan memilih berita televisi menyebabkan seorang jurnalis tidak sekadar memilih apa yang dilihat, tetapi harus dilandasi dengan berbagai pertimbangan. Alasannya adalah agar berita tersebut menjadi menarik untuk ditonton. Pertimbangan tersebut di antaranya adalah aktualitas, berarti waktu yang tepat tidak terlambat. Peristiwa yang terjadi hari ini harus disiarkan hari ini juga. Semakin cepat, semakin menarik simpati pemirsa. Bahkan informasi yang penting sekali dapat disiarkan redaksi pada *breaking news*.

Ketepatan informasi yang disiarkan akan memberikan kepuasan kepada pemirsa yang setia pada televisi yang dijadikan sumber informasi. Saat ini fasilitas video *streaming* yang diterima redaksi dapat memberikan informasi aktual suatu peristiwa. Selanjutnya baru kualitas informasi ditingkatkan dengan standar sekilas info atau berita singkat (*broadcast*). Pada kasus konflik Kemoning-Budaga berita pertama yang muncul berupa berita aktual konflik tersebut. Namun, sehari setelah Gubernur Bali melakukan kunjungan ke Klungkung baru muncul berita pembubaran desa *pakraman* yang menjadi kasus hukum perdata.

Kedekatan (*proximity*) berita dapat dilihat, baik dari sisi kedekatan sisi profesi, lokasi, peristiwa, hobi, pertalian ras, kepercayaan, kebudayaan, maupun kepentingan politis lainnya. Kedekatan lokasi dapat dibedakan menjadi regional, nasional, dan internasional.

Semua peristiwa di wilayahnya akan menarik perhatian dan terdistribusi pemirsa di wilayahnya (Fachruddin, 2012: 95). Berita konflik Kemoning-Budaga menarik bagi warga Klungkung khususnya dan Bali pada umumnya juga terdistribusi ke wilayah dunia maya karena di *upload* di *YouTube*.

Sesuatu yang populer (*prominence*) semakin terkenal semakin menjadi bahan berita. Orang, tempat, dan benda yang

menonjol atau dikenal oleh pemirsa akan menarik menjadi berita. Nilai berita yang menyangkut orang terkenal, tempat, dan benda tersebut akan semakin tinggi jika berkaitan dengan peristiwa yang mengikutinya (Fachruddin, 2012: 96). Gubernur Bali sebagai kepala daerah sudah tentu dikenal oleh pemirsa *Bali TV* apalagi peristiwa konflik sampai korban jiwa merupakan peristiwa yang menjadi perhatian pemirsa.

Akibat (*consequence*) segala tindakan, peraturan, perundangan, dan sebagainya yang berakibat menyulitkan atau menyenangkan orang banyak merupakan berita menarik (Fachruddin, 2012: 96). Pernyataan pembubaran desa *pakraman* oleh Gubernur Bali yang diwacanakan oleh KMB menjadi polemik dan keresahan banyak orang. Akibatnya, wacana tersebut membuat perpecahan pro dan kontra di masyarakat.

Konflik (*conflict*) segala sesuatu yang berbentuk konflik memiliki *rating* tinggi karena sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Terjadinya konflik akan mengakibatkan perseteruan yang menarik diberitakan. Konflik bisa menyangkut orang perorangan, antara organisasi, antara kelompok masyarakat, partai politik, penguasa, dan antarnegara. Perselisihan dapat terjadi di antara mereka dengan permasalahan egois, salah paham, pelanggaran hak, pelecehan hingga perebutan kekuasaan. Konflik Kemoning-Budaga dapat merembet menjadi konflik antara penguasa dan media yang memberitakan dan sumbernya, seperti antara *Bali Post* dan Gubernur Bali merupakan tontonan berita yang laku dijual media televisi.

Bencana alam (*disaster*) dan kejahatan (*crime*) secara psikologis merupakan peristiwa yang harus diwaspadai karena berita bencana dan kriminalitas menjadi perhatian ekstra yang laku dijual. Kondisi persaingan industri televisi di Indonesia saat ini menghasilkan berita kriminalitas seolah menjadi menu utama, bahkan dominan menjadikan pemirsa khawatir bila tampilan kekerasan yang tidak lazim leluasa disiarkan secara

terbuka tanpa sensor. Kekerasan pada bentrokan Kemoning-Budaga menghasilkan kekerasan dan tertangkapnya pelaku yang dianggap dilakukan oleh polisi sebagai provokator peristiwa tersebut. Kekerasan tidak hanya dilakukan oleh kedua kubu yang bertikai tetapi juga dilakukan oleh polisi yang bertugas di lapangan. Hal ini diberitakan dalam tayangan *Seputar Bali* dengan judul berita “POLRI Bisa Dikenakan Undang-Undang HAM-*Seputar Bali - Bali TV*”.<sup>2</sup>

Berita juga mengandung hal unik atau luar biasa (*unusual*). Setiap cerita yang unik, aneh, dan luar biasa justru dapat menjadi isu hangat yang diperbincangkan hingga berhari-hari pada seluruh berita utama televisi. Kisah Briptu Norman Kamaru, Brimob di Gorontalo, yang menyanyi dan menari India dan diunggah di situs *YouTube* justru terhindar dari hukuman karena situs tersebut dikunjungi ribuan orang di dunia maya. Kisah isengnya mendadak menjadi buah bibir karena muncul di berita televisi.

Sisi kemanusiaan (*human interest*) juga menjadi sumber berita yang sangat menarik, misalnya penderitaan, kesedihan, atau perjuangan yang dramatik. Misalnya, kisah yang berawal dari media *online* di internet dapat membalikkan kenyataan yang dialaminya dalam waktu yang relatif singkat setelah berita tersebut muncul pada tayangan berita televisi. Mereka bukannya orang terkenal, melainkan kisahnya memiliki nilai-nilai dramatik dan menyentuh perasaan manusia (*human interest*). Jika persyaratan memperoleh berita terpenuhi, maka jurnalis peliput selanjutnya membawa ke *news room* untuk diuji ide berita sebelum diputuskan *on air*. Menurut Dewi Tika (direktur program dan pemberitaan), setelah melewati pertimbangan berita, seleksi ide berita (*judgement*) redaksi proses penayangannya adalah seperti di bawah ini.

---

<sup>2</sup> Lihat: <http://www.youtube.com/watch?v=oPbQ7wV2uSg>, diakses 16 Januari 2014

“Dilakukan secara bersama (*relay*) di samping memanfaatkan layanan sosial berbagai video atau *YouTube* maupun secara *streaming via www.balivtv.tv* dan siaran satelit” (Wawancara, 30 Desember 2013).

Berita *Seputar Bali* tentang konflik Kemoning-Budaga di *Bali TV* juga terdistribusi melalui situs *online Youtube*, yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna internet sebagai pemirsa. Berita tersebut banyak ditanggapi dan dikomentari. Berkaitan dengan isi tanggapan dan komentar umumnya menyayangkan kejadian tersebut, baik yang mendukung Gubernur Made Mangku Pastika maupun pendukung *Bali Post* dengan berbagai opini. Dengan demikian, tayangan berita *Seputar Bali* menjadi wacana yang didistribusi dan dikonsumsi tidak hanya pada wilayah lokal, tetapi juga nasional, bahkan internasional.

# Bab 7

## Proses Konsumsi Wacana Pembubaran Desa Pakraman

Wacana pembubaran desa *pakraman* yang dikonsumsi pemirsa *Bali TV* menimbulkan perbedaan penerimaan di tengah masyarakat Bali. Perbedaan persepsi itu menyebabkan masyarakat Bali terbelah dalam dua posisi yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh media bukanlah sekadar saluran yang bebas. Ia juga subjek yang mengonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan bias, dan pemihakannya. Seperti dikatakan Tony Bennet bahwa media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Dalam pandangan kritis media juga dipandang sebagai wujud pertarungan ideologi antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Dalam realitas sosial siapa yang memegang kendali sebagai agen memproduksi makna dan siapa atau kelompok mana yang hanya berperan sebagai konsumen dari pemaknaan tersebut (Eriyanto, 2005: 37--38).

Televisi sebagai media informasi dan edukasi (*audio visual*) memiliki perbedaan konsumsi dengan media massa lainnya. Berita televisi sebagai konsumsi pemirsa memiliki kekuatan gambar ekspresi, daya rangsang emosi, dan suara mudah melekat di benak pemirsa. Konsumsi komoditas yang diproduksi secara massal membentuk dimensi vital bagi ekonomi kapitalis modern. Konsumsi merupakan mata rantai terakhir dalam rangkaian aktivitas ekonomi tempat diubahnya modal dalam bentuk uang menjadi komoditas melalui proses produksi material.



Pertukaran dan konsumsi komoditas yang memungkinkan terwujudnya keuntungan, yang ketika dikembalikan lagi dalam bentuk uang dapat diinvestasikan ulang menjadi produksi (Lee, 2006: 3). Selain memiliki kelebihan dapat didengar dan dilihat, televisi juga dapat ditonton kembali, daya rangsang tinggi, elektris, dan jangkauan yang luas.

Dalam berita televisi narasi dan gambar ibarat “pinang dibelah dua”. Artinya, terdapat keseimbangan dan pertalian erat di antara apa yang terdengar dan terlihat di layar kaca. Narasi dapat menyampaikan fakta dan latar belakang informasi, sedangkan gambar memperlihatkan aksi dan mengungkap emosi konsumsi pemirsa. Pada berita televisi narasi dan suara sama-sama penting. Namun, visual cenderung menguasai dengan daya rangsangannya serta paling mudah diingat pemirsa. Dalam penyiaran dikenal dua pendekatan menulis skrip berita, yakni *tight way* dan *loose way*. *Tight way* digunakan untuk berita radio dengan menulis secara detail seluruh peristiwa yang didapat. *Loose way* selalu digunakan untuk membuat skrip berita televisi lebih terbuka, yaitu naskah hanya digunakan untuk menjelaskan yang tidak digambarkan dalam visual (Fachruddin, 2012: 115).

Penjelasan dalam bahasa visual memberikan kekuatan dalam sebuah berita. *Seputar Bali* yang mewacanakan pembubaran desa *pakraman* memiliki hubungan antara pembuat teks dan pembaca teks atau konsumen. Hubungan tersebut menurut Hall ada tiga bentuk pembacaan/hubungan antara penulis dan pembaca dan bagaimana pesan itu dibaca di antara keduanya. Pertama, posisi pembaca dominan (*dominant hegemonic position*). Posisi ini terjadi ketika penulis menggunakan kode-kode yang dapat diterima umum sehingga pembaca akan menafsirkan dan membaca pesan/tanda itu dengan pesan yang sudah diterima umum tersebut. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa tidak terjadi penafsiran antara penulis dan pembaca.

Kedua, pembacaan yang dinegosiasikan (*negotiated code/position*). Dalam posisi ini tidak ada pembacaan dominan. Hal yang terjadi adalah kode apa yang disampaikan penulis ditafsirkan secara terus-menerus di antara kedua belah pihak. Penulis juga menggunakan kode atau kepercayaan politik yang dipunyai oleh khalayak, tetapi ketika diterima oleh khalayak tidak dibaca dalam pengertian umum. Namun, pembaca akan menggunakan kepercayaan dan keyakinan tersebut dan dikompromikan dengan kode yang disediakan oleh penulis.

Ketiga, pembacaan oposisi (*oppositional code/position*). Posisi pembacaan yang ketiga ini merupakan kebalikan dari posisi yang pertama. Pembaca akan menandakan secara berbeda atau secara berseberangan dengan apa yang ingin disampaikan oleh khalayak tersebut. Pembacaan oposisi ini muncul kalau penulis tidak menggunakan kerangka acuan budaya atau kepercayaan politik khalayak dan pembaca dapat menggunakan kerangka budaya atau politik sendiri (Eriyanto, 2005: 96).

Yang menarik dilihat di sini apabila hubungan antara pembuat dan pembacaan teks memiliki ideologi yang sama. Ideologi yang sama ini menyebabkan tidak adanya perbedaan pandangan antara penulis dan pembaca. Pada titik ini tidak ada protes atau perlawanan dari konsumsi pembaca. Keadaan ini dapat berubah kalau pembaca sebagai konsumen mempunyai ideologi yang berseberangan dengan wartawan atau media.

Pada kasus *Bali Post* dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika terjadi ideologi yang berbeda atau pembacaan oposisi. Pembacaan oposisi (Gubernur Bali) ditandai dengan ketidaksukaan, ketidakcocokan yang dirasakan oleh Gubernur terhadap pemberitaan pembubaran desa *pakraman*. Gubernur memiliki titik tolak ideologi karena tidak ada dan merasa melontarkan pernyataan seperti itu. Namun, *Bali Post* menyatakan pernyataan tersebut terjadi saat pertemuan Gubernur Bali dengan Wakil Bupati Klungkung Tjok Gede

Agung. Jadi, di sini terjadi pembacaan oposisi, apa yang dibawa oleh pembuat teks tidak diterima atau dikonsumsi sebaliknya oleh pembaca atau pemirsa.

Teks berita *Bali TV* mengajak pembaca untuk menempatkan dirinya dalam posisi di pihak *Bali Post* bukan di pihak Gubernur Bali. Pembaca diajak untuk menentang cara-cara yang dilakukan Gubernur menangani konflik desa *pakraman* dengan pernyataan pembubaran desa *pakraman* tersebut. Dengan kata lain pembacaan semacam ini ditentukan oleh ideologi tertentu yang dibawa oleh berita tersebut. Pengembangan wacana diliput *Bali TV* dalam peristiwa *simakrama* Gubernur Bali yang dilaksanakan secara rutin menyerap informasi dari seluruh lapisan masyarakat Bali. Berikut konsumsi khalayak terhadap berita *Seputar Bali*, dalam analisis penulis merupakan pembacaan oposisi (*oppositional code/position*). Pembaca akan menandakan secara berbeda atau secara berseberangan dengan apa yang ingin disampaikan oleh khalayak. Hal itu muncul kalau penulis tidak menggunakan kerangka acuan budaya atau kepercayaan politik khalayak. Berikut berita *simakrama* Gubernur Bali yang dikodekan berbeda oleh *Bali TV* dengan berita yang berjudul “Komitmen Gubernur Jaga Bali Dipertanyakan” dengan durasi 03.32 detik<sup>1</sup>, berita *Seputar Bali*, 27 November 2011 (Gambar 5.8).

---

<sup>1</sup> Berita ini dapat diakses di *Youtube*, link [http://www.youtube.com/watch?v=XEOSO-9us\\_Q](http://www.youtube.com/watch?v=XEOSO-9us_Q),



Gambar 5.8 Komitmen Gubernur jaga Bali Dipertanyakan  
 Sumber: ([http://www.youtube.com/watch?v=XEoS0-9us\\_Q](http://www.youtube.com/watch?v=XEoS0-9us_Q))

*Opening* berita ini video simakrama Gubernur Bali dengan masyarakat Bali di wantilan gedung DPRD Provinsi Bali November 2011 dengan *lead* berita seperti di bawah ini.

“*Simakrama* Gubernur Bali dengan masyarakat di Wantilan Gedung DPRD Bali, dihujani pertanyaan tentang wacana penghapusan *bhisama*, dari pasal pada batang tubuh Perda RTRW Bali Nomor 16, Tahun 2009. Para penanya meminta sikap tegas Gubernur untuk menjaga Bali secara *sekala-niskala*”.

Berikut data berita yang dimaksud (Tabel 5.9).

No	Variabel	Keterangan
1	<b>Judul Berita</b>	Komitmen Gubernur jaga Bali Dipertanyakan
2	<b>Durasi</b>	03.32 detik
3	<b>Opening</b>	Suasana <i>Simakrama</i>
4	<b>Ilustrasi</b>	00.01 detik Wayan Ginawa, peserta <i>simakrama</i> , Jero Mangku, Ngakan Samudra, Gubernur Bali.
5	<b>Intro (Lead)</b>	<i>Simakrama</i> Gubernur Bali...
6	<b>Narasi</b>	Pembaca berita <i>Seputar Bali</i>
7	<b>Pernyataan</b>	Wayan Ginawa, Jero Mangku Sangging, Ngakan Samudra
8	<b>Wacana</b>	Penghapusan <i>Bhisama</i>
9	<b>Jurnalis</b>	Widana dan Dek Putra

Tabel 5.9 Distribusi Berita *Seputar Bali*

Sumber: ([http://www.youtube.com/watch?v=XEOSo-gus\\_Q](http://www.youtube.com/watch?v=XEOSo-gus_Q))

Isi berita yang dibacakan oleh pembaca berita sebagai berikut. “Wayan Ginawa dari Tejakula, Buleleng menanyakan penghapusan *Bhisama* dari pasal RTRW P Bali. Menurut dia, ide penghapusan *bhisama* merupakan ide gila dari orang gila. Dirinya secara tegas meminta komitmen Gubernur dalam menjaga Bali tidak sebatas retorika. Ditambahkan bahwa *bhisama* tidak boleh dihapus karena merupakan pelindung (*tameng*) Bali. Senada dengan hal tersebut Jero Mangku Sangging dari Gianyar menanyakan janji Gubernur menjaga Bali secara *sekala-niskala*. Dirinya meminta Gubernur dengan tegas menolak penghapusan *bhisama*”.

Salah seorang penanya yang juga anggota DPRD Bali, Ngakan Samudra meminta Gubernur mewaspadai kepentingan pragmatis yang ingin merevisi Perda RTRW Bali menyangkut usulan penghapusan *bhisama* dan mengubah ketinggian bangunan.

Dalam berita Wayan Ginawa mengatakan sebagai berikut.

”Jadi, saya minta Pak Gubernur dengan pak anggota dewan mempunyai komitmen mengajegkan Bali tidak sebatas retorika, benar-benar bisa diterjemahkan dan bisa dilaksanakan”.

Dilanjutkan pernyataan Jero Mangku Sangging sebagai berikut; “Bapak berani menyatakan akan segera mungkin menjalankan yang namanya perda tersebut tentang *bhisama*. Ditegaskan melalui pertanyaan oleh Ngakan Samudra (Anggota DPRD Provinsi Bali) yang ditayangkan berita ini sebagai berikut.

“Waspadailah kepentingan pragmatis yang ingin mengubah, merevisi, atau menghilangkan *bhisama* ketinggian bangunan 15 meter karena ini ciri Bali. Ini yang kita banggakan berbeda dengan daerah lain di seluruh Indonesia”.

Narasi berita *Bali TV* melanjutkan dengan pernyataan ”menanggapi pertanyaan tersebut Gubernur Bali Made Mangku Pastika, tidak secara tegas mengatakan penolakannya terhadap usulan penghapusan *bhisama*. Namun, Gubernur mengatakan tidak mungkin *bhisama* dihapus karena *bhisama* merupakan sesuatu yang sakral dan menentukan arah pembangunan Bali ke depan. Gubernur juga meminta masyarakat berpikir jernih dan tidak panas terkait dengan masalah ini. Gubernur meminta Perda RTRW Bali dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Pernyataan Gubernur sebagai berikut.

“Tidak mungkin hal-hal tersebut bisa dihapuskan, ketentuan hal tersebut bukan masuk pada Perda 16, terdapat pada Perda sebelumnya juga ada. Makna *bhisama* dipertahankan yang penting jangan panas, berpikir jernih, sabar, tenang hingga bisa menyelesaikan permasalahan”.

Analisis judul berita, *lead*, isi berita, dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam berita tersebut diamati

dengan pilihan bahasa dan struktur tata bahasa yang digunakan. Bahasa, baik pilihan kata maupun struktur gramatika, dipahami sebagai pilihan mana yang dipilih oleh seseorang untuk diungkapkan membawa makna ideologi tertentu (Eriyanto, 2005: 15). Distribusi wacana melalui berita ini tidak terdapat kesinkronan antara judul berita (kepala berita) atau *head lines news* walaupun sudah dibuat 'hidup' dan menarik perhatian khalayak. Ketidaksinkronan ini membuat berita terlepas dari teras berita (*lead*). Seharusnya judul yang baik adalah memperjelas *lead*, sedangkan *lead* yang baik memperjelas isi berita. Dalam hal ini ditemukan kelompok dominan (media massa) memanipulasi wacana mana yang perlu disampaikan dan mana yang dihilangkan atau di-*framing* sesuai dengan ideologi untuk membangun tujuan mereproduksi dan melegitimasi dominasi.

Media massa seperti program berita *Seputar Bali* di *Bali TV* sering menjadi media komunikasi dominan terutama oleh kepentingan penguasa (pemilik modal), misalnya dalam pemilihan Gubernur Bali (2013). Pada masa Orba, setiap kekuasaan selalu bersentuhan dengan kekuasaan demi berbagai kepentingan politik. Media massa dan penguasa dengan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi saling memanfaatkan. Dalam hubungan jenis kedua ini tak selamanya media massa ditentukan oleh sistem politik tetapi tergantung pada persebaran kekuasaan (*power sharing*) yang terjadi di negara itu. Berkenaan dengan liputan *Bali TV* di lapangan, interaksi antara kedua institusi ini yang seharusnya saling memengaruhi (membutuhkan) terjadi hal yang sebaliknya. Penguasa, dalam hal ini Gubernur Bali Made Mangku Pastika, sebagai publik figur merupakan sumber berita bagi media massa. Namun, sumber berita (Gubernur) merasa dipelintir atau diputarbalikkan (Hamad, 2004, 8-9). Sebuah konstruksi yang dapat menghasilkan bias tampak pada pemenggalan

gambar (visual) dan pilihan kata yang subjektif. Itulah sebabnya peristiwa pascakonflik dan tingkah laku (pernyataan) para publik figur umumnya mempunyai nilai berita. Padahal, nilai berita itu bagi media massa sangat penting karena berkaitan dengan kehidupannya di tengah khalayak sesuai dengan tuntutan jurnalisme. Sesuai dengan asas pemberitaan, sebuah liputan berita yang baik adalah peristiwa yang memiliki nilai berita.

Peristiwa dengan nilai berita tak lepas dari konstruksi media massa yang memiliki ciri khas pembentuk opini publik. Ciri khas yang pertama dari segi luas jangkauan media dalam menyebarkan berbagai pesan dan informasi. Karena daya jangkauan itulah para publik figur memanfaatkan media untuk menyebarluaskan ideologinya untuk dikonsumsi publik. Hal itu dilakukan dengan harapan capaian tujuan ideologinya juga dapat jauh lebih luas daripada yang diperoleh melalui saluran komunikasi lainnya.

Kedua, aspek *framing* media dalam menyajikan realitas sebuah peristiwa dilakukan melalui suatu proses yang disebut konstruksi realitas (*construction of reality*). Liputan setiap peristiwa oleh media massa secara tertulis atau *audio visual* merupakan konstruksi realitas. Artinya, suatu upaya menyusun realitas dari satu atau sejumlah peristiwa yang semula terpenggal-penggal (acak) menjadi tersitematis hingga membentuk cerita atau wacana yang bermakna (Hamad, 2004: 11). Dengan demikian, seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*) dalam bentuk wacana yang bermakna.

Seperti telah dijelaskan dalam analisis di depan bahwa proses pembentukan wacana pembubaran desa *pakraman* pascabentrok Kemoning-Budaga dalam liputan *Bali TV* merupakan usaha-usaha sengaja yang terlihat dalam proses produksi. Misalnya pemilihan narasumber dan pengabaian beberapa pernyataan lengkap Gubernur Made Mangku Pastika. Proses kerja *framing*



tampak pada pemenggalan hasil wawancara dan pilihan kata yang subjektif.

## Bab 8

# Faktor-Faktor Yang Mendukung Proses Pembentukan Wacana Pembubaran Desa Pakraman Dalam Liputan Bali Tv

Terdapat tiga hal pokok menyangkut faktor-faktor yang mendukung proses pembentukan wacana pembubaran desa *pakraman* dalam liputan *Bali TV* pascabentrok Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali. Tiga hal pokok tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, faktor budaya media yaitu sebuah budaya di mana citra, suara, dan lensa menghasilkan rajutan kehidupan sehari-hari, mendominasi waktu luang, serta membentuk pandangan politik dan sikap sosial. Media massa tidak hanya sebagai alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk menyusun agenda, serta memberi tahu kita apa yang penting untuk diperhatikan (Littlejohn & Foss, 2009: 405).

Kedua, faktor politik diuraikan dalam faktor ekonomi-politik yang ditelusuri menyangkut media. Saat ini terjadi keterbukaan di bidang politik dan ekonomi yang luar biasa hanyalah menguatkan kapitalisasi pers. Kapitalisasi pers mengandung kekuasaan dominan pemilik kapital terhadap produksi wacana.

Ketiga, faktor ideologi dalam pengertian kesadaran palsu. Kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain yang tidak dominan. Permasalahan pada bab ini dibahas dengan teori agenda *setting* dan *framing*.

## **Faktor Budaya Media**

Budaya media adalah media menawarkan berita yang populer, dianggap menarik perhatian pemirsa, dan memiliki nilai jual. Secara jeli *Bali TV* mengangkat wacana pembubaran desa *pakraman* oleh Gubernur dengan *setting* dan *framing* sesuai dengan kepentingan politik dan ideologi *Ajeng Bali* KMB. Budaya media juga mengedepankan kepentingan pengusaha yang memiliki kekuasaan dan mengontrol medianya. Persaingan pengusaha dan penguasa dalam opini wacana pembubaran desa *pakraman* bertujuan memperebutkan simpati dan dukungan masyarakat Bali. *Bali Post* bersikukuh dengan pendiriannya bahwa wacana pembubaran desa *pakraman* dengan sumber yang kredibel. Sebaliknya, Gubernur menyatakan bahwa berita tersebut merupakan berita bohong. Wacana ini bersaing memperebutkan kebenaran atas dua kebenaran yang saling bertolak belakang dan terbelah dalam opini budaya media.

Budaya media di berbagai negara dan kebanyakan negara kapitalis, termasuk Indonesia setelah era reformasi merupakan suatu bentuk budaya komersial yang diproduksi demi laba disebarkan melalui bentuk komoditas. Komersialisasi dan komodifikasi budaya memiliki banyak konsekuensi. Produksi untuk mencari keuntungan berarti bahwa pelaku industri media berusaha menghasilkan karya yang akan populer, yang akan dijual dalam koran, majalah radio, media *on line*, dan televisi, untuk menarik banyak pemirsa. Artinya sebagai penarik pemirsa menjadi pelanggan setia dan pendukung media tersebut. Kebutuhan untuk menjual produksi mereka berarti bahwa produk industri budaya harus sesuai dengan pengalaman sosial, dan harus menarik banyak pemirsa. Oleh karena itu, pelaku industri media harus menawarkan produk yang menarik, yang mungkin mengagetkan, mematahkan yang sudah umum, memuat kritik sosial, atau mengutarakan berbagai ide masa kini yang mungkin merupakan suatu produk dari pergerakan sosial yang progresif.

Berita yang populer, dianggap menarik perhatian pemirsa, dan memiliki nilai jual menurut *Bali TV* adalah berita bentrok Kemoning-Budaga dengan *angle* wacana pembubaran desa *pakraman* oleh Gubernur. *Bali TV* secara jeli membangun wacana yang cukup kritis. Otomatis wacana ini memberikan efek yang mengagetkan masyarakat umum apakah benar Gubernur Bali hendak membubarkan desa *pakraman*. Wacana pembubaran desa *pakraman* yang di-*setting* *Bali TV* merupakan tema sentral yang memiliki tujuan politik dan ideologi tertentu. Tujuan politiknya, yaitu ada indikasi ingin ‘menjatuhkan’ Gubernur dan selanjutnya menjauhkan dari rakyatnya. Tujuan ideologi wacana yang dibangun pernyataan pembubaran desa *pakraman* bertentangan dengan wacana ‘Ajeg Bali’ sebagai wacana tunggal dan ideologi KMB yang menjaga Bali dari pengaruh luar dianggap merongrong kebudayaan Bali.

Budaya media mengedepankan kepentingan pengusaha yang memiliki dan mengontrol berbagai kekuasaan sehingga beragam produknya juga terkait dengan pertikaian sosial antara kelompok yang bersaing. Selain itu, menyuarakan berbagai pandangan yang menimbulkan pertikaian. Budaya media tidak dapat begitu saja disepelekan begitu saja sebagai alat biasa bagi ideologi dominan, tetapi harus ditafsirkan secara berbeda dan ditempatkan sesuai dengan konteksnya dalam kumpulan wacana sosial yang bersaing

Pertikaian dan persaingan opini wacana antara *Bali Post* dan Gubernur bertujuan memperebutkan simpati dan dukungan masyarakat Bali berupa *angle* pembubarn desa *pakraman* sebagai produk wacana budaya media. *Bali Post* bersikukuh dengan pendiriannya bahwa berita yang disampaikannya bersumber dari narasumber yang kredibel. Sebaliknya, Gubernur menyatakan bahwa berita tersebut merupakan berita bohong,<sup>1</sup>

---

1 Lihat Buntut Pemuatan Berita Bohong, Gubernur Somasi *Bali Post*, <http://metroballi.com/2011/09/23/>, diakses 14 Agustus 2014

karena merasa tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti itu. Wacana ini bersaing memperebutkan kebenaran sosial atas dua kebenaran yang saling bertolak belakang dan terbelah dalam opini budaya media.

Media hanya dikuasai oleh kelompok dominan (pemilik modal) dan menjadi sarana untuk memojokkan kelompok lain (Gubernur). Media juga hanya dimanfaatkan dan menjadi alat kelompok dominan. Berikut mediasi sebagai wacana media pertama yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Denpasar antara Gubernur Bali dan *Bali Post* yang menghadirkan pihak penggugat Gubernur Bali Made Mangku Pastika (Gambar 6.1).



Gambar 6.1 Mediasi Gugatan Gubernur Bali Kepada *Bali Post*

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=8gVvgfJbFw8>)

Berita *Bali TV* “Mediasi Gugatan Gubernur Bali kepada *Bali Post*”<sup>2</sup> ditayangkan *Seputar Bali*. Opening berita dengan

<sup>2</sup> Berita ini diunggah di Youtube, link <http://www.youtube.com/watch?v=8gVvgfJbFw8>. Diakses 12 Agustus 2014.

narasi *Bali TV* mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Denpasar menghadirkan pihak pengugat Gubernur Made Mangku Pastika. Usai menjalani proses mediasi Gubernur menyatakan bahwa gugatan hukumnya kepada pers melalui pengadilan merupakan cara yang elegan. Inti berita ini adalah gugatan Gubernur terhadap *Bali Post* merupakan tindakan yang elegan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Saat diwawancara wartawan Gubernur menyatakan sebagai berikut.

“Lewati proses hukum yang sedang berjalan kita tidak boleh memberikan opini atau pendapat apa pun tentang proses ini. Karena itu melanggar undang-undang termasuk undang-undang pers. Kecuali penjelasan tentang kemerdekaan pers, ya saudara silahkan nilai sendiri apakah selama ini saya mulai dari Ketua Tim investigasi Bom Bali, sebagai Kapolda, sebagai Gubernur lebih dari tiga tahun pernah saya mengganggu kebebasan pers? Sedikit pun tidak pernah ada, saya siap dihubungi oleh wartawan kapan saja, instansi terbuka dan kemudian setiap hari Sabtu, Minggu terakhir saya mengadakan *simakrama* atau *open house*. Semua masyarakat boleh berbicara apa saja kepada saya pada saat itu tanpa saringan, dan itu diliput seluruh media di Bali dan ada yang menyiarkan secara langsung”.<sup>3</sup>

(Narasi *Bali TV*) untuk diketahui Gubernur Made Mangku Pastika melayangkan gugatan perdata kepada *Bali Post* dalam sengketa pemberitaan pembubaran desa *pakraman*. Gubernur Bali menggugat *Bali Post* sebesar 150 Miliar, 170 juta rupiah yang nantinya uang hasil sengketa itu akan dibagikan kepada seluruh desa *pakraman* di Bali. Visual yang ditayangkan adalah Gubernur menyalami penasihat hukum dan pendukungnya dalam proses mediasi dengan *Bali Post*, dan dilanjutkan wawancara dengan media cetak dan TV. Visual ini juga sebagai

3 Berita ini diunggah di Youtube, link <http://www.youtube.com/watch?v=8gVvgfJbFw8>. Diakses 12 Agustus 2014.

wacana tanding Gubernur berkaitan dengan konflik yang dihadapinya.

Berita “Mediasi Gugatan Gubernur Bali kepada *Bali Post* menjelaskan secara detail faktor budaya media seperti berita *Bali TV* (Tabel 6.1).

No	Variabel	Keterangan
1	<b>Judul Berita</b>	Mediasi gugatan Gubernur Bali kepada <i>Bali Post</i>
2	<b>Durasi</b>	03.13 detik
3	<b>Opening</b>	Suasana PN Denpasar
4	<b>Ilustrasi</b>	Wawancara Gubernur
5	<b>Intro (Lead)</b>	Mediasi Gubernur Bali dengan <i>Bali Post</i>
6	<b>Narasi</b>	Pembaca berita <i>Seputar Bali</i>
7	<b>Wawancara</b>	Gubernur Bali
8	<b>Wacana</b>	Mediasi
9	<b>Jurnalis</b>	Susila dan widiana <i>Bali TV</i>

Tabel 6.1 Mediasi gugatan Gubernur Bali kepada *Bali Post*

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=8gVvgfJbFw8>)

Berita tersebut menunjukkan bahwa budaya media berperan di dalam membentuk opini. Artinya, baik media maupun narasumber, masing-masing memiliki *settingnya* sendiri-sendiri. *Setting* Gubernur dengan menyatakan bahwa gugatannya kepada *Bali Post* merupakan tindakan yang elegan. Selain itu, dalam pertarungan opininya akan memberikan uang hasil sengketa kepada desa *pakraman*. Ini dimaksudkan untuk menarik dukungan desa *pakraman* sebagai *framing* berbeda dari *Bali Post*.

*Setting* yang dikembangkan pihak KMB bahwa Gubernur menuntut *Bali Post* sebagai upaya mengganggu kemerdekaan pers di Bali. KMB berusaha menarik simpati masyarakat khususnya masyarakat pers untuk berpihak dan “melawan” Gubernur

yang telah mengganggu kemerdekaan pers. Beberapa bulan isu wacana kemerdekaan pers ini *di-setting* dan dimobilisasi dengan sumber daya KMB di seluruh Bali.

Wacana ini juga berkembang pada media sosial *facebook* dengan dibuatnya *akun* terancamnya kebebasan pers. Banyak komentar dari masyarakat yang memberikan opini terhadap terancamnya kemerdekaan pers di Bali. Berkembangnya budaya media dari konvensional menjadi budaya media digital atau *on line* membawa pengaruh arus wacana yang cepat. Artinya, detik ini diunggah atau didistribusikan sebuah wacana oleh masyarakat, detik berikutnya sudah dapat dikonsumsi oleh masyarakat pula.

Budaya media memiliki keunggulan karena menandakan bahwa budaya kita adalah sebuah media; media telah menjajah budaya; media merupakan kendaraan utama distribusi dan penyebarluasan budaya; bahwa media komunikasi telah menggantikan modus-modus budaya sebelumnya, seperti buku atau lisan; kita tinggal dalam dunia, di mana media mendominasi waktu luang dan budaya. Budaya media merupakan bentuk dan ranah budaya masyarakat kontemporer. Budaya media juga merupakan ranah di mana terjadi berbagai pertarungan untuk mengontrol masyarakat terjadi. Kaum feminis dan antifeminis, liberal dan konservatif, radikal dan pembela status *quo* saling berebut kekuasaan budaya tidak hanya melalui berita dan informasi, tetapi juga dalam wilayah hiburan. Media terkait dengan kekuasaan, dan membuka *cultural studies* kepada perubahan politik dan pertempuran sejarah. Media turut membentuk pandangan kita terhadap dunia, opini publik, serta nilai dan sikap, sehingga merupakan forum penting pergulatan dan kekuatan sosial (Kellner, 2010: 47).

Media merupakan forum penting memperebutkan kekuasaan budaya media yang menjadi *trend* pada masyarakat kontemporer sekarang ini adalah melalui produk berita televisi. Berita televisi



memiliki kekuatan daya jelajah dan kualitas *setting* pemberitaan dalam mengubah opini masyarakat. Melalui berita teks budaya media dan cara budaya media bersinggungan dengan pergulatan politik, sosial dan membantu membentuk kehidupan sehari-hari di samping memengaruhi cara orang berpikir dan bertindak. Di samping itu, cara mereka memandang diri sendiri dan orang lain serta menyelami cara budaya media menyediakan bentuk-bentuk dominasi ideologis yang membantu mereproduksi hubungan-hubungan kekuasaan.

Hubungan-hubungan kekuasaan media merupakan pergulatan antara berbagai kelompok, termasuk pergulatan kelompok media *Bali Post* dengan Gubernur Bali Mangku Pastika dan antara berbagai sektor kelas demi pengendalian opini di masyarakat. Dua kelompok bertentangan ini menggunakan retorika pemberdayaan dan argumentatif untuk mendukung opininya masing-masing. Mereka bersaing melalui agenda *setting* dan *framing* media untuk memperebutkan kendali atas masyarakat. Gubernur dan *Bali Post* juga sama-sama menggunakan media sosial *Youtube* dengan *setting* dan *framing* masing-masing memperebutkan opini khalayak. Gubernur mengunggah melalui *Youtube* video rekaman bedah buku karya Samsul Wahidin (2012) yang menghadirkan pembicara Tjipta Lesmana, ahli komunikasi media massa. Pihak *Bali Post* mengunggah hasil liputannya dengan *angle* pembubaran desa *pakraman* dengan narasumber seide dengan *setting* pemberitaannya. Pada *setting* dan *framing* pemberitaan *Bali TV* diungkapkan bahwa pernyataan Gubernur tidak berpihak pada ‘penyelamatan’ *Ajeg Bali*.

Atas kendali tersebut KMB menyosialisasikan sebuah proyek *Ajeg Bali* dengan men-*setting* segala berita untuk keberpihakannya terhadap “penyelamatan” budaya Bali. Sosialisasi ini merupakan wacana dominan, bahkan cenderung yang tidak sejalan dianggap sebagai lawan atau berseberangan

dengan *Ajeg Bali*. Berita yang tidak sejalan menurut KMB adalah produksi wacana pembubaran desa *pakraman* dari Gubernur Bali. Sebaliknya, Gubernur Bali beranggapan bahwa dengan *angle* berita tersebut seakan KMB bermaksud “menggulingkan” kekuasaan Gubernur Bali.

Gubernur Bali Mangku Pastika melakukan *counter* wacana men-*setting* dan men-*framing* pemberitaan *Bali Post* dengan keberhasilan program Bali Mandara yang diusungnya melalui media alternatif di luar KMB, bahkan media *online Youtube*. *Youtube* merupakan alternatif sumber informasi yang bebas dan sesuai dengan kepentingan yang mengunggahnya. Hal itu menyebabkan terjadi pertarungan yang seimbang antara pro dan kontra terhadap isu, opini perseorangan dalam masyarakat budaya media.

Budaya media cetak, elektronik, dan media *online* menjadi media masyarakat kontemporer yang memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai pihak untuk men-*seting* dan men-*framing* opininya melalui penayangan berita di *Youtube*. Berita-berita *Bali TV* yang menyangkut wacana pembubaran desa *pakraman* juga diunggah, diplublikasi, diakses, dan dikomentari oleh berbagai kalangan dengan sebaran berita wilayah yang tidak terbatas.

Budaya media seperti wacana politik pembubaran desa *pakraman* turut mendirikan hegemoni berbagai kelompok dan proyek politis tertentu. Budaya media menghasilkan representasi yang berupaya membangkitkan persetujuan terhadap pandangan politis tertentu, membuat para anggota masyarakat melihat ideologi tertentu sebagai hal yang sudah ditakdirkan. Pernyataan ini memang telah disampaikan oleh Gubernur, yaitu bersifat ‘negatif’ dan membuat keresahan yang dirasakan sebagian masyarakat. Berbagai teks budaya populer mengalamiahkan pandangan ini dan turut menggerakkan persetujuan terhadap pandangan politik hegemoni (Kellner,

2010: 81).

Pandangan budaya media *Bali TV* memosisikan dirinya sebagai media yang mengkritisi kebijakan pemerintah dalam hal ini Gubernur Bali Mangku Pastika. Pandangan ini menempatkan *Bali TV* sebagai media yang kritis dan terkadang mengandung misi untuk ‘menjatuhkan’ kekuasaan Gubernur. *Setting* dan *framing* pemberitaan *Bali TV* menurut Dewi Tika tidak mengandung misi untuk ‘menjatuhkan’ Gubernur. Melainkan memosisikan diri sebagai media yang bersikap kritis terhadap program-program pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat Bali.

“*Bali TV* memiliki *setting* dan *framing* pemberitaan yang selalu kritis namun memberi solusi bagi pembangunan kebudayaan masyarakat Bali. Tanpa ada keinginan untuk ‘menjatuhkan’ Gubernur. Pemberitaan *Bali TV* berpihak pada kepentingan masyarakat Bali untuk pembangunan budayanya (Wawancara, 13 Desember 2013).

Faktor budaya media menempatkan *Bali TV* pada posisi signifikansi kritis media sebagai pembentuk nilai budaya dan moral (Tester, 2003: 61). Budaya media adalah budaya industri, yaitu nilai-nilai ekonomi menjadi pertimbangan dalam pembentukan sebuah produksi budaya media. Selain kritis, bahkan “menjatuhkan” *Bali TV* juga menayangkan iklan dalam pemberitaannya. Iklan merupakan budaya media yang memiliki pengaruh dominan dalam pembentukan opini publik. Iklan sebagai budaya media ekonomi kapitalis yang mampu men-*setting* dan men-*framing* sesuai dengan kepentingan ideologi media, bahkan ideologi pemilik media tersebut.

### **Faktor Politik**

Wacana pembubaran desa *pakraman* sangat kental unsur politik terbukti sebagai wacana dominan dan wacana lainnya terpinggirkan dalam waktu cukup panjang. Nuansa politisnya

bahkan bersambung sampai pada Pemilihan Gubernur Bali 2013, di mana *Bali Post* dan KMB mendukung calon AAN Puspayoga, seteru Mangku Pastika. *Setting* berita *Seputar Bali* narasumbernya dipilih selektif yang mendukung opininya dan hasil wawancaranya diedit di-*framing* mengkritisi Gubernur Bali. Wacana Pembubaran desa *pakraman* isu yang diwacanakan untuk mempengaruhi khalayak pemirsa Bali.

Marxisme klasik menyalahkan kepemilikan media bagi keburukan masyarakat. Dalam pemikiran ini isi media merupakan komoditas untuk dijual dipasarkan, dan informasi yang disebarakan diatur oleh apa yang akan diambil oleh pasar. Sistem ini merujuk pada operasi yang konservatif dan tidak berbahaya. Hal itu menjadikan jenis program tertentu dan saluran media tertentu dominan dan yang lainnya terpinggirkan (Littlejohn & Foss, 2009: 432--433).

Pemberitaan *Bali TV* menjadikan wacana pembubaran desa *pakraman* sebagai wacana yang dominan dan pemberitaan yang lainnya dipinggirkan selama satu bulan pada September 2011. Wacana tersebut menjadi komoditas ekonomi dan sekaligus menjadi kepentingan politis KMB. Ini menunjukkan adanya aspek kekuasaan dibalik kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi berita tersebut dalam wilayah ekonomi politik. Menurut Mosco (Halim, 2013: 4), ada aspek kekuasaan dibalik kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Penajaman ini mempertegas visi Mosco soal *social change* dan *historical transformation* dalam wilayah ekonomi politik.

Sistem produksi, distribusi, dan konsumsi berita *Bali TV* dalam konteks ekonomi politik bersentuhan dengan sejumlah hal termasuk pengetahuan sosial dalam 'memuaskan' kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan informasi media yang mengedepankan fakta dan data. Fakta dan data inilah diproduksi dan dikonstruksi oleh media di wilayah ekonomi politik yang rentan terhadap manipulasi. Manipulasi terjadi

akibat kepentingan ekonomi politik media yang didominasi oleh kekuasaan kapital.

Kekuasaan kapital pada media menjerumuskan media sebagai komoditas politik. Komoditas politik media terjadi ketika seluruh isi media menjadi komoditas, tidak hanya iklan, berita pun menjadi komoditas. Semakin jelas bahwa pesan yang diproduksi dan distribusikan media, bahkan dalam bentuk berita tak lain merupakan produk untuk menggelontorkan keuntungan sebesar-besarnya kepada pemilik modal. Dengan demikian, komodifikasi dapat diartikan sebagai kegiatan pengelola media dalam memperlakukan pesan sebagai komoditas yang dapat menyenangkan khalayak, mengundang pemasang iklan, dan memperpanjang bisnis media. Peraihan keuntungan adalah 'ideologi' komodifikasi di balik produksi, reproduksi, dan distribusi pesan media.

*Seputar Bali* merupakan tayangan berita populer *Bali TV*. Pemberitaannya *di-setting* terfokus pada wacana pembubaran desa *pakraman* yang sensasional. *Framing*-nya hanya menayangkan pernyataan 'spektakuler' sumber-sumber berita yang sesuai dengan opininya yang dapat disebut menjadi komoditas. Berita *Seputar Bali* yang berjudul "Berjiwa Ksatria, Gubernur mestinya minta maaf", misalnya dalam *framing* berita tersebut ditayangkan pernyataan wawancara dengan akademisi Fakultas Sastra Unud I.B. Jelantik. Walaupun pernyataan Gubernur yang dibubarkan desa *pakraman* yang berkomflik itu (Kemoning-Budaga), tidak tertutup kemungkinan bahwa desa *pakraman* lain yang bermasalah juga dapat dibubarkan. Dalam berita tersebut disampaikan 'secara ksatria Gubernur meminta maaf atau *ksatria awirang*' oleh sumber *Bali TV*. Pernyataan narasumber *di-framing* sebagai pernyataan permintaan maaf Gubernur untuk masyarakat atas pemberitaan tersebut.

Berita *Bali TV* dengan *setting* dan *framing* Gubernur sebagai pemimpin ksatria harus minta maaf kepada desa *pakraman* (Gambar 6.2).



Gambar 6.2 Berjiwa Ksatria, Gubernur Mestinya Minta Maaf pada Desa *Pakraman*

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=8gVvgfJbFw8>)

Berita *Bali TV* dengan judul “Berjiwa Ksatria, Gubernur Mestinya Minta Maaf “ yang ditayangkan *Seputar Bali* merupakan hasil rekaman yang di-*framing* dengan memilih pernyataan Gubernur dan pernyataan narasumber oleh *Bali TV* dengan *setting* “semestinya Gubernur meminta maaf” pada desa *pakraman*. Visual berita ini menayangkan rekaman video pernyataan Gubernur yang di-*framing* pada meminta maaf, rekaman wawancara saat sidang Wakil Bupati Klungkung Tjok Gede Agung di Pengadilan Negeri Denpasar, dan rekaman wawancara dengan akademisi Unud I.B. DJelantik.

Rekaman pernyataan akademisi Unud I.B. DJelantik Sutanegara Pidada, seorang narasumber yang dipilih *Bali TV*. Ida Bagus DJelantik juga menulis di kolom *bahasa Bali* “*Kaki Dengkil*” di *Bali Post*. Di dalam tulisan itu dinyatakan

sebagai berikut.

“Yang mau dibubarkan kan Desa *Pakraman*, walaupun yang dua itu. Tapi ini tidak tertutup kemungkinan bisa Desa *Pakraman* yang lain bermasalah bisa dibubarkan jadi dalam hal sebenarnya karena ada kata itu secara faktual sebagai fakta keras secara nyata disampaikan itu juga Gubernur harus minta maaf kepada Desa *Pakraman* karena dia pernah mengucapkan pembubaran Desa *Pakraman*. Jiwa kesatria itu sebagai pemimpin harus ada kesatria *wirang* berjiwa ksatria memohon maaf kepada Desa *Pakraman*.”

Penjelasan berita *Bali TV* tersebut secara detail berkaitan dengan faktor ekonomi politik di bawah ini (Tabel 6.2).

No	Variabel	Keterangan
1	<b>Judul Berita</b>	Berjiwa Ksatria, Gubernur Mestinya Minta Maaf pada Desa <i>Pakraman</i>
2	<b>Durasi</b>	03.42 detik
3	<b>Opening</b>	Pernyataan Gubernur Bali
4	<b>Ilustrasi</b>	Wawancara Gubernur
5	<b>Intro (Lead)</b>	Kalau perlu dibubarkan yang itu
6	<b>Narasi</b>	Pernyataan Gubernur, Wabup Klungkung, dan IB DJelantik
7	<b>Wawancara</b>	IB DJelantik
8	<b>Wacana</b>	Gubernur minta maaf
9	<b>Jurnalis</b>	Widana dan Setiawan <i>Bali TV</i>

Tabel 6.2 Berjiwa Kesatria, Gubernur Mestinya Minta Maaf pada Desa *Pakraman*

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=8gVvgfJbFw8>)

Berita dengan durasi 03.42 detik dengan judul : Berjiwa Ksatria, Gubernur Mestinya Minta Maaf pada Desa *Pakraman*” merupakan reproduksi berita “Cok Rat, Mangku Pastika Jangan

Emosi”. Rekaman pernyataan Gubernur saat Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali. Rekaman tersebut berisi pernyataan Gubernur sebagai berikut:

“dievaluasi kembali keberadaan dua desa *pakraman*.

Kalau perlu, desa *pakraman* yang itu dibubarkan”

Kalimat tersebut sebagai *opening* berita. Narasi *Bali TV*.

Hal itu dipertegas dan dikuatkan kesaksian Wabup Klungkung Tjokorde Gede Agung pada persidangan pada 19 Juni 2012 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada saat itu dia mendampingi Gubernur Bali dan mendengar langsung pernyataan itu. Dia membenarkan bahwa Gubernur Bali memang pernah menyatakan pembubaran desa *pakraman*”. Rekaman pertanyaan hakim kepada Wabup Klungkung saat sidang seperti berikut ini.

”Saat pertama kali apa yang dibicarakan di ruangan tersebut?

***Jawaban Wabup Klungkung seperti di bawah ini:***

“Baik terima kasih jadi ketika Gubernur datang langsung saya melapor, Pak Gubernur saya sudah berusaha maksimal toh juga terjadi. Seperti itu saya melapor kepada Pak Gubernur akhirnya munculah beliau mengatakan ya udah kita bubarkan desa *pakraman* yang dimaksud saya tidak paham jadi saya diam”.

Narasi *Bali TV* :

“Dengan fakta-fakta tersebut akademisi Unud I.B DJelantik menilai sudah jelas-jelas Gubernur Bali pernah menyatakan pembubaran desa *pakraman*. Pernyataan itu juga dinilai menyakiti hati warga desa *pakraman*. Semestinya Gubernur Bali meminta maaf kepada desa *pakraman* dan mengakui kesalahan secara kesatria, bukan malah memutarbalikkan fakta dan mekambinghitamkan



*Bali Post* yang harus meminta maaf”.

**Dilanjutkan pernyataan I.B Djelantik sebagai berikut:**

”Yang mau dibubarkan desa *pakraman* walaupun desa *pakraman* hanya dua itu tapi, tidak tertutup kemungkinan desa *pakraman* yang lain bermasalah juga dibubarkan. Dalam hal ini sebenarnya karena ada kata itu secara faktual, sebagai fakta keras karena nyata disampaikan itu Gubernur harus minta maaf kepada desa *pakraman* bahwa dia pernah mengucapakan desa *pakraman*”.

*Bali TV* memandang fakta dalam pandangan kritis merupakan hasil pertarungan antara kekuatan ekonomi, politik dan sosial yang ada dalam masyarakat (Eriyanto, 2005: 32). Menurut pandangan ini, fakta yang dibentuk menjadi berita tidak merupakan cermin dan refleksi dari realitas. Itu disebabkan berita yang terbentuk cerminan dari kepentingan kekuatan pemilik media. Fakta dan peristiwa dapat di-*setting*, kemudian di-*framing* untuk memperkuat wacana yang dikembangkan oleh KMB. Hal ini dapat disaksikan bahwa pernyataan Gubernur dalam sidang Paripurna DPRD Bali tidak secara utuh disiarkan, tetapi hanya tentang permintaan maaf. Begitu juga pernyataan Wakil Bupati Klungkung dan akademisi Unud, semua di-*framing* dengan tujuan politik media.

Budaya secara politis juga meliputi pandangan untuk melihat bagaimana beragam artifak budaya media mereproduksi berbagai pergulatan sosial yang ada dalam berbagai citra, pertunjukan, dan kisah mereka (Kellner, 2010: 76). Pergulatan sosial dalam pertunjukan wacana pembubaran desa *pakraman* membawa kisah bahwa pernyataan tersebut memang terjadi dengan saksi-saksi dan narasumber yang menyatakan kebenaran berita tersebut. Saksi kunci *Bali Post* saat wawancara dengan Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gede Agung pascabentrok

Kemoning-Budaga tersebut. Media memang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan yaitu sumber berita ini terjadinya di pusaran kekuasaan.

Media terkait erat dengan kekuasaan dan membuka *cultural studies* kepada perubahan politik dan pertempuran sejarah. Media turut membentuk pandangan kita terhadap dunia, opini publik, nilai dan sikap, sehingga merupakan forum penting pergulatan kekuatan sosial (Kellner, 2010: 47). Pergulatan kekuatan yang dinyatakan Kellner terjadi pada perang opini antara KMB dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, yang berlangsung sebelum Pemilihan Gubernur 2013 dan sampai kepada ranah hukum. Informasi di media massa menjadi satu-satunya di antara hubungan budaya politik media. Budaya politik media yang dinyatakan oleh Maxwell E. McCombs dan Donald L. Shaw dalam artikel *The agenda setting function of mass media* seperti di bawah ini.

*“Most of what people know comes to them ‘second’ or ‘third’ hand from the mass media or from other people (Oliver Boyd-Barrett&Chris Newbold, 1995: 153).*

Terjemahannya:

“Hampir semua yang ingin diketahui orang berasal dari sumber kedua bahkan ketiga dari media massa atau orang lain” (Oliver Boyd-Barrett&Chris Newbold, 1995: 153).

Artinya sebuah berita yang diketahui oleh masyarakat telah melalui *framing* dan *editing* media berdasarkan ekonomi politik yang dianutnya. Pendekatan ekonomi politik melihat hubungan antara kepemilikan dan kekuasaan politik sebagai area pertarungan pengaruh dalam struktur dan hasil produk media.

Produk media dalam *cultural studies* dapat dinyatakan telah abai. Terutama terhadap pengembangan beragam strategi dan

praktik untuk melakukan intervensi media dan produksi media alternatif. Hanya ada sedikit pembahasan dalam lingkaran *cultural studies* seputar bagaimana radio, film, televisi, komputer, dan beragam teknologi media yang lain dapat diubah dan dimanfaatkan sebagai instrumen kemajuan dan pencerahan sosial. Demikian juga, mazhab Frankfurt tampaknya skeptik terhadap teknologi media dan memandangnya dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan kapitalis (Kellner, 2010: 454). Kecenderungan media dikendalikan oleh perusahaan kapitalis yang dinyatakan mazhab Frankfurt terjadi pada media setelah masa reformasi 1998 di Indonesia. Media tidak lagi menjadi kepentingan idealisme sebagai media yang mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Media telah dominan menjadi kepentingan ekonomi, bahkan menjadi kepentingan politik yang hanya dikuasai oleh pemilik modalnya. Halaman media lebih banyak dapat 'dibeli' dengan sumber berita yang bias dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ada juga kegagalan dalam *cultural studies* untuk memahami pentingnya politik media dan budaya. Pertanyaan muncul seputar siapa yang akan mengendalikan media pada masa depan dan perselisihan pendapat seputar akses masyarakat terhadap media. Selain itu, juga pertanggungjawaban dan keabsahan media, pendanaan dan pengaturan media, serta budaya. Jenis apa yang paling tepat untuk mengembangkan kebebasan individu, demokrasi, kebahagiaan, dan kesejahteraan demokrasi akan menjadi kian penting pada masa mendatang. Penyebarluasan budaya media dan teknologi memfokuskan perhatian pada pentingnya politik media. Di samping itu, juga kebutuhan akan intervensi masyarakat dalam perdebatan seputar masa depan budaya media dan komunikasi di tengah lalu-lalangnya informasi dan hiburan pada masa mendatang.

*Cultural studies* dapat jadi penting bagi proyek demokratis radikal, pendidikan media kritis mengembangkan warga negara dengan turut membantu membebaskan orang-orang dari manipulasi media, dan mampu mengkritik budaya media. Selain itu, mendapatkan informasi dari berbagai sumber berbeda, dan memungkinkan warga negara yang memiliki informasi membuat penilaian politis yang cerdas (Kellner, 2010: 459).

Penilaian politis yang cerdas diperlukan setiap warga negara dalam menilai media yang memanipulasi berbagai opini di masyarakat. Wacana pembubaran desa *pakraman* merupakan perdebatan media yang diduga oleh Gubernur memanipulasi peristiwa tersebut. Gubernur memerlukan media alternatif sebagai penyeimbang dalam menilai sebuah peristiwa dan kecerdasan masyarakat untuk tidak asal percaya tentang sebuah opini atau fakta dalam berita. Masyarakat perlu menyadari bahwa ekonomi politik media *Bali TV* merupakan perspektif tentang kekuasaan pemilik modal dan politik sebagai basis ekonomi dan ideologi industri media dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

### **Faktor Ideologi**

Ideologi merujuk pada ide tentang hakekat dan operasi kekuasaan dalam budaya dan masyarakat. Ideologi *Ajeng Bali KMB* sebagai wacana tunggal yang disosialisasikan kepada masyarakat Bali. Wacana pembubaran desa *pakraman* bertentangan dengan ideologi *Ajeng Bali KMB*. Akibatnya, setting dan *framing Bali TV* dengan mewawancarai narasumber yang mendukung ideologinya. Istilah ideologi merujuk pada ide-ide tentang hakikat dan operasi hubungan kekuasaan dalam budaya dan masyarakat. Ideologi juga merujuk pada berbagai kepercayaan dan nilai dominan yang diterima begitu saja (*taken for granted*). Isu kuncinya adalah tentang cara-cara berbagai aspek media berkontribusi terhadap kelangsungan pelbagai

kepercayaan dan nilai tersebut tanpa dipertanyakan (Burton, 2008: 17). Berbagai kepercayaan ideologi *Bali TV* dengan ‘*Ajeg Bali*’ sebagai wacana dominan yang hampir diterima oleh semua kalangan masyarakat Bali. Dapat dikatakan bahwa ‘*Ajeg Bali*’ merupakan ideologi yang disosialisasikan oleh KMB sebagai wacana tunggal dalam masyarakat Bali. Seluruh kalangan dari petani, artis, pegawai, pejabat, apalagi DPR menjadikannya jargon yang fasih disampaikan dalam obrolan di warung-warung, sampai sambutan resmi para pejabat pemerintahan sebagai informasi social yang kompleks yang mengandung kolaborasi antara faktor ekonomi, politik, dan ideologi.

Kolaborasi ekonomi, politik, dan ideologi dikemas dan disosialisasikan dalam berita *Bali TV* yang bukan hanya mekanisme sederhana untuk menyebarkan informasi, melainkan juga tetapi *Bali TV* merupakan organisasi kompleks yang membentuk institusi sosial masyarakat yang penting. *Bali TV* merupakan pemain utama dalam perjuangan ideologis. Sebagian besar teori komunikasi kritis berhubungan dengan media, terutama karena kekuatan media untuk menyebarkan ideologi yang dominan serta untuk mengungkapkan ideologi alternatif dan ideologi yang bertentangan. Bagi sebagian ahli teori kritis, media merupakan bagian dari sebuah industri budaya yang secara harfiah menciptakan simbol dan gambaran yang dapat menekan kelompok yang kecil (Littlejohn & Foss, 2009: 432). Media menyebarkan ideologi dari dorongan yang berkuasa dalam masyarakat sehingga menindas golongan-golongan tertentu.

Kekuasaan ideologi *Bali TV* sebagai industri budaya media yang berkuasa menanamkan ideologi kepada masyarakat Bali melalui opini pembubaran ‘desa *pakraman*’ yang di-*setting* dan di-*framing* sesuai dengan kepentingan ideologi KMB. Konsep ideologi yang penting di antaranya adalah pemikiran Althusser. Ideologi atau level suprastruktur dalam konsep Althusser adalah

dialektika yang dikarakteristikan dengan kekuasaan yang tidak seimbang atau dominasi. Lebih jauh Althusser mendefinisikan konsep ideologi sebagai praktik daripada ide atau gagasan. Dalam kondisi ideologi ini, media ditempatkan oleh Althusser sebagai (*ideological state apparatus* (ISA)). Salah satu hal penting dalam teori ideologi Althusser adalah konsepnya mengenai subjek dan ideologi. Pada intinya ideologi dalam pengertian Althusser selalu memerlukan subjek dan subjek memerlukan ideologi. Ideologi adalah hasil rumusan dari individu-individu tertentu (Eriyanto, 2005: 98-99).

Dalam *setting* pemberitaan *Bali TV* khalayak dijadikan objek pemberitaan dengan ideologi yang *di-framing* berupa pembubaran desa *pakraman*. Caranya dengan mencari subjek sebagai narasumber yang memiliki ideologi yang sama dengan *Bali TV*. Setelah diproduksi dalam bentuk berita, *di-framing* sesuai dengan ideologi *Bali TV* dengan kepentingan politis menyertainya. Berita *Bali TV* didistribusi dan dikonsumsi oleh khalayak sebagai subjek yang telah didominasi oleh kelas dominan dalam hal ini pemilik modal. Berikut berita *Bali TV* dengan *setting* mewawancarai narasumber yang memiliki ide sama dengan media tersebut dan *di-framing* sesuai dengan kepentingan, ideologinya, yaitu berita berdurasi 02.39 detik berikut di bawah ini (Gambar 6.3).



Gambar 6.3 Tanpa Desa *Pakraman*, Bali Hancur  
 Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=CzzHcBrxbtU>)

Inti berita *Bali TV* “Tanpa Desa *Pakraman*, Bali Hancur”, yang ditayangkan *Seputar Bali* tampil dengan *lead* berita sebagai berikut:

“Desa *Pakraman* merupakan benteng yang kuat dalam menjaga budaya Bali sehingga keberadaannya perlu diperkuat.”

Visual yang ditampilkan adalah Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Nyoman Suidiana dan rekaman video peristiwa bentrok Kemoning-Budaga. Data berita di bawah ini (Tabel 6.3).

No	Variabel	Keterangan
1	Judul Berita	Tanpa Desa <i>Pakraman</i> , Bali Hancur
2	Durasi	03.39 detik
3	Opening	Pernyataan I Gusti Suidiana
4	Ilustrasi	Wawancara I Gusti Suidiana, Kemoning-Budaga
5	Intro ( <i>Lead</i> )	Desa <i>Pakraman</i> tetap berdiri tegak

6	<b>Narasi</b>	Keberadaan desa <i>pakraman</i> membina bukan membubarkannya
7	<b>Wawancara</b>	I Gusti Sudiana
8	<b>Wacana</b>	Keberadaan desa <i>pakraman</i>
9	<b>Jurnalis</b>	Widana dan Juliana <i>Bali TV</i>

Tabel 6.3 Tanpa Desa *Pakraman*, Bali Hancur

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=CzzHcBrxbtU>)

Dalam pernyataan Ngurah Sudiana saat diwawancarai oleh *Bali TV* ditegaskan bahwa konflik di beberapa desa *pakraman* di Bali jangan sampai dijadikan alasan untuk menggoyahkan, apalagi membubarkan keberadaan desa *pakraman*". Salah satu strateginya adalah membuat kesadaran kepada khalayak bahwa wacana diterima *taken for granted*. Wacana dalam pendekatan ideologi media melalui wacana media mempersuasi dan mekomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang dimiliki, agar tampak absah dan benar. Ideologi dari kelompok media hanya efektif jika didasarkan pada kenyataan bahwa anggota komunitas termasuk yang didominasi menganggap hal tersebut sebagai kebenaran dan kewajaran. Menurut van Dijk, fenomena itu disebut sebagai "kesadaran palsu" bagaimana kelompok dominan memanipulasi ideologi kepada kelompok yang tidak dominan melalui kampanye disinformasi, melalui kontrol media, dan sebagainya (Eriyanto, 2005: 13).

Althusser juga mendefinisikan ideologi sebagai sebuah "representasi" tentang relasi imajiner individu-individu dengan kondisi *real* keberadaan mereka. Karakter imajiner relasi ini mengacu pada karakter ideologi yang menyebabkan suatu kondisi tidak terpersepsi tanpa distorsi. Efek ideologis ini tidak dapat dianggap berasal dari 'kesadaran palsu' atau kehendak untuk menipu oleh kelas dominan, tetapi terbentuk dari penyamaran yang tak terelakkan atas pelbagai realitas sosial



(Heck, 2011: 203). Penyamaran yang dilakukan *Bali TV* terhadap *setting* pemberitaannya adalah secara masif mengembangkan pemberitaan pembubaran desa *pakraman*.

Dalam analisis ideologis kita mesti melangkah pada level yang bersifat menstrukturkan dalam pesan-pesan itu, yakni pada level bagaimana suatu diskursus dikodekan, tidak hanya pada pelbagai bentuk permukaan pesan-pesan itu. Sebenarnya sedikit sekali ideologi berhubungan dengan ‘kesadaran’, bahkan ketika menganggap istilah ini mewakili makna yang tidak ambigu. Ideologi tak sadar, bahkan ketika ideologi mempresentasikan dirinya sendiri dalam bentuk yang dipikirkan (seperti dalam ‘filsafat’ pra-Marxis) (Heck, 2011: 204). Pemberitaan wacana pembubaran desa *pakraman* di *Bali TV* di-*setting* dan di-*framing* dengan ideologi kesadaran untuk tujuan politis. Tujuan politisnya adalah untuk menjatuhkan kredibilitas Gubernur dengan *angle* pembubaran desa *pakraman*.

Jadi ideologi adalah relasi yang dijalani antara manusia dan dunia mereka. Ideologi adalah kompleks bukan relasi sederhana, melainkan relasi antara pelbagai relasi, sebuah relasi tingkat kedua. Dengan demikian, ideologi ungkapan tentang relasi antara manusia dan dunia mereka, yakni kesatuan relasi *real* dan relasi imajiner (yang ditentukan oleh pelbagai faktor) di antara mereka dan kondisi *real* eksistensi mereka. Secara epistemologis dan konsep ideologi dinyatakan dalam Foucault *power/knowledge* (Barker & Galansinski, 2001: 66).

*“It is epistemologically untenable to counterpoise ideology to truth, so that the concept as we understand it is virtually interchangeable with the Foucauldian notion of power/knowledge. As such, ideology is constituted by discourse that have specific consequences for relations of power at all levels of social relationship (including the justification and maintenance of ascendant groups)”.*

Terjemahannya:

“Ideologi dibentuk oleh wacana yang diakibatkan oleh hubungan kekuasaan di segala tingkatan (termasuk kebenaran dan pemeliharaan kelompok kekuasaan). Dengan demikian, ideologi adalah struktur yang signifikan di antara hubungan sosial melalui kekuasaan. Ideologi dapat dipahami untuk mencoba memperbaiki makna tertentu untuk tujuan tertentu. Ideologi adalah wacana yang memberikan arti kepada objek material dan praktik-praktik sosial (Barker, 2001: 66).

Praktik-praktik sosial ideologi *Bali TV* melalui kekuasaan pemberitaan *Seputar Bali* membawa makna tertentu yang memberikan arti kepada khalayak dan hubungan-hubungan kekuasaannya. Hubungan kekuasaan berita televisi merupakan unsur penting karena memberikan kontribusi satu dari sedikit media yang orisinal. Berita diproduksi dan didistribusikan atas dasar realitas sosial atau fakta sebagai peristiwa yang tidak pernah direncanakan atau wacana yang sengaja dimunculkan dengan perencanaan. Wacana *Bali TV* sebagai wacana yang sebelumnya tidak disengaja atau direncanakan selanjutnya di-*setting* nara sumbernya dan di-*framing* hasil liputannya sesuai dengan kepentingan ideologi kekuasaan.

Berita *Seputar Bali* “Mediasi Gugatan Gubernur Bali kepada *Bali Post*”, “Berjiwa Ksatria, Gubernur Mestinya Minta Maaf”, dan Tanpa Desa *Pakraman*, Bali Hancur” mendukung proses pembentukan wacana pembubaran desa *pakraman* hasil liputan *Bali TV*. Faktor budaya media, politik, dan ideologi berhasil dalam proses dari agenda *setting* atau pemilihan narasumber yang diwawancarai dan hasilnya di-*framing*.

## BAB 9

# Wacana Tanding: Perlawanan Gubernur Bali Terhadap KMB

### **Konter dalam Berita *Bali Post* dan *Bali TV***

Berdasarkan *setting* pemberitaan KMB dan situasi yang dianggap kurang kondusif akibat pemberitaan pascabentrok Kemoning-Budaga, Gubernur, berusaha untuk menjaga situasi di masyarakat Bali. Usaha Gubernur diantaranya dengan mengadakan pertemuan dengan staf, jajaran tokoh masyarakat, dan agamawan. Mereka adalah Ketua *Dharma Adyaksa Parisada* Hindu Dharma Indonesia Pusat, *Shaba Walaka Parisada* Hindu Dharma Indonesia Pusat, Ketua *Sabha Pandita* PHDI Provinsi Bali, *Parisada* Hindhu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua Majelis Utama Desa *Pakraman* Provinsi (MUDP) Bali dan jajarannya. Di samping itu juga tokoh lainnya, seperti Ketua Majelis Madya Desa *Pakraman* Kabupaten/Kota se-Bali. Acara pertemuan itu bersama-sama melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap rekaman video pada 21 September 2011 di ruang rapat Praja Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali.

Rekaman video tersebut merupakan dokumentasi yang disaksikan oleh seluruh peserta rapat. Selain itu, juga dilakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi. Dari tayangan video tersebut dipastikan bahwa dalam pertemuan oleh Gubernur baik sebelum, selama, maupun sesudah kunjungan, Gubernur tidak pernah mengeluarkan pernyataan pembubaran desa *pakraman* yang kemudian ditulis sebagai berita utama oleh *Bali Post* dan *Bali TV*.

Pada pertemuan tersebut juga terungkap bahwa wartawan yang bertugas saat itu, yang seharusnya ada dan menurunkan beritanya, ternyata tidak ada di tempat. Wartawan tersebut berarti mengutip dari sumber lain yang kemudian diberitakan sebagai hasil liputannya. Wartawan tersebut tidak hadir saat membuat berita. Baik pada saat Gubernur bersama dengan rombongan bertemu dengan pejabat pemerintah Kabupaten Klungkung, maupun saat Gubernur membesuk korban di rumah sakit. Gubernur beranggapan bahwa wartawan tersebut tidak mendengar, tidak mengetahui, tidak mencatat, dan tidak merekam secara langsung peristiwa apalagi ucapan Gubernur. Di pihak lain wartawan *Bali Post* menyatakan bahwa hasil liputannya diambil saat Gubernur bertemu dengan Wakil Bupati Tjok Gede Agung sebagai saksi dalam persidangan.

Perspektif orisinalitas berita dari kinerja wartawan yang bersangkutan dianggap tidak benar oleh Gubernur. Gubernur beranggapan esensi berita tersebut tidak benar dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip kewajiban pers nasional, yaitu menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat. Bahkan, *setting* pemberitaan dengan tema yang sama. Tema itu tentang pembubaran desa *pakraman*, terus dikembangkan dan diterbitkan selanjutnya diberitakan dalam program *Seputar Bali* program berita *Bali TV* secara berturut-turut selama kurang lebih seminggu dan menimbulkan keresahan (Wahidin, 2012: 138).

Keresahan yang berkembang di masyarakat Bali direfleksikan dengan keluarnya Surat Edaran Majelis Utama Desa *Pakraman* Provinsi Bali No. 006/SE/MDP Bali/IX/2011, 22 September 2011, perihal pemberitaan tentang desa *pakraman*. Surat edaran itu ditujukan kepada *Bendesa* (madya desa *pakraman*) MDP Kabupaten/Kota se-Bali yang berisi pemberitaan mengganggu *paiketan/pakilitan krama* desa *pakraman*. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya pro kontra terhadap eksistensi

desa *pakraman* di Bali. Selain itu lebih meningkatkan suasana kondusif di tengah masyarakat adat Bali. Untuk itu dimohonkan segenap *prajuru* MDP beserta *karma* desa di Bali untuk tidak menyampaikan komentar ke media terkait (KMB) dengan pemberitaan tersebut (Wahidin, 2012: 140).

Sajian berita selanjutnya yang dianggap bermasalah oleh Gubernur adalah *Bali Post* melakukan '*pemelintiran*' berita menjadi berita tersebut tidak sebagaimana faktanya. Caranya dengan menurunkan berita seolah-olah Gubernur minta maaf terhadap kata-kata atau pernyataan tentang pembubaran desa *pakraman*. Padahal, Gubernur tidak pernah menyampaikan permintaan maaf dalam konteks pembubaran desa *pakraman* tersebut. Ihwal berita bermasalah ini muncul berdasarkan peristiwa dalam sidang paripurna di DPRD Provinsi Bali pada Senin 19 September 2011 yang dihadiri Gubernur Made Mangku Pastika. Pada sidang tersebut I Wayan Gunawan, anggota DPRD Provinsi Bali dari fraksi Golkar mengklarifikasi berita *Bali Post*, 19 September 2011. Atas klarifikasi itu Gubernur menyampaikan permintaan maaf karena belum membaca berita *Bali Post*, khususnya edisi 19 September 2011.

Berita wacana tanding Gubernur dan rekaman Gubernur saat sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali yang diunggah secara utuh tentang pernyataan Gubernur di bawah ini (Gambar 7.1).



Gambar 7.1 Klarifikasi Gubernur Bali terkait Pembubaran Desa *Pakraman*  
 Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=18w1FmH2M5E>)

Berikut data wacana tanding Gubernur yang hanya berisi pernyataan dalam sidang Paripurna DPRD Bali yang diunggah media *online Youtube* (Tabel 7.1).

No	Variabel	Keterangan
1	Judul Berita	Klarifikasi Gubernur Bali terkait Pembubaran Desa <i>Pakraman</i>
2	<b>Durasi</b>	00.30 detik
3	<b>Opening</b>	Pernyataan Gubernur Bali
4	<b>Ilustrasi</b>	Gubernur Bali
5	<b>Intro (Lead)</b>	Saya jelaskan, saya belum baca 6berita itu...
6	<b>Narasi</b>	-
7	<b>Wawancara</b>	-
8	<b>Wacana</b>	Wacana tanding Gubernur
9	<b>Jurnalis</b>	-

Tabel 7.1 Klarifikasi Gubernur Bali terkait Pembubaran Desa *Pakraman*  
 Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=18w1FmH2M5E>)

Permintaan maaf sebagaimana dikemukakan Gubernur bukan atau sama sekali tidak bersangkutan paut dengan pemberitaan membubarkan desa *pakraman*. Namun, Gubernur menyampaikan permohonan maaf karena belum atau tidak membaca berita *Bali Post*. Berikut pernyataan Gubernur secara lengkap yang di-*setting* dan diunggah dalam media *online Youtube* sebagai wacana tanding.

”Saya jelaskan, saya belum baca berita itu. Saya minta maaf belum baca yang menyatakan bahwa saya akan membubarkan semua desa *pakraman*. Tidak ada, saya tahu persis bahwa kita bersandar mengandalkan desa *pakraman* untuk mempertahankan adat, budaya, agama, dan sebagainya. Jadi, tidak mungkin saya akan membubarkan desa *pakraman*, tidak bisa bahkan tidak mungkin”.<sup>1</sup>

Gubernur beranggapan bahwa *Bali Post* telah memelintir fakta dengan menurunkan berita tersebut. Hal ini dibuktikan dengan rekaman gambar dan suara, saksi-saksi, dan tulisan media lain bahwa permohonan maaf Gubernur tidak terkait dengan pemberitaan wacana pembubaran desa *pakraman* tersebut.

Dimuatnya berita di *Bali Post* yang dianggap merugikan Gubernur, selanjutnya dibantah atau diklarifikasi Gubernur. Namun, sayangnya tidak digubris sebagaimana mestinya. Gubernur sebagai sumber utama berita merasa tidak pernah dikonfirmasi atas berita yang dianggap penting. Selanjutnya Gubernur mengirimkan somasi ke *Bali Post* sebagai wacana tanding yang substansinya hak jawab perihal pemberitaan pembubaran desa *pakraman*. Tidak hanya sampai pada somasi Gubernur juga mengadakan perihalnya kepada Dewan Pers, institusi yang mengurus kinerja jurnalistik. Dewan Pers kemudian mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi

<sup>1</sup> Berita ini diunggah di Yuoutube, link, <http://www.youtube.com/watch?v=18w1FmH2M5E>, Diakses 14 Agustus, 2012.

(PPR) Dewan Pers No. 09/PPR-DP/XI/2011 tentang pengaduan Gubernur Bali Made Mangku Pastika terhadap *Bali Post*.

Pengaduan Gubernur kepada Dewan Pers terhadap berita-berita harian *Bali Post* berjudul, “Gubernur: Bubarkan Saja Desa *Pakraman*” (19 September 2011), “Soal Pembubaran Desa *Pakraman*, Pemimpin Formal Jangan Ikut Emosional” (20 September 2011), “Gunawan Sesalkan Pernyataan Gubernur, Mangku Pastika Minta Maaf” (20 September 2011), “Desa *Pakraman* Bubar” (21 September 2011), dan “Desa *Pakraman* Dibubarkan” (22, 23, 24 September 2011). Dewan Pers telah melakukan pemeriksaan, terhadap pengaduan tersebut. Selain itu, juga meminta klarifikasi dan memediasi kedua belah pihak di Bali pada 9 Oktober 2011 dan di Jakarta pada 31 Oktober 2011 (Wahidin, 2012: 157).

Gubernur menyatakan bahwa rekomendasi Dewan Pers tersebut tidak lengkap hanya merujuk pelanggaran pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (menyatakan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi/memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah). Faktanya bahwa berita itu dianggap Gubernur diperoleh dengan cara-cara tidak benar, tidak layak sebagai sebuah profesi jurnalistik yang profesional.

Profesi jurnalistik yang profesional dibedah dalam seminar nasional bertema “Menegakkan Peran Pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Sospol) Universitas Warmadewa pada Jumat, 6 Januari 2012. Pembicara, yaitu I Gusti Putu Artha menyatakan seperti di bawah ini;

“Fenomena baru di era transisi demokrasi ini, sebuah realitas politik yang unik. Para pengusaha media tertarik terjun ke politik lantas menjadikan medianya sebagai alat propaganda politik. Sebaliknya, para politisi merasa berkepentingan membuat media baru untuk menjadi



corong propaganda politiknya. Saya ingin mengatakan bahwa sekat-sekat empat pilar kekuatan demokrasi telah makin kabur. Siapa yang berperan sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers, makin tak jelas. Orang pers juga jadi politisi sekaligus jadi pengusaha. Pengusaha juga berjabah politisi lalu buat media. Maka yang mulai terjadi adalah ruang publik yang harusnya bersih dari disinformasi, ruang publik yang harusnya jernih dari kontaminasi kepentingan pragmatis kecuali untuk informasi publik yang jernih, telah mengalami degradasi. Pada praktik teknisnya, orang susah memahami mana berita, mana iklan mana berita berbayar. Semuanya menjadi kabur atas nama kapitalisme media”.<sup>2</sup>

Komentar IGP Artha ini jelas menyebutkan bahwa adanya interest politik dari pemilik KMB dan menjadikan media massa miliknya untuk propaganda politik. Padahal, menurut Artha media massa harus objektif, bebas dari pragmatis politik pemilikinya.

Fenomena kapitalisme media merambah tidak hanya pada media nasional tetapi juga merambah pada media lokal. Media lokal memproduksi dan mendistribusikan wacana dan opini di daerah untuk menyampaikan informasi, berita berbayar, iklan, bahkan propaganda yang dibungkus dengan mengarahkan opini sesuai dengan kepentingan media tersebut. Fenomena dengan agenda *setting* kritis pada Gubernur dapat dibaca dengan jelas pada *setting* KMB (khususnya *Bali Post* dan *Bali TV*) sebagai media yang strategis dalam memengaruhi opini publik karena dominasinya.

Di pihak lain Gubernur Bali Made Mangku Pastika menerapkan ideologi kekuasaannya sebagai wacana tanding untuk membentuk citra sebagai pihak yang juga

2 Seminar Nasional “Menegakkan Peran Pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Warmadewa, Denpasar Provinsi Bali pada Jumat, 6 Januari 2012.

memperjuangkan kemerdekaan pers. Ia berupaya membentuk opini dengan kekuasaannya. Misalnya, pada sebuah pertemuan di Bank Indonesia Denpasar, acara ini dihadiri oleh kalangan masyarakat desa yang berpartisipasi pada acara desa wisata. Dalam sambutannya tentang desa wisata Gubernur Made Mangku Pastika menyelipkan ideologinya dengan mudah karena bertindak sebagai penguasa. Dia menyampaikan pernyataan yang terkait dengan konfrontasinya dengan *Bali Post* tetapi namun tak berkaitan dengan topik desa wisata. Berikut kutipan pernyataan Gubernur Pastika.

“Jangan percaya media yang satu itu (*Bali Post*, penulis). Media itu banyak bohongnya,” kata Gubernur Made Mangku Pastika pada acara penyerahan bantuan Bank Indonesia *Social Responsibility* di Bank Indonesia”, Denpasar, Jumat (16/12/2012).

Pernyataan serupa juga berulang-ulang kali disampaikan gubernur jika diwawancarai oleh wartawan. Ia dengan jeli memanfaatkan media untuk menyampaikan opini dan wacana tandingnya. Ia menyadari bahwa *Bali Post* tidak memberikan ruang baginya untuk melakukan bantahan, klarifikasi, apalagi wacana tanding. Media lainnya di Bali pun turut memanfaatkan momen persetujuan Gubernur dengan *Bali Post* untuk mendapatkan keuntungan. Baik itu keuntungan ekonomi dan bisnis berupa oplan maupun citra dari dampak pertarungan tersebut. Media lain berkesempatan merebut citra kepada Gubernur dan khalayak sebagai media yang independen, dan objektif di Bali. Media lainnya dengan jelas membuat konstruksi berita tentang pernyataan gubernur yang menyerang *Bali Post*. Pada berita di koran *Radar Bali*, dimuat pernyataan Gubernur Made Mangku Pastika yang menyerang *Bali Post*, Gubernur menyatakan koran itu (*Bali Post*) sudah semakin tendensius, menyedatkan dan provokatif... (*Radar Bali*, 16 Desember 2011).

Pada sebuah persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Gubernur Made Mangku Pastika juga memanfaatkan media lain sebagai wadah menyampaikan wacana tanding. Saat persidangan hadir sekelompok massa *Aliansi Korban Kesewenangan Bali Post*, yang mendukung Gubernur Made Mangku Pastika. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan menyindir *Bali Post*. Tulisan tersebut berbunyi “Kepada para tokoh Bali, hati-hati berkomentar, nanti bisa diplintir lho...!!” (*Radar Bali*, 20 Desember 2011).

Media lainnya juga melakukan konstruksi berita yang tampak pada pemilihan kutipan dari pernyataan Gubernur yang dimuat dalam *insert* berita. Hal ini tampak pada kutipan pernyataan Gubernur berikut ini.

“Berita tujuh hari ke belakang sebagai bukti, semakin nyata memang menyebarkan berita bohong tanpa konfirmasi. Ini menjadi dasar untuk kami pidanakan”. (*Radar Bali*, 16 Desember 2011).

Gubernur Made Mangku Pastika dalam lingkup pemerintahannya, juga melakukan wacana tanding dengan mengumpulkan seluruh stafnya menyampaikan klarifikasi terhadap isu-isu yang di-*setting* oleh KMB. Berikut klarifikasi Gubernur Bali mengenai kampanye hitam (*black campaign*) sebagai wacana tanding untuk menjawab isi-isu yang dikonstruksi sebagai berita oleh KMB, berita (Gambar 7.2).



Gambar 7.2 Klarifikasi Gubernur Bali mengenai *Black Campaign*  
 Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=18w1FmH2M5E>)

Inti berita Klarifikasi Gubernur Bali mengenai *Black Campaign* yang ditampilkan oleh Humas Pemerintah Provinsi Bali merupakan wacana tanding untuk menjawab wacana yang ‘menyerang’ Gubernur. Visual yang ditampilkan adalah pernyataan Gubernur di hadapan jajaran pegawai Pemerintah Provinsi Bali dengan ilustrasi rekaman isu-isu yang dijelaskan Gubernur.

Lebih jelasnya berikut data wacana tanding Gubernur Bali yang di-*setting* dalam pertemuan dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Tabel 7.2).

No	Variabel	Keterangan
1	Judul Berita	Klarifikasi Gubernur Bali mengenai <i>Black Campaign</i>
2	Durasi	04.07 detik
3	Opening	Bayak isu macam-macam di luar saudara-saudara
4	Ilustrasi	Gubernur Bali

<b>5</b>	<b>Intro (Lead)</b>	Klarifikasi toko <i>souvenir</i> Krisna
<b>6</b>	<b>Narasi</b>	-
<b>7</b>	<b>Wawancara</b>	-
<b>8</b>	<b>Wacana</b>	Wacana tanding Gubernur
<b>9</b>	<b>Jurnalis</b>	-

Tabel 7.2 Klarifikasi Gubernur Bali mengenai *Black Campaign*

Terkait dengan ‘perang’ wacana dalam memengaruhi opini publik dilakukan seminar Kajian Budaya Universitas Udayana dengan tema ”Budaya, Politik, dan Media”. Pada seminar ini dibahas ‘media tergoda politik’ yang dinyatakan oleh I Nyoman Wiratmaja seperti di bawah ini.

“Kalau sudah kemasukan ‘roh’ politik, sulit rasanya membayangkan masih ada kehidupan pers yang benar-benar mau menyampaikan informasi secara berimbang. Akibatnya, mulai diragukan pelaksanaan fungsi pers sebagai sarana informasi, komunikasi, edukasi, dan kontrol sosial. Selanjutnya, akan diragukan pula kemampuannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, termasuk diragukan pula sikap pers yang profesional, independen, objektif, dan berani melakukan proses kontrol terhadap segala bentuk penyimpangan di dalam masyarakat. Keraguan semacam ini bukannya tanpa alasan karena konsekuensi logis dari pers yang tergoda politik adalah keinginan untuk tampil atau menampilkan segala sesuatu yang menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya, dan sudah pasti ada keinginan untuk menonjolkan kekurangan ataupun kesalahan orang-orang atau kelompok lainnya yang dianggap lawan politik”.

Keraguan terhadap fungsi pers sebagai sarana informasi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, menyebabkan terjadi berita-berita yang menonjolkan kesalahan orang lain dan

menutupi keberhasilan lawan politiknya. Selanjutnya Wiratmaja mempertegas pernyataannya; seperti di bawah ini.

“Agenda *setting* politik berimplikasi pada pengabaian hak publik untuk memperoleh informasi yang jernih, kritis, dan bermakna. Media sekadar berfungsi menjadi corong alat propaganda para politisi maupun pemodal. Pers difungsikan sebagai *attackdog* kelompok tertentu dengan interes politik sangat kental, menjadikan pers dalam pemberitaannya menjadi sangat subjektif dan akan dijauihi masyarakat”.<sup>3</sup>

Hal ini ditegaskan oleh I Nyoman Wija, wartawan *Radar Bali* dengan makalah ‘Matinya Idealisme Jurnalis Budaya’. Wija menyatakan bahwa pada era kapitalis produksi berita dalam keredaksian media sosial cenderung terkooptasi dan terhegemoni beragam kepentingan politik, ekonomi, dan budaya. Hal itu dipicu oleh kapitalisme global yang dikonstruksi atas dasar tekanan dari kekuatan elite politik, penguasa pemangku kebijakan, dan pemodal atau pengusaha.<sup>4</sup>

Pemodal atau pengusaha pers sering kali mengabaikan jurnalisme fakta dan jurnalisme profesional. Terkadang karena memiliki kekuasaan pemodal *men-setting* berita menurut keinginan politiknya. Kenginan politik tidak hanya samar-samar dalam produksi pemberitaan. Melainkan sering secara terang-terangan menonjolkan pihak-pihak yang sesuai dengan kepentingannya. Bahkan menyerang pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan haluan ideologi politiknya.

Tak pelak berita dalam peristiwa sosial dikonstruksi media yang semestinya mengacu pada kinerja jurnalisme fakta

---

3 I Nyoman Darma Putra, I Gede Mudana, I Nyoman Wiratmaja, Seminar Kajian Budaya Universitas Udayana dengan Tema “Budaya, Politik dan Media”, Selasa, 24 Januari 2012, di Gedung Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus, Lt. II, Kampus Jl. Nias 13, Sanglah, Denpasar.

4 I Nyoman Wija, SE, Ak., M.Si. Jurnalis dan Fotografer sebuah Media Harian di Bali dan Aktivis Kordem Bali Pemerhati Sosial Budaya.

dan jurnalisme makna cenderung bias dan semakin karut-marut dan *absurd*. Hal itu terjadi karena jauh dari tatanan nilai kebenaran universal dan keadilan serta keadaban dari kemuliaan untuk memmanusiakan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Idealnya, para jurnalis pengusung idealisme kebebasan pers memiliki peran yang bermartabat dan agung serta paling mulia terhadap upaya menegakkan kebenaran universal dan keadilan, termasuk memmanusiakan manusia dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Kebebasan dan idealisme pers di Bali tergantung kepada pemilik modal media tersebut. Jika pekerja media tergantung kepada pemilik modal karena berkuasanya menentukan kesejahteraan pekerja pers, akhirnya pekerja pers hanya menjadi pekerja yang melayani pemilik modal. Pekerja pers tidak lagi dapat bekerja secara profesional memberikan produksi beritanya kepada kepentingan publik. Produksi berita yang dihasilkan hanya untuk kepuasan dan kepentingan pemilik modal. Produksi berita fakta yang diharapkan masyarakat terdistorsi oleh *setting*, *framing*, dan konstruksi media karena kekuasaan redaksi tidak lagi pada bagian redaksi, tetapi berada pada penguasa media.

Dalam konteks ini, khayalak publik sebagai konsumen media massa (pers) yang berhak atas produksi berita jurnalistik yang menganut jurnalisme fakta, realitas, dan jurnalisme makna yang objektif tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena dalam kenyataan pers justru tampil menjadi perangkat pengonstruksi realitas sosial budaya, untuk khalayak publik sebagai penikmat, pembaca, dan penonton. Artinya, menjadi semakin sulit untuk menemukan kebenaran hakiki dan keadilan dalam kenyataan yang bebas dari kepentingan politik dan ideologi dominasi media.

Kepentingan jurnalisme pemaknaan berupa reportase faktual yang memisahkan fakta dan opini seharusnya diproduksi

oleh media sebagai reportase interpretasi, reportase yang mendalam, investigatif, dan komprehensif menjadi semakin penting. Reportase yang bukan sekadar fakta menurut urutan kejadiannya, bukan fakta secara linier, melainkan fakta yang mendalam mencakup latar belakang, proses, dan riwayatnya. Dengan cara itu berita bukan sekadar informasi tentang fakta kejadian sebuah peristiwa, melainkan sekaligus menyajikan interpretasi tentang arti dan makna peristiwa tersebut.

Interprestasi peristiwa pascabentrok Kemoning-Budaga oleh *Bali Post* dengan ‘*angle*’ pembubaran desa *pakraman* menjadi wacana tanding Gubernur dengan diterbitkan buku karya Samsul Wahidin, dengan judul “Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers” Mengaca Perkara Made Mangku Pastika *versus Bali Post* editor I Ketut Ngastawa. Buku ini mengulas perspektif pers dan klarifikasi Gubernur terhadap pemberitaan pembubaran desa *pakraman* oleh *Bali Post* yang dinyatakan oleh Tjipta Lesmana pembedah buku sebagai produksi berita *Bali Post* yang ‘ngawur dan tendesius’.

“Berita *Bali Post* ada kemungkinan ada motif politik di pihak *owner* Pak Mangku Pastika dihantam terus-menerus karena saya mengikuti perpolitikan di Bali, ada indikasi Wagub mau naik menjadi Gubernur”.<sup>5</sup>

Proses komunikasi politik media secara teoretis merupakan mediator pemerintah berbicara dengan rakyatnya, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, pada era kapitalis sekarang ini media tidak puas hanya menjadi mediator, media ingin menjadi aktor politik. Aktor politik yang dimaksud adalah pada saat pemerintah menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan keinginan politik media, maka media akan membuang ke ‘tong sampah’ pernyataan tersebut. Sebaliknya, ketika pernyataan pemerintah sesuai dengan kepentingan politik media maka media tersebut

5 Lihat <http://www.youtube.com/watch?v=jnKZzQ34VcI>, diakses 28 Februari 2012



*mem-blow up* secara besar-besaran peristiwa tersebut. Inilah ciri media pada era ekonomi kapitalis menurut Lesmana. Yang benar seharusnya media wajib memberitakan hal-hal fakta dari peristiwa yang menjadi kepentingan masyarakat umum.

Kewajiban memberitakan dalam hubungan dengan pemberitaan *Bali Post*, yang digugat oleh Gubernur, Lesmana menyatakan bahwa sebagai berikut.

“Pemberitaan pembubaran desa *pakraman* sebagai berita yang ‘ngawur dan tendesius’ yang jelas ingin ‘menggorok’ karakter Gubernur. Kalau dibedah secara kritis, berita tersebut dapat dianggap salah, salahnya yang paling fatal adalah judul berita *Bali Post* ‘bubarkan desa *pakraman*’ di dalam *head line* dan di dalam tubuh berita tersebut tidak ada kutipan Gubernur yang lebih rinci yang menyatakan pernyataan tersebut.<sup>6</sup>

Produksi berita yang benar adalah ketika di judul menyatakan wacana pembubaran desa *pakraman*, seharusnya di *lead* atau di tubuh berita dirinci dan dikutip pernyataan Gubernur yang menyebutkan sebagaimana di judul tersebut. Hal inilah menurut Lesmana berita *Bali Post* ‘ngawur dan tendesius’. Seperti Berita yang memuat secara lengkap pernyataan Prof. Dr. Tjipta Lesmana sebagai inti berita di bawah ini (Gambar 7.3).



Gambar 7.3 Pernyataan Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=jnKZzQ34VcI>, diakses 28

Februari 2012.)

6 Lihat Pernyataan Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A, <http://www.youtube.com/watch?v=jnKZzQ34VcI>, diakses 28 Februari 2012.

Pemberitaan sampai pada klarifikasi Gubernur yang tidak pernah menyampaikan wacana pembubaran desa *pakraman* yang dimuat oleh berbagai Koran. Akan tetapi pihak *Bali Post* tidak pernah memuat pernyataan klarifikasi Gubernur jelas sekali unguap Lesmana *Bali Post* ingin ‘menggorok’ karakter Gubernur. Hal ini dapat dikatakan bahwa etika moral yang berkembang pada era kapitalis ini dilabrak oleh berbagai kepentingan masyarakat. Persoalan menjadi serius ketika etika dan moral dilabrak oleh komponen media. Hal ini menyebabkan produksi berita menjadi bias terkooptasi oleh penguasa media, masyarakat menjadi salah dan keliru memberikan masukan kebijakan publik dan masyarakat menjadi tidak kritis.

Di bawah ini diperjelas data berita pernyataan-pernyataan Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A. pada acara bedah buku sebagai wacana tanding Gubernur Bali (Tabel 7.3).

No	Variabel	Keterangan
1	<b>Judul Berita</b>	Pernyataan Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A
2	<b>Durasi</b>	04.07 detik
3	<b>Opening</b>	Banyak isu macam-macam di luar saudara-saudara
4	<b>Ilustrasi</b>	Gubernur Bali
5	<b>Intro (Lead)</b>	Jangan takut jalan terus-terus, media dikangkangi <i>owner</i> ekonomi bebas
6	<b>Narasi</b>	-
7	<b>Wawancara</b>	-
8	<b>Wacana</b>	Wacana tanding Gubernur
9	<b>Jurnalis</b>	-

Tabel 7.3 Pernyataan Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A.

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=jnKZzQ34VcI>, diakses 28 Februari 2012.)

Kelemahan yang lainnya awak media sebagai pekerja pers, yaitu ada beberapa reporter yang bekerja di lapangan tidak kritis dalam mengungkap fakta. Hal ini disebabkan oleh ada yang terkooptasi pemilik media dan kurang atau ‘malas’ belajar dan membaca. Lesmana mengutip ungkapan tokoh pers nasional Almarhum Rosihan Anwar, yaitu “wartawan harus selalu mengejar kebenaran dan keadilan”. Dalam memproduksi sebuah berita seorang reporter selalu mengejar kebenaran dan keadilan sebuah peristiwa. Kesalahan berikutnya jangan sampai mengungkap fakta sampai ditumpangi oleh kepentingan politik penguasa media.

Fakta yang diungkap seorang reporter dalam menulis fakta berita jangan disalahgunakan. Artinya, reporter hendaknya selalu mengutamakan kepentingan publik. Kepentingan publik yang dimaksud yaitu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak diperalat kepentingan politik mana pun. Reporter selalu bekerja berdasarkan ukuran profesionalisme bagi mereka yang mempunyai kompetensi, komitmen, wawasan, visi ke depan, sikap dan penampilan yang selalu sehat. Profesionalitas menunjukkan hubungan antara profesi dan profesional sebagai sebuah sikap yang seharusnya melekat pada pribadi yang menekuni atau yang menjalankan profesi jurnalis.

Pers era setelah reformasi 1998 merupakan pilar keempat demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, ada yang menempatkan dirinya di atas pilar lainnya yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kalau demikian siapa yang mengawasi pers. Bagi pers, yang mengawasi adalah masyarakat pers itu sendiri. Inilah letak kekeliruannya, bahwa pers atau siapa pun di negara Republik Indonesia berada di bawah hukum. Jadi, pers itu tunduk di bawah hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika dianggap telah terjadi pelanggaran di dalam pemberitaan *Bali Post* oleh Gubernur, bagaimana dalam pemberitaan pembubaran desa *pakraman* tanpa konfirmasi

oleh wartawan. Wartawan selalu beralasan yang menjadi *biang keroknya* adalah dikejar *dead line*. Hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk pemuatan sebuah berita tanpa konfirmasi. Ketika publik merasa dirugikan dan dipelintir oleh media dapat menuntut ke pengadilan untuk mencari keadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### **Kapitalisme Media Wacana Pembubaran Desa Pakraman**

Media massa pada era kapitalisme merupakan aktor politik yang produknya cenderung subjektif atau partisan. Dalam produksi berita, mereka cenderung memilih mana pernyataan yang dikembangkan dan mana pernyataan yang dibuang. Barker (2005:17) mengutip pandangan Marx, mengatakan bahwa kapitalisme adalah sebuah langgam produksi yang dilandaskan pada premis tentang kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Pembagian kelas yang mendasar dalam kapitalisme adalah antara mereka yang menguasai alat-alat produksi, yaitu kaum *borjuis* dan kaum *proletar*. Untuk bertahan hidup mereka harus menjual tenaga kerjanya karena tidak mempunyai modal lain. Kapitalisme bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan ini dicapai dengan cara memeras nilai tambah dari pekerja. Artinya, nilai yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menghasilkan suatu produk, akhirnya menjadi milik kaum *borjuis* juga lebih kecil dari pada nilai yang diterima pekerja sebagai upah.

Pandangan lebih tajam muncul dari Robert M.C. Chesney (dalam Hamad, 2004: 26). Dikatakan bahwa faktor kapital telah menjadi unsur yang esensial dalam sistem libertarian dan menciptakan fenomena konglomerasi media. Tak pelak, proses konstruksi realitas pun diselaraskan dengan pertimbangan-pertimbangan modal. Konstruksi realitas lazimnya dilakukan sedemikian rupa bilamana menyangkut kasus yang akan merugikan usaha atau relasi mereka.

Secara teoretis, media massa bertujuan menyampaikan informasi dengan benar secara efektif dan efisien. Pada praktiknya apa yang disebut kebenaran ini ditentukan oleh jalinan banyak kepentingan. Akan tetapi, di atas semua itu, yang paling utama tentunya adalah kepentingan kebenaran dan keadilan media itu sendiri, baik dalam pengertian bisnis maupun politis. Dalam kaitan ini kerap terjadi bahwa kebenaran institusi media menjadi acuan bagi kebenaran lainnya. Berdasarkan pendapat Sobur (2004: 111), diketahui bahwa faktor-faktor, seperti pemilik media modal dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang menentukan peristiwa apa saja yang dapat ditampilkan dalam pemberitaan dan ke arah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media diarahkan.

Akhirnya, pandangan Pareno (2005:11) seolah-olah memperoleh membenaran. Ia mengatakan bahwa fungsi media massa yang sedemikian ideal pada kenyataannya diperankan sebagai organ atau alat, baik oleh pengelolanya, alat penguasa maupun alat sekelompok orang. Sebagai alat pengelolanya, peranan media massa diarahkan semata-mata untuk memperoleh keuntungan komersial dan pengaruh melalui opini. Kapitalisme media yang semakin kuat dapat berpengaruh buruk pada perkembangan pers ke depan. Oleh karena itu, diperlukan aturan dan perundang-undangan yang dapat membatasi, mengayomi, dan memberikan solusi bagi perkembangan pers untuk kemaslahatan bangsa.

Berikut berita *Bali TV* sebagai peristiwa *simakrama* yang di-*setting* dan di-*framing* sebagai wacana baru untuk polemik dengan Gubernur (Gambar 7.4).



Gambar 7.4 Jawaban Gubernur Picu Polemik Baru

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=se8KrMzMYrM>)

Inti berita Seputar Bali dengan judul “Jawaban Gubernur Picu Polemik Baru” menunjukkan bahwa kapitalisme media seperti dikatakan Van Dijk merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok media. *Bali Post* dapat dikategorikan memiliki kekuasaan yang dapat digunakan untuk meraih kepentingan ekonomi dan politiknya. Selain berupa kontrol yang bersifat langsung dan fisik, kekuasaan juga dipahami oleh van Dijk berbentuk persuasif.

Media era kapitalisme merupakan aktor politik. Hal itu menyebabkan harus dipilih mana pernyataan yang dikembangkan dan mana pernyataan yang dibuang. Ini menjelaskan bagaimana *Bali TV dengan framing* judul “Gubernur Picu Polemik”, padahal dalam kutipan sumber Made Rimbawa tidak terdapat pernyataan “picu polemik”. Struktur berita ini terdiri atas tiga bagian. Pertama, pada struktur makro dapat diamati atau dilihat topik atau tema yang dikedepankan tema dalam berita ini adalah “jawaban Gubernur picu polemik baru”. Kedua, superstruktur wacana berhubungan dengan kerangka suatu teks berita. Kerangka teks berita “picu polemik baru” merupakan kerangka

yang di-*setting* untuk mencapai makna Gubernur sebagai pemicu polemik di masyarakat. Ketiga, pada struktur mikro makna wacana yang diamati adalah bagian kecil suatu teks, yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. “Polemik” merupakan pilihan kata yang menjadi judul berita ini walaupun dalam sumber tidak disebutkan sebagai “polemik”. Hal ini menjelaskan posisi wartawan dalam memproduksi teks berita melibatkan kognisi individu wartawan. Begitu juga gambar yang ditayangkan sebagai ilustrasi, Gubernur dalam peristiwa *simakrama* dan pernyataan Made Rimbawa sebagai gambar utama berita ini (Tabel 7.4).

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>Judul Berita</b>	Jawaban Gubernur Picu Polemik Baru
<b>2</b>	<b>Durasi</b>	02.35 detik
<b>3</b>	<b>Opening</b>	Ketua Majelis Desa <i>Pakraman</i> Buleleng
<b>4</b>	<b>Ilustrasi</b>	Simakrama Gubernur Bali
<b>5</b>	<b>Intro (Lead)</b>	Minimnya perhatian pemerintah terhadap desa <i>pakraman</i>
<b>6</b>	<b>Narasi</b>	<i>Bali TV</i>
<b>7</b>	<b>Wawancara</b>	Made Rimbawa
<b>8</b>	<b>Wacana</b>	Jawaban Gubernur Picu Polemik
<b>9</b>	<b>Jurnalis</b>	Pande Wismaya <i>Bali TV</i>

Tabel 7.4 Jawaban Gubernur Picu Polemik Baru

Sumber: (<http://www.youtube.com/watch?v=se8KrMzMYrM>)

Pemberitaan dengan judul “Jawaban Gubernur Picu Polemik Baru” berawal dari upaya *Bali TV* mem-*framing* pernyataan Ketua Majelis Desa *Pakraman* Buleleng Made Rimbawa sebagai visual berita utama berita ini dengan pernyataan berikut:

“Menimbulkan prediksi baru ini perlu diklarifikasi apakah kami yang dipanggil atau kami yang menghadap Gubernur”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa terjadi kesimpangsiuran informasi dan diperlukan klarifikasi terhadap pernyataan Gubernur. *Bali TV* dalam judul beritanya memilih frasa “picu polemik” sebagai pilihan kata yang memiliki makna terjadinya polemik di masyarakat akibat jawaban Gubernur. Dalam struktur mikro berita ini pilihan kata, kalimat dan gaya yang dipakai dalam teks mengandung politik berkomunikasi. Artinya, suatu cara untuk memengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, memperkuat legitimasi, dan menyingkirkan lawan atau penentang (Eriyanto, 2005: 227).

### **Disinformasi dalam Wacana Pembubaran Desa Pakraman**

*Bali TV* dan KMB dengan ideologi *Ajeg Bali* mempengaruhi bahasa menjadi disinformasi. Disinformasi adalah suatu kondisi informasi kehilangan kredibilitas karena tidak lagi mengungkapkan kebenaran (Piliang, 2005a: 223-224). Beberapa berita *Bali Post* dan *Bali TV* terkait dengan wacana pembubaran desa *pakraman* mengalami disinformasi, seperti “Bubarkan desa *pakraman* yang berkonflik” disinformasi bubarkan desa *pakraman* karena wacana ini tidak lagi merepresentasikan realitas. Dalam wacana tanding pembubaran desa *pakraman* juga terdapat agenda *setting* dan *framing* yang memiliki kepentingan kekuasaan dan ideologi. Melalui kekuasaan dan ekonomi yang dimiliki Gubernur juga melakukan wacana yang sama seperti yang dilakukan oleh *Bali Post* melalui simulasi media di luar KMB. Berita Gubernur: Bubarkan Desa *Pakraman* yang terbit di *Bali Post* dan dilanjutkan sore harinya dalam acara *talk show Bali TV* mendapat wacana tanding dari media di luar KMB, seperti *Bali Expres* dan *Warta Bali* dengan tema Bubarkan Desa *Pakraman* yang berkonflik. Tabel (7.5).



No	Informasi di luar KMB	Disinformasi KMB
1	Bubarkan desa <i>pakraman</i> yang berkonflik	Bubarkan desa <i>pakraman</i>
2	Saya mohon maaf karena belum baca	Minta maaf bubarkan desa <i>pakraman</i>
3	Somasi	Mengancam kemerdekaan pers

Tabel 7.5 Disinformasi wacana pembubaran desa *pakraman*

Dalam hal ini kedua belah pihak melalui media telah menampilkan simulasi, bukan realitas yang nyata, melalui media. Simulasi adalah penciptaan realitas media yang tidak lagi mengacu pada realitas di dunia nyata sebagai referensinya. Media dapat menjadi semacam realitas kedua yang referensinya adalah dirinya sendiri yang disebut simulakrum. Simulakrum tampil seperti realitas yang sesungguhnya, padahal ia adalah realitas artifisial, yaitu realitas yang diciptakan lewat teknologi simulasi. Pada tingkat tertentu realitas artifisial ini tampak sebagai lebih nyata dan dipercaya dari pada realitas sesungguhnya.

Kondisi realitas artifisial yang tampak lebih dominan menimbulkan informasi yang bias dari informasi yang berdasar atas fakta dan data. Media telah menciptakan khalayak budaya virtual yang dapat dibodohi yang tidak mampu memberikan respons terhadap berbagai produk dan aktivitas budaya yang tidak ditoleransi dan tidak distandardisasikan oleh industri media. Hal ini menjadi penegasan keberhasilan media merayu khalayak oleh aktor pengiklan. Informasi yang diserap oleh khalayak tanpa melalui filterisasi terlebih dahulu. Filterisasi yang dimaksud dalam wacana pembubaran desa *pakraman* oleh KMB belum dikonfirmasi kepada sumber kunci. Hal itu menyebabkan berita tidak berimbang.

Standardisasi media merupakan persoalan penting karena melalui media individu menjadi sadar terhadap berbagai kewajiban moral terhadap yang lain. Lebih jauh dapat ditegaskan

bahwa berkat nilai media, keprihatinan moral dan persoalan-persoalan moral diciptakan dan diekspresikan dalam situasi budaya modern. Moral di sini dalam pengertian filosofis. Dengan moral kita membedakan tentang yang benar dan yang salah. Dalam proses produksi berita, distribusi informasi wartawan berpegang pada moral dan mampu membedakan mana berita yang benar dan salah. Karena memiliki kepentingan politis dan ideologi, wartawan atau jurnalis mendisinformasi sehingga berita menjadi abu-abu. Berita abu-abu yang dimaksud adalah berita yang tipis antara kebenaran dan kesalahannya.

Di balik berita yang benar dan salah ada kepentingan yang lebih mendasar dari sebuah berita/wacana, yaitu kepentingan publik. Media seharusnya berperan menjadi ruang publik (*publik sphere*), justru dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan, ekonomi, politik, dan ideologi, baik oleh pemilik media maupun penguasa. Kepentingan di atas justru akan mengabaikan kepentingan publik itu sendiri.

Kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik dalam wacana tanding pembubaran desa *pakraman* menjadikan media Kelompok Media *Bali Post* tidak dapat netral, jujur, adil, objektif, dan terbuka. Akibatnya, informasi yang disuguhkan mengalami disinformasi oleh media dan menimbulkan persoalan objektivitas pengetahuan yang serius pada media itu sendiri. Kepentingan-kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik akan menentukan apakah informasi yang disampaikan oleh sebuah media mengandung kebenaran (*truth*) atau kebenaran palsu (*pseudo truth*); menyampaikan subjektivitas atau objektivitas; bersifat netral atau berpihak; merepresentasikan fakta atau memelintir fakta; menggambarkan realitas (*reality*) atau menyimulasi realitas (*simulacrum*). Publik dan masyarakat pada umumnya, berada di antara dua kepentingan utama media dan penguasa yang menjadikan mereka sebagai mayoritas yang diam, yang tidak mempunyai kekuasaan dalam menentukan informasi

di ranah publik milik mereka sendiri. Di satu pihak ranah publik dikuasai oleh politik informasi (*politics information*) atau politisasi informasi yang menjadikan informasi sebagai alat kekuasaan politik. Artinya, media menjelma menjadi perpanjangan tangan pemilik media untuk menguasai ruang publik. Di pihak lain ketika ia dikuasai oleh ekonomi politik informasi (*political economi of information*), informasi menjadi alat kepentingan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengeksploitasi publik, sebagai satu prinsip dasar dari kapitalisme (Piliang, 2004: 134).

Perbincangan mengenai media sebagai sebuah wacana tanding pembubaran desa *pakraman* tidak dapat dipisahkan dari saling berkaitannya antara bahasa yang digunakan di dalamnya, pengetahuan (*knowledge*) yang melandasinya, serta bentuk-bentuk kepentingan dan kekuasaan (*power*) yang beroperasi di balik bahasa dan pengetahuan tersebut. Bahasa pembubaran desa *pakraman* melandasi wacana dengan kepentingan mempengaruhi pengetahuan di masyarakat. Karena perbincangan mengenai media tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang membentuknya, pada akhirnya memengaruhi bahasa (gaya, ungkapan, kosakata, realitas) yang digunakan dan pengetahuan (keadilan, kebenaran, realitas) yang dihasilkannya. KMB dengan ideologi *Ajeg Bali* mempengaruhi bahasa menjadi disinformasi, seperti pernyataan Gubernur minta maaf belum membaca koran, menjadi permintaan maaf yang dihasilkan sebagai wacana.

### **Konflik Kepentingan dalam Wacana Pembubaran Desa *Pakraman***

Subjektivitas pemberitaan KMB dikaji oleh seorang pengamat yang kebetulan adalah staf Biro Humas Pemprov Bali. Analisisnya tampak memojokkan *Bali Post* dan menjadi atau memperkuat wacana tanding Gubernur Mangku Pastika.

Anom menulis artikel berjudul “Gagalnya Pembunuhan Karakter oleh *Bali Post*” di media online [www.balebengong.net](http://www.balebengong.net). Tulisan itu berdasarkan pengamatan selama enam bulan (September 2011-Mei 2012) hampir setiap hari *Bali Post* memuat berita pemerintah Provinsi Bali. Yang dimuat adalah Gubernur, program pembangunannya, para pembantu Gubernur dan permasalahan pembangunan. Rai Anom menyatakan bahwa berita tersebut sering tanpa konfirmasi. Selain itu, kapasitas narasumbernya dianggap tidak layak terbit di halaman satu. Berikut wacana *Bali Post* dan wacana Mangku Pastika oleh Rai Anom. (Tabel 7.6).

<b>No</b>	<b>Tgl</b>	<b><i>Bali Post</i></b>	<b><i>Non Bali Post</i></b>
1	20/9/11	Gunawan Sesalkan Pernyataan Gubernur, Mangku Pastika Minta Maaf ( <i>Bali Post</i> )	Keluh Kesah Gubenur ...Bentrok Kemoning v Budaga, Diinterupsi Dewan, Sesalkan Ada Media Memutarbalikkan Fakta ( <i>Bali Expres</i> )
2	20/9/11	Bubarkan Desa <i>Pakraman (Bali Post)</i>	Gubernur: Bantah Ingin Bubarkan Desa <i>Pakraman (Warta Bali)</i>
3		Bubarkan Desa <i>Pakraman (Bali Post)</i>	Pura Dalem Status Quo, Budaga dan Kemoning Gelar <i>Pengulap (Warta Bali)</i>

4	20/9/11	Bubarkan Desa <i>Pakraman (Bali Post)</i>	MASIH MENCEKAM Korban Bentrok Kemoning-Budaga, 1 Tewas, 44 Luka Tembak ( <i>Warta Bali</i> )
5	21/9/11	Bentrok Kemoning- Budaga Tersangka Jadi 11 Orang Konflik Desa <i>Pakraman</i> Membubarkan itu Memaknai Fungsinya ( <i>Bali Post</i> )	POLDA SEBUT BEKAS TEMBAKAN, Baru 1 Ditetapkan Tersangka Bentrok Kemoning- Budaga ( <i>Warta Bali</i> )

Tabel 7.6 Disinformasi wacana *Bali Post-Non Bali Post*

Pada wacana tanding Rai Anom menyatakan bahwa *Bali Post* terkesan mencari-cari materi dan kapasitas narasumber yang tidak layak terbit pada halaman satu. Judul berita tidak sesuai dengan isi, tidak berimbang, dan tanpa konfirmasi juga disebutkan dapat menyebarkan provokasi yang menjelek-jelekkan Gubernur. Dukungan wacana Rai Anom kepada Gubernur yaitu hak jawab telah dilakukan pada sidang DPRD Provinsi Bali, mendukung somasi, penganiayaan terhadap Mangku Pastika dan dukungan dari Aliansi Jurnalistik Indonesia. Walaupun harus diakui bahwa distribusi dan jangkauan opini Anom tidak seluas jangkauan media *Bali Post* dan *Bali TV*, apa yang disampaikan pantas dicatat sebagai penyeimbang informasi dalam konstruksi wacana yang pragmatis dari media utama di Bali.

Semestinya media merepresentasikan peristiwa-peristiwa secara objektif, jujur, adil, dan transparan. Akan tetapi, berbagai bentuk tekanan dan kepentingan ideologis telah menyebabkannya dapat terperangkap ke dalam politisasi media (subjektivitas, kepalsuan, ketidakadilan, dan keberpihakan) dan

hiperealisisasi media yang tidak menguntungkan publik (Piliang, 2004: 135).

Akibat kepentingan kekuasaan dan ideologi *Ajeng Bali* wacana tanding pembubaran desa *pakraman* di luar KMB sebagai politisasi media oleh Gubernur juga bersifat subjektif, tidak adil, dan berpihak. Menurut Gramsci, dominasi kekuasaan juga diperjuangkan lewat penerimaan publik (*public content*), yaitu diterimanya ide kelas berkuasa oleh masyarakat luas, yang diekspresikan melalui apa yang disebut sebagai mekanisme opini publik (*public opinion*) khususnya lewat televisi, Koran, dan sebagainya (Piliang, 2004: 136).

Pembentukan opini publik di ruang publik menjadi hal yang sentral dan dapat menjadi konflik opini antara Kelompok Media *Bali Post* dan Gubernur Bali. Media massa (bersama media massa tandingan) membentuk sebuah ruang tempat berlangsungnya perang bahasa atau perang simbol untuk memperebutkan penerimaan publik atas gagasan-gagasan ideologis yang diperjuangkan. Gagasan-gagasan ideologis wacana (*discourse*) mendapat tantangan dan tandingan lainnya (*counter discourse*) yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam wacana pembubaran desa *pakraman*.

Pareno (2005: 60--61) telah mengingatkan kecenderungan konflik kepentingan yang terjadi di kalangan pekerja pers ini terjadi pada pers di Bali, yaitu konflik antara Gubernur Bali dan Kelompok Media *Bali Post*. Pareno melihat bahwa sebagian besar para wartawan di Indonesia masih memiliki idealisme dan komitmen keberpihakan untuk menyuarakan kebenaran, kejujuran, keadilan dan mampu bersikap kritis. Barangkali wartawan mampu menepis "godaan" yang sifatnya material ketika menjalankan tugas. Namun, ketika menyangkut kepentingan perusahaan media tempat wartawan bekerja, konflik kepentingan pasti terjadi. Keterlibatan faktor-faktor produksi (manusia, modal, teknologi, dan kewirausahaan) dalam

perusahaan media massa menyebabkan wartawan juga berpikir tentang profit yang harus diperoleh perusahaannya. Hal ini karena menyangkut nasib wartawan tersebut dan keluarganya beserta ratusan pekerja lainnya.

Pareno (2005: 65--68) sebetulnya telah mengingatkan kecenderungan keberpihakan pers di Indonesia. Pers Indonesia, katanya, bagaikan manusia dengan seribu wajah. Ketidakberpihakan yang seharusnya menjadi paradigma pers kini telah berubah menjadi keberpihakan. Penegakan keadilan dan kebenaran yang diidam-idamkan oleh Joseph Pulitzer berganti dengan penegakan kepentingan yaitu hari ini menjadi "corong" kekuatan tertentu, besok menjadi "penyambung" lidah kekuatan lain. Kepentingan pragmatis pers yang mengedepankan orientasi ekonomi dan bisnis pada akhirnya bertemu dengan kepentingan pragmatis kekuatan politik dan/atau kekuasaan. Fenomena ini mendorong pers tergelincir dari posisinya semula yang seharusnya independen menjadi tidak independen lagi. Stasiun televisi, baik lokal maupun nasional pada tahun 2000-an telah menjadi corong, baik pemilik modal maupun koalisi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi dan ideologi yang sama.

Peringatan kepada pers juga dikemukakan Dennis McQuail (2005: 14-15). Ia menyebutkan empat prinsip utama jurnalisme yang meliputi bebas dan independen, tertib dan menciptakan solidaritas, keragaman dan objektivitas. Kebebasan dan independensi pers, menurut McQuail, berarti mendorong pers berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, artinya tidak tunduk pada kepentingan tertentu. Prinsip objektivitas menyangkut pemberitaan yang faktual dan tidak memihak.

Pemberitaan yang faktual dalam analisis wacana van Dijk, perhatian yang besar pada akses, bagaimana akses di antara tiap-tiap kelompok dalam masyarakat. Kelompok media memiliki akses dominan terhadap kelompok penguasa

apalagi masyarakat sebagai kelompok tidak berkuasa. Konflik Gubernur Bali dengan *Bali Post*, misalnya, memiliki akses yang besar dalam mewacanakan kepentingannya. Dengan berbagai kelompok media *Bali Post* dapat menentukan topik apa dan isi wacana apa yang dapat disebar dan didiskusikan kepada khalayak.

Topik yang disebar dan didiskusikan oleh staf kehumasan Pemprov Bali Gandita Rai Anom dengan khalayak melalui wacana tanding di *website* *balebengong.net* dengan judul “Gagalnya Pembunuhan Karakter melalui *Bali Post*”.<sup>7</sup> (Gambar 7.5). Dalam wacana Rai Anom isi topik ini adalah mengkritik *Bali Post*. Artinya, pada akhir berita tersebut masyarakat dapat berpendapat sesuai dengan opininya.



Gambar 7.5 *Web balebengong* “Gagalnya Pembunuhan Karakter melalui *Bali Post*”

Sumber: <http://www.balebengong.net/opini/2012/03/05/gagalnya-pembunuhan-karakter-melalui-bali-post>

Kritik Rai Anom terhadap *Bali Post* sebagai wacana tanding membela Mangku Pastika dapat dijelaskan (Tabel 7.7). Rai Anom menjelaskan dengan terperinci bagaimana *Bali Post* men-*setting*

<sup>7</sup> Lihat Gagalnya Pembunuhan Karakter Melalui *Bali Post*, <http://www.balebengong.net/opini/2012/03/05/gagalnya-pembunuhan-karakter-melalui-bali-post.htm>, diakses 23 Mei 2013.



dan men-*framing* berita-berita yang menyudutkan Gubernur Made Mangku Pastika. Wacana tanding Rai Anom mengamati selama enam bulan (September 2011-Mei 2012) yaitu bagaimana hampir setiap hari *Bali Post* memuat berita pemerintah Provinsi Bali. Yang dimuat adalah Gubernur, program pembangunannya, para pembantu Gubernur dan permasalahan pembangunan. Rai Anom menyatakan bahwa berita tersebut sering tanpa konfirmasi. Selain itu, kapasitas narasumbernya dianggap tidak layak terbit di halaman satu (Tabel 7.7).

No	Wacana oleh Rai Anom mengkritik <i>Bali Post</i>	Wacana oleh Rai Anom mendukung Mangku Pastika
1	Materi terkesan dicari-cari	Memutarbalikan fakta
2	Kapasitas kredibilitas narasumber	Narasumber dipertanyakan
3	Prinsip keberimbangan	Tidak seimbang
4	Bubarkan desa pakraman	Judul kontradiktif
5	Somasi	<i>Bali Post</i> minta maaf
6	Berita bohong	Berita tanpa konfirmasi
7	Belum menyampaikan hak jawab	Hak jawab sidang DPRD Bali
8	Menjelek-jelekkan Gubernur	Menebar provokasi
9	Berita propaganda	Mengancam kemerdekaan pers
10	Perusakan reputasi Bali Mandara	Proses hukum
11	Sidang mediasi SN tidak hadir	Sidang mediasi MP hadir
12	<i>Bali Post</i> tidak profesional	Simpaty Mangku Pastika teraniaya
13	Kemerdekaan pers	“Penganiayaan” terhadap MP
14	Media pembuat berita “bohong” melanggar KEJ	Proses hukum dukungan luas

15	Autokritik pemilik modal	Dukungan AJI
16	Ternyata tidak tepat	Menganggap semua berita benar

Tabel 7.7 Wacana *Bali Post* dan Wacana Mangku Pastika oleh Rai Anom

Sumber: [http://:www.balebengong](http://www.balebengong)

Pada wacana tanding Rai Anom menyatakan bahwa *Bali Post* terkesan mencari-cari materi dan kapasitas narasumber yang tidak layak terbit pada halaman satu. Judul berita tidak sesuai dengan isi, tidak berimbang, dan tanpa konfirmasi juga disebutkan dapat menyebar provokasi yang menjelek-jelekkan Gubernur. Dukungan wacana Rai Anom kepada Gubernur yaitu hak jawab telah dilakukan pada sidang DPRD Provinsi Bali, mendukung somasi, penganiayaan terhadap Mangku Pastika dan dukungan dari Aliansi Jurnalistik Indonesia.

# Bab 10

## Epilog

Berkaca pada kasus atas liputan *Bali TV* mengenai wacana pembubaran desa *pakraman* pascabentrok Kemoning-Budaga maka penulis dalam menyimpulkan tiga point utama yakni:

**Pertama**, proses pembentukan wacana pembubaran desa *pakraman* terjadi karena *framing*, agenda *setting* *Bali TV*. Adapun proses produksi pembentukan wacana pembubaran desa *pakraman* terjadi karena usaha *Bali TV* mendelegitimasi Gubernur Bali melalui *framing*, dan agenda *setting* secara berkelanjutan wacana pembubaran desa *pakraman*. Direproduksi wacana pembubaran desa *pakraman* mengandung pertarungan antara ideologi kekuasaan media dan kekuasaan penguasa. Kedua ideologi ini saling bersaing memenangkan opini publik. Opini publik menjadi terbelah ada yang mendukung *Bali TV* dan Gubernur Bali.

Kekuasaan *Bali TV* memproduksi wacana pembubaran desa *pakraman* dengan memilih narasumbernya yang mendukung ideologinya. Sebaliknya kekuasaan Gubernur Bali untuk memenangkan opini publik dengan mendatangkan pakar komunikasi nasional seperti Tjipta Lesmana sebagai konter wacana yang di-*setting* dalam acara seminar dan bedah buku yang juga diliput media local secara luas.

**Kedua**, faktor-faktor yang mendukung proses pembentukan wacana pembubaran desa *pakraman*, yaitu faktor budaya media, ekonomi-politik, dan ideologi. Menariknya, faktor-faktor yang mendukung proses pembentukan wacana pembubaran desa *pakraman* yang membuat posisi Gubernur dipertanyakan secara

luas terjadi karena proses-prosesnya yang dipilih selektif, hasil wawancara (narasi) dan gambar (visual) di-*framing*. Judul berita dengan teks yang *superlative* (berlebih-lebihan) seperti “Cok Rat Mangku Pastika Jangan Emosi”, “Komitmen Gubernur Jaga Bali Dipertanyakan”, “Berjiwa Ksatria, Gubernur Mestinya Minta Maaf”, yang tidak mencerminkan peristiwa atau realitas yang tidak akurat.

Terjadi persaingan opini antara Gubernur dan *Bali TV* memperebutkan simpati dan dukungan masyarakat Bali. Gubernur menyangkal tidak pernah menyatakan pembubaran desa *pakraman*. *Bali Post* menyatakan sebaliknya dengan menampilkan sumber Tjok Gede Agung. Itu berarti bahwa terjadi wacana yang bersaing memperebutkan dukungan atas opini wacana pembubaran desa *pakraman* yang berbeda, terbelah, dan saling bertolak belakang. Hal itu terjadi karena tiap-tiap pihak memandang sebuah peristiwa dengan *angle* yang berbeda.

**Ketiga**, wacana tanding Gubernur Bali Mangku Pastika memanfaatkan lembaga kehumasan Pemprov Bali dan media di luar KMB, seperti *TVRI*, *Radar Bali*, *Bali Expres*, dan *Warta Bali*. Tidak satu pun koran ini menyatakan pembubaran desa *pakraman*. Wacana tanding ini dilakukan Gubernur Bali Mangku Pastika terhadap konstruksi wacana pembubaran desa *pakraman*. Kontruksi wacana yang dibentuk oleh *Bali Post* ini demikian kuat dan kritis. Kondisi ini menyebabkan Gubernur Made Mangku Pastika merasa dipojokkan. Posisi itu mendorong Gubernur Bali menempuh berbagai cara mulai dari menggunakan hak jawab, menuntut *Bali Post* secara hukum, dan menciptakan wacana tanding untuk meluruskan pemberitaan KMB yang dianggap tidak sesuai dengan fakta. Wacana tanding ini dilakukan dengan memanfaatkan media di luar KMB, seperti *TVRI* Bali, *Radar Bali*, *Bali Expres*, dan *Warta Bali*. Gubernur juga melakukan pertemuan dengan

tokoh-tokoh masyarakat. Pertemuan itu untuk mengklarifikasi peristiwa dengan melakukan pemutaran video rekaman sidang Paripurna di DPRD Bali dan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa bentrok Kemoning-Budaga.

Beberapa temuan penelitian dari kasus ini antara lain wacana pembubaran desa *pakraman* liputan kasus pascabentrok Kemoning-Budaga, Klungkung di *Bali TV* merupakan perpanjangan dari wacana media cetak *Bali Post* yang dikelola dengan agenda *setting* yang jelas untuk kepentingan sosial, politik, dan ideologi *Ajeng Bali KMB*.

**Pertama**, liputan berita yang tidak objektif dan yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik akan menyajikan misinformasi dan dapat meresahkan masyarakat. Analisis atas apa yang terjadi seputar liputan wacana pascabentrok Kemoning-Budaga Klungkung oleh *Bali TV* dan juga media massa KMB menunjukkan kerja jurnalistik yang kurang profesional dan tidak objektif karena menggabungkan fakta dan opini. Wartawan *Bali Post* dan jurnalis *Bali TV* tidak melakukan konfirmasi dengan sumber kunci Gubernur Made Mangku Pastika yang dikutip pernyataannya. Praktik seperti ini disalahkan oleh Dewan Pers karena sebagai sebuah kewajiban sebagaimana diatur pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

**Kedua**, kerja pers yang tidak profesional dapat menimbulkan serangan balik kepada pers melalui wacana tanding dan bahkan bentuk tuntutan hukum. Ketika merasa dipojokkan dengan pemberitaan yang tendensius tentang pembubaran desa *pakraman*, Gubernur Bali Made Mangku Pastika berusaha melakukan wacana tanding dengan menggunakan media massa di luar *Bali Post*, *Bali TV* dan KMB. Selain itu, dia juga menuntut *Bali Post* ke pengadilan. Meski dalam proses hukum ini Mangku Pastika tidak menang, tetapi langkah yang diambil memberikan pelajaran kepada pers untuk selalu bekerja profesional dan kepada masyarakat bahwa pers tidak selalu memberitakan

fakta secara objektif.

Akhirnya belajar dari kasus ini penulis merekomendasikan beberapa hal, antara lain: **pertama**, saran untuk pengelola media agar bekerja secara profesional yang sesuai dengan penerimaan publik yang dijadikan masyarakat konsumennya. Apabila tidak sesuai dengan penerimaan publik, akan terjadi konflik antara media dan penguasa atau masyarakat. Konflik ini menjadi kontraproduktif bagi perkembangan dan pembangunan media sebagai pilar demokrasi.

**Kedua**, saran untuk masyarakat dan tokoh masyarakat diharapkan lebih kritis membaca isi berita. Di samping itu, juga memahami konstruksi realitas terhadap wacana televisi. Hal itu penting karena praktik wacana yang dilakukan tim redaksi sebuah program televisi juga merupakan kegiatan konstruksi peristiwa. Konstruksi program berita cenderung dilakukan oleh televisi lokal dan nasional. Tokoh-tokoh masyarakat yang diwawancarai menjadi narasumber diharapkan lebih kritis (berdasarkan data dan fakta) dalam berkomentar dan mengerti persoalan yang dibahas. Artinya berkomentar yang tidak mendukung kepentingan tertentu. Di samping itu, diharapkan hati-hati mengeluarkan pendapat.

**Ketiga**, saran untuk pemerintah dalam menghadapi konflik dengan pers agar arif dan bijaksana karena memiliki peran strategis menjadi pembina masyarakat pers. Pembinaan tersebut berupa peningkatan kualitas SDM wartawan atau jurnalis melalui program-program peningkatan kompetensi dalam memproduksi berita. Peningkatan profesionalisme lembaga pers melalui pendidikan atau pelatihan standar kompetensi wartawan yang difasilitasi pemerintah.

# DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben. 2006. *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Allen, C. Robert. 1992. *Channels of Discourse, Reassembled*. London: Routledge.
- Ang, Ien. 1996. *Living Room Wars*. London: Routledge.
- Ardianto, Elvinaro & Lukiati Komala & Siti Karlinah. 2007. *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosia Rakatama Media.
- Artha, I Gusti Putu. 2009. *Konspirasi Media dengan Kandidat Pilkada*. Denpasar: Arti Foundation.
- Atmadja, Nengah Bawa. 2010. *Ajeg Bali, Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LkiS.
- Awuy, T.F. 2003. *Sisi Indah Kehidupan; Pemikiran Seni dan Kritik Teater*. Jakarta: Gd PKJ Taman Ismail Marzuki.
- Azpíroz, Maria Luisa. 2013. *Framing as a Tool For Mediatic Diplomacy Analysis: Study of George W. Bush's Political Discourse in The War on Terror*. Communication & Society Sociedad: Vol. 26.n.2.pp.176–197. ISSN 0214-0039
- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana.
- Baidhawiy, ed. Zakiyuddin. 1997. *Wacana Teologi Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakker, SJ J.W.M. 1984. *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Barker, Chris and Dariusz Galasiński. 2001. *Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity*. London. New Delhi: Sage Publication. Thousand Oaks.
- Barker, Chris. 2004. *Culture Studies, Teori dan Praktik*. London: SAGE Publication.

- Barret, Oliver Boyd & Chris Newbold. 1995. *Approaches to Media, A Reader*. London: Oxford University Press Inc.
- Brooks, Ann. 1997. *Posfeminisme & Cultural Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Budiman, Kris. 2005. *Ikonisitas: Semiotika Sastra dan Seni Visual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budyatna, Muhammad. 2009. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2008. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Burton, Graeme. 2008. *Yang Tersembunyi di Balik Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Burton, Graeme. 2011. *Membincangkan Televisi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Chaer, Abdul. 2010. *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Chandler, Daniel. 2007. *Semiotic: The Basic*. USA and Canada: Routledge.
- Coleman, Renita and H. Denis Wu. 2010. *Proposing Emotion As A Dimension of Affective Agenda Setting: Separating Affect Into Two Components and Coparing Their Sccond-Level Effects*. *Journalism and Communication Quarterly*. Summer: 87.2. Proquest. Pg. 315--327
- Covarrubias, Miguel. 2013. *Pulau Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Croteau, David dan William Hoynes. 2003. *Industries, Image, and Audiences: Media Society 3<sup>rd</sup> edition*. California: Pine Forge Press.
- Danesi, Marcel. 2010. *Pengantar Memahami Semiotika Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Davis, Howard & Paul Walton. 2005. *Audience Analysis*. London: SAGE Publications Thousand Oaks.



- Davis, Howard & Paul Walton. 2010. *Bahasa, Citra, Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Descartes, Rene. 2012. *Diskursus & Metode*. Jogjakarta: IRGiSoD.
- Dosi, Eduardus. 2012. *Media Massa dalam Jaring Kekuasaan*. Flores NTT: Penerbit Ledalero.
- Edkins, Jenny & Nick Vaughan-Williams. 2010. *Teori-Teori Kritis*. Yogyakarta: Penerbit Baca.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Eriyanto. 2013. *Analisis Naratif: Dasar-Dasar Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fachruddin, Andi. 2011. *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fairclough, Norman. 2009. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*. Sydney: Macquarie University
- Fiske, John. 2007. *Culture and Communication Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Foucault, Michel. 1978. *Arkeologi Pengetahuan*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/ Pengetahuan*. Jogjakarta: Bentang Budaya.
- Guy, Cook. 1994. *The Discourse of Advertising*. London and New York: Routledge.
- Halim, Syaiful. 2013. *Postkomodifikasi Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hall, Stuart. 1997. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications Ltd.

- Hall, Stuart. 2011. *Budaya, Media, Bahasa*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Hartley, John. 2012. *Communication, Cultural & Media Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hartono, Iman Dudi. 2012. *Infotainment: Proses Produksi dan Praktik Jurnalistik*. Jakarta: @kademia.
- Hoed, H. Benny. 2011. *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ibrahim, Idi Subandy. 2011. *Kritik Budaya Komunikasi: Budaya, Media, dan Gaya Hidup dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Jauhari, Haris. 2012. *Jurnalisme Televisi Indonesia: Tinjauan Luar Dalam*. Jakarta: KPG.
- Kellner, Douglas. 2010. *Budaya Media: Cultural Studies, Identitas, dan Politik antara Modern dan Postmodern*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Klaus, Bruhn Jensen & Nicholas W. Jankowski. 1991. *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*. London: Routledge.
- Klaus, Bruhn Jensen. 2002. *A Handbook of Media and Communication Research, Qualitative and Quantitative Methodologies*. London: Routledge.
- Klaus, Bruhn Jensen and Nicholas W. Jankowski. 2003. *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*. London: Routledge.
- Lacan, Jacques. 2009. *Diskursus dan Perubahan Sosial: Pengantar Kritik Budaya Psikoanalisis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Lee, Martyn J. 2006. *Budaya Konsumen: Terlahir Kembali*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Littlejohn, Stephen W. Laren A. Foss. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mabruri, KN Anton. 2013. *Manajemen Produksi Program Acara TV*. Jakarta: Grasindo.
- Mahmoodoghli. et al. 2013. *Using Discourse Theory for Analysis Social Text and Context of Thought. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. May: Vol. 3, No.5.
- McQuail, Denis. 1997. *Audience Analysis*. London: SAGE Publications Thousand Oaks.
- McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mișcoiu, Sergiu. 2009. *Against All The Others! A Study of Marginal Constestation in Romania Based on Discourse Theory*. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Studia Europaea: Liv, 4.
- Morissan. 2008. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta: Kencana.
- Morissan. 2010. *Teori Komunikasi Massa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Morley, David. 1992. *Television, Audience & Cultural Studies*. London: Routledge.
- Moriarty, Sandra, Nancy Mitchell, William Wells. 2011. *Advertising*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mosco, Vincent. 2010. *The Political Economy of Communication*. California: SAGE.
- Nordholt, Henk Schulte. 2005. *Bali Benteng Terbuka*. Jakarta: Pustaka Larasan.
- Perti, Alasutari. 1999. *Rethinking The Media Audience, New Media: Introduction Three Phases of Reception Studies*. London: Sage Publications.
- Piliang, Yasraf Amir. 2003. *Hipерsemiotika: Tafsir Cultural Studies atas matinya Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Piliang, Yasraf Amir. 2005 *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Piliang, Yasraf Amir. 2006. *Dunia yang Dilipat*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Putra, I Nyoman Darma. 2008. *Bali dalam Kuasa Politik*. Denpasar: Arti Foundation.
- Putra, I Nyoman Darma dan I Gede Pitana. 2011. *Bali: dalam Proses Pembentukan Karakter Bangsa*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Rodriguez, Agustin Martin G. 2012. *Marginalization and The Multiplicity of Rationalities A Discourse Theory of Poverty Teori in Action*. Vol. 5: No 2, DOI, 10.3798/tia.
- Rusbiantoro, Dadang. 2014. *Generasi MTV*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Santoso, Listiyono dkk. 2010. *Epistemologi Kiri*. Jakarta: AR-Ruzz Media.
- Shrum, L J. 2010. *Psikologi Media Entertainment*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Subiakto, Henry & Rachmad Ida. 2012. *Komunikasi Politik, Media, Dan Demokrasi*. Indonesia: Kencana.
- Stephen, W. Littlejohn. 1999. *Theories of Human Communication*. London: Wadsworth Publishing Company.
- Stephen, W. Littlejohn dan Karen A. Foss. 2008. *Teori Komunikasi: Theories of Human Communication*, 9<sup>th</sup> ed. Jakarta: Salemba Humanika.
- Storey, John. 1996. *Cultural Studies and the Study of Popular Culture: Theories and Methods*. Athens: University of Georgia Press.
- Sobur, Alex. 2009. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sparringa, Daniel. 2000. *Analisis Wacana: Teori dan Konsep Wacana*. Surabaya: Fisip Unair.

- Tamburaka, Apriadi. 2012. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tester, Keith. 2003. *Media, Budaya, dan Moralitas*. Yogyakarta: Juxtapose.
- Thawaites, Tony. Lloyd Davis & Warwick Mules. 2011. *Introducing Cultural and Media Studies: Sebuah Pendekatan Semiotik*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Tinarbuko, Sumbo. 2009. *Semiotika Komunikasi Visual*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wahidin, Samsul. 2012. *Dimensi Etika Dan Hukum Profesionalisme Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widminarko. 2013. *Widminarko Mandiri Belajar Sendiri*. Denpasar: Pustaka Tokoh.
- Wijana, Dewa Putu & Muhamad Rohmadi. 2011. *Analisis Wacana Pragmatik: Kajian Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Wija, I Nyoman. 2012. *Orasi Budaya Matinya Idealisme Jurnalis Budaya Bali*.
- Wirawan, I Komang Arba. 2008. "Komodifikasi Tubuh Perempuan Pada Kover Majalah *Playboy* dalam Masyarakat Konsumen di Kota Denpasar". Denpasar: Tesis Kajian Budaya.
- Wise. 2006. *Media Making: Mass Media in a Popular Culture*. London: Sage Publication.
- Zhou, Jianchuan. 2012. "A Textual Analysis of China's Image in The New York Times From 1966 to 1976". *Quarterly Journal of Chinese Studies*, 1(4), 17–29. ISSN, 2224–2716.

## Sumber Koran:

- Bali Ekspres*. 2011a. “Polda Anggap Prosedural, Pastika: Betara Kok Diperebutkan? 19 September 2011. Hlm 1 dan 11.
- Bali Ekspres*. 2011b. “Satu Tersangka, Ariaka Provokator, Perkembangan Bentrok Kemoning v Budaga, 20 September 2011. Hlm 1 dan 11.
- Bali Ekspres*. 2011c. “Keluh Kesah Gubernur Bali Made Mangku Pastika Soal Bentrok Kemoning v Budaga, Diinterupsi Dewan, Sesalkan Ada Media Memutarbalikkan Fakta” Hlm 1 dan 11.
- Bali Post*. 2012a. “Omong Kosong, Demokrasi Tanpa Kebebasan Pers”. 6 Januari 2012. Nomor 140 Tahun ke-64. Hlm 1 dan 15.
- Bali Post*. 2012b. “Perlu Sinergisitas Pecahkan Persoalan Bangsa”. 6 Januari 2012. Nomor 140 Tahun ke-64. Hlm 1 dan 15.
- Bali Post*. 2012c. “Ancaman Kemerdekaan Pers dari Bali”. 19 Juli 2012. Nomor 329 Tahun ke-64. Hlm 1.
- Bali Post*. 2012d. “Kutipan Pernyataan Gubernur Mangku Pastika pada Sidang DPRD Bali Menjawab Interupsi Wayan Gunawan pada 19 September 2011”. 19 Juli 2012. Nomor 329 Tahun ke-64. Hlm 1.
- Radar Bali*. 2011a. “Disuruh Damai, Pastika Malah Ingin Pidana”. 16 Desember 2011. Hlm 1 dan 35.
- Radar Bali*. 2011b. “Jalani Mediasi, Pastika Datangi PN Denpasar”. 20 Desember 2011. Hlm 1 dan 39.
- Warta Bali*. 2011a. “Masih Mencekam”, Gubernur Mestinyan Malu Rebutan Pura”. 18 September 2011. Hlm 1 dan Hlm 11.
- Warta Bali*. 2011b. “Polda Sebut Bekas Tembakan”, “Gubernur Bantah Ingin Bubarkan Desa *Pakraman*”. 19 September 2011. hlm 1.

*Warta Bali*. 2011c. “Mangu Pastika Ogah Komentari Kasus Gugatannya kepada *Bali Post*. Bicara Kebebasan Pers, Siap Dihubungi Wartawan Kapan Saja”. 20 Desember 2011. Hlm 1 dan 11.

# “DARI KONFLIK DESA KE LAYAR KACA”

(Pertarungan Ideologi Kekuasaan Media dan Kekuasaan Penguasa)



Tonggak reformasi yang bermula tahun 1998, memberikan dua hal penting pada perkembangan dunia pertelevisian di Indonesia baik TV nasional dan TV lokal. Pertama, memiliki kebebasan izin mendirikan TV dan kedua, kebebasan memproduksi berita serta menjadikan berita sebagai salah satu acara unggulan untuk meningkatkan rating bahkan terkadang sampai menomorduakan objektivitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana liputan Bali TV dalam kasus Kemoning-Budaga, Klungkung, Bali, sebuah konflik yang meletus 19 September 2011 yang memojokkan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, hendak membubarkan desa pakraman di Bali. Mangku Pastika tidak bisa menerima sehingga melakukan somasi bahkan menuntut Bali Post secara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. Wacana pemberitaan Bali TV yang ikut memperuncing konflik menarik diteliti untuk mengetahui agenda subjektif di balik politik penayang berita. Data utama penelitian ini berupa wacana pemberitaan Bali TV dalam kasus Kemoning-Budaga yang berupa dokumentasi dari materi yang pernah ditayangkan. Data penunjang adalah pemberitaan media cetak terkait dan wawancara dengan wartawan dan pimpinan redaksi media massa terkait serta tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam penanganan kasus Kemoning-Budaga.

Teori yang digunakan untuk menganalisis wacana liputan Bali TV tentang Kasus Kemoning-Budaga, Klungkung Bali ada empat yaitu teori wacana, agenda setting, framing, dan semiotika. Keempat teori ini diaplikasikan secara eklektik untuk menganalisis secara kritis proses pembentukan wacana dan wacana tanding dalam kasus Kemoning-Budaga. Penelitian ini menggunakan paradigma wacana kritis dengan pendekatan fenomenologis dan metode kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa wacana liputan dalam kasus bentrok Kemoning-Budaga di Bali TV merupakan perpanjangan dari wacana media cetak Bali Post dan anggota KMB yang dikelola dengan agenda setting yang jelas untuk kepentingan sosial, politik, dan ideologi KMB. Pada saat yang sama Gubernur Made Mangku Pastika juga melakukan wacana tanding dengan memanfaatkan lembaga kehumasan Pemprov. Bali dan media di luar KMB seperti TVRI Bali dan Radar Bali. Konflik antara ke dua belah pihak tetap masih berlanjut walau Bali TV telah dinyatakan melanggar kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers dan melanggar hukum oleh vonis tingkat Pengadilan Negeri yang menyebabkan pers kehilangan objektivitasnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH,

Secara khusus, rasa hormat dan terima kasih setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Litt, selaku promotor, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dukungan, semangat, dan saran yang detail bagi penulisan disertasi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A, selaku kopromotor I, yang dengan sabar membaca, memberikan saran komentar secara sistematis, dalam penyusunan disertasi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, S. Kar., M.Hum, selaku kopromotor II berkat waktu dan pikiran sepenuhnya untuk memberikan koreksi secara terinci dalam penyusunan disertasi ini. Segala budi baik beliau mendapat imbalan pahala dan selalu dianugerahi kesehatan serta kekuatan lahir dan bathin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih juga disampaikan kepada Rektor ISI Denpasar (Prof. Dr. I Wayan 'Kun' Adnyana, S.Sn., M.Sn), Ketua LP2MPP ISI Denpasar (Dr. Ni Made Arshiniwati, SST., M.Si, teman-teman KORPUS, Tendik, Editor I Nyoman Payuyasa, Desain Sampul Agus Ngurah Arya Putraka, dan Layout Agus Eka Aprianta.

ISBN 978-623-5560-00-7

